

Editor:  
Ronald Watrianthos



# Analisis KEBIJAKAN PENDIDIKAN

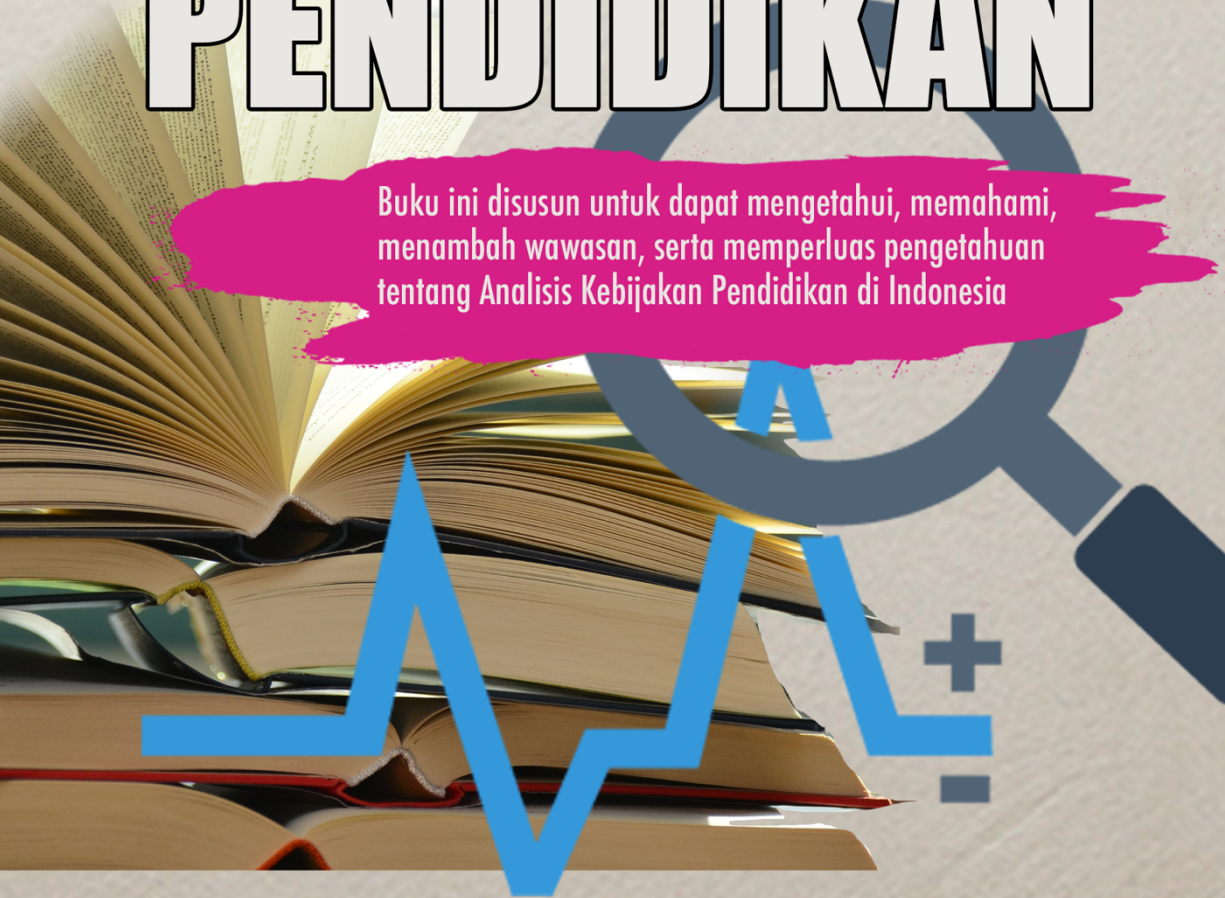
Buku ini disusun untuk dapat mengetahui, memahami, menambah wawasan, serta memperluas pengetahuan tentang Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Sukarman Purba • Erika Revida • Andi Febriana Tamrin • Erniati Bachtiar  
Bonaraja Purba • Yulia Rizki Ramadhani • Pratiwi Bernadetta Purba  
Dina Chamidah • Janner Simarmata • Ika Yuniwati • Marto Silalahi  
Karwanto • A. Nururrochman Hidayatulloh

Editor:  
Ronald Watrianthos

# Analisis KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Buku ini disusun untuk dapat mengetahui, memahami, menambah wawasan, serta memperluas pengetahuan tentang Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia



## UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

# **Analisis Kebijakan Pendidikan**

Sukarman Purba, Erika Revida, Andi Febriana Tamrin, Erniati Bachtiar  
Bonaraja Purba, Yulia Rizki Ramadhani, Pratiwi Bernadetta Purba  
Dina Chamidah, Janner Simarmata, Marto Silalahi  
Karwanto, A. Nururrochman Hidayatulloh



Penerbit Yayasan Kita Menulis

# Analisis Kebijakan Pendidikan

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Sukarman Purba, Erika Revida, Andi Febriana Tamrin  
Erniati Bachtiar Bonaraja Purba, Yulia Rizki Ramadhani  
Pratiwi Bernadetta Purba, Dina Chamidah, Janner Simarmata  
Ika Yuniwati, Marto Silalahi, Karwanto  
A. Nururrochman Hidayatulloh

Editor: Ronal Watrianthos

Desain Sampul: Tim Kreatif Kita Menulis

Sampul: pexels.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: [kitamenulis.id](http://kitamenulis.id)

e-mail: [press@kitamenulis.id](mailto:press@kitamenulis.id)

WA: 0821-6453-7176

Sukarman Purba., dkk.

Analisis Kebijakan Pendidikan

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 192 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6840-47-4 (print)

E-ISBN: 978-623-6840-48-1 (online)

Cetakan 1, Januari 2021

- I. Analisis Kebijakan Pendidikan
- II. Yayasan Kita Menulis

## Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa  
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

# Kata Pengantar

Segala Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku Analisis Kebijakan Pendidikan di awal tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Buku ini disusun untuk dapat mengetahui, memahami, menambah wawasan, serta memperluas pengetahuan tentang Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia, yang disajikan dari berbagai sumber, literatur dan kondisi di lapangan. Buku ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan pendidikan bagi pimpinan, pengambil kebijakan, dosen, kepala sekolah, pengawas, pemerhati dalam bidang manajemen, ekonomi, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Buku ini disajikan dengan struktur yang dibangun atas tiga belas jenis tulisan, sehingga pembahasannya lebih komprehensif, yaitu:

1. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan.
2. Inovasi dan perubahan dalam pendidikan.
3. Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya.
4. Pendidikan dan Gender.
5. Pendidikan dan Ekonomi.
6. Pendidikan dan Mobilitas Sosial.
7. Pendidikan Multikultural.
8. Pendidikan Inklusi.
9. Pendidikan dan Teknologi Informasi.
10. Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi.
11. Implementasi Kebijakan.
12. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.
13. Penelitian Kebijakan Pendidikan

Buku ini dapat terwujud karena kerjasama yang baik, partisipasi, dukungan, bimbingan dan kritik dari berbagai pihak, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berkolaborasi, membantu dan mendukung dalam penerbitannya.

Penulis sangat mengharapkan kritik konstruktif dan saran dari pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini. Semoga Buku ini dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi para pembaca, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan sekaligus memberikan sumbangan pada peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Januari 2021

Penulis.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel.....	xiii

## **Bab 1 Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan**

1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Kebijakan Pendidikan .....	2
1.3 Pendekatan Dalam Menentukan Kebijakan Pendidikan .....	8
1.4. Tujuan Kebijakan Pendidikan .....	9
1.5 Manfaat Kebijakan Pendidikan .....	10
1.6 Karakteristik Kebijakan Pendidikan .....	11
1.7 Aspek-aspek Kebijakan Pendidikan .....	12

## **Bab 2 Inovasi dan Perubahan Dalam Pendidikan**

2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Pengertian Inovasi .....	16
2.3 Pengertian Perubahan.....	18
2.4 Pengertian Pendidikan.....	19
2.5 Inovasi dan Perubahan Pendidikan .....	21

## **Bab 3 Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya**

3.1 Pendahuluan.....	27
3.2 Perubahan Pendidikan di Indonesia .....	28
3.3 Perubahan Sosial Budaya pada Pendidikan Indonesia .....	33

## **Bab 4 Pendidikan dan Gender**

4.1 Pendahuluan.....	37
4.2 Gender dalam Pendidikan.....	40
4.3 Peran Gender Dalam Pembangunan .....	43

**Bab 5 Pendidikan dan Ekonomi**

5.1 Pendahuluan.....	47
5.2 Peran Pendidikan Terhadap Ekonomi .....	49
5.2.1 Pendidikan sebagai Investasi .....	49
5.2.2 Investasi dalam Pendidikan .....	50
5.3 Peran dan Fungsi Ekonomi Dalam Pendidikan.....	53

**Bab 6 Pendidikan dan Mobilitas Sosial**

6.1 Pendahuluan.....	57
6.2 Memahami Mobilitas Sosial dan Pendidikan.....	58
6.3 Hubungan Pendidikan Dan Mobilitas Sosial .....	59
6.3.1 Peran Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial .....	59
6.3.2 Pendidikan Saluran Mobilitas Sosial.....	61
6.4 Strategi Pembaruan Pendidikan Menghadapi Mobilitas Sosial .....	62

**Bab 7 Pendidikan Multikultural**

7.1 Pengertian.....	65
7.2 Prinsip Pendidikan Multikultural .....	67
7.3 Tujuan Pendidikan Multikultural .....	67
7.4 Nilai-nilai Pendidikan Multikultural .....	68
7.5 Dimensi Pendidikan Multikultural .....	68
7.6 Faktor Penyebab terjadinya Multikultural .....	70
7.7 Tantangan Pendidikan Multikultural .....	70
7.8 Pendekatan Pendidikan Multikultural.....	71
7.9 Penerapan Pendidikan Multikultural.....	72

**Bab 8 Pendidikan Inklusi**

8.1 Pengertian.....	77
8.2 Konsep Pendidikan Inklusi .....	80
8.3 Perkembangan Pendidikan Inklusi.....	83
8.4 Pentingnya Pendidikan Inklusi .....	83
8.5 Sistem Pendidikan Inklusi.....	85
8.6 Syarat Pendidikan Inklusi .....	86
8.7 Pendidikan Inklusi di Abad 21 .....	87
8.8 Manfaat Pendidikan Inklusi .....	88

**Bab 9 Pendidikan dan Teknologi Informasi**

9.1 Pendahuluan.....	91
9.2 Macam-Macam Pendidikan.....	92

9.3 Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan .....	93
---------------------------------------------------------------------	----

## **Bab 10 Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi**

10.1 Pendahuluan.....	99
10.2 Isu dan Masalah dalam Pendidikan Tinggi .....	101
10.3 Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Pembukaan Program Studi Baru .....	103
10.4 Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi .....	106
10.5 Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.....	108
10.6 Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Hak Belajar di Luar Program Studi .....	109

## **Bab 11 Implementasi Kebijakan**

11.1 Pendahuluan.....	113
11.2 Peranan dan Keberadaan Implementasi Kebijakan .....	116
11.3 Keberdayaan Implementasi Kebijakan.....	120

## **Bab 12 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

12.1 Pendahuluan.....	127
12.2 Konsep Dasar Monitoring dalam Analisis Kebijakan.....	130
12.3 Konsep Dasar Evaluasi Dalam Analisis Kebijakan.....	132
12.4 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan .....	135
12.4.1 Manfaat Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	135
12.4.2. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Satuan Pendidikan (Sekolah) .....	140

## **Bab 13 Penelitian Kebijakan Pendidikan**

13.1 Pendahuluan.....	145
13.2 Definisi Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	147
13.3 Karakteristik dan Ciri Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	151
13.4 Tata Kelola Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	153
13.5 Lokus Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	155
13.6 Fungsi dan manfaat dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	157
13.7 Pendekatan Dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	158
13.8 Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	161
13.9 Mengkomunikasikan Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	162

Daftar Pustaka .....	165
Biodata Penulis .....	186



## Daftar Gambar

Gambar 8.1: Pentingnya Pendidikan Inklusi .....	84
Gambar 8.2: Pendidikan inklusi terhubung dengan anak penyandang disabilitas yang menyadari hak-hak lainnya .....	84
Gambar 8.3: Sistem Pendidikan .....	85
Gambar 9.1: Fungsi TIK .....	95
Gambar 9.2: Intervensi TI dalam reformasi Pendidikan.....	95
Gambar 10.1: Kompetensi Revolusi Industri 4.0 .....	102
Gambar 10.2: Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka .....	103
Gambar 12.1: Pentingnya Akreditasi Sebagai Alat Akuntabilitas Publik ....	139
Gambar 13.1: Tahapan Kebijakan Publik .....	147
Gambar 13.2: Lokus dan Ruang Penelitian Kebijakan Pendidikan.....	156



# Daftar Tabel

Tabel 4.1: Perbedaan antara gender dengan jenis kelamin .....	39
Tabel 10.1: Prosedur Analisis Kebijakan Menurut Waktu Tindakan.....	100
Tabel 10.2: Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Asal .....	110
Tabel 12.1: Kriteria Evaluasi .....	134
Tabel 11.2: Hubungan dan Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi .....	141



# **Bab 1**

# **Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan**

## **1.1 Pendahuluan**

Pendidikan merupakan hal penting dalam suatu negara yang tidak boleh dikesampingkan, karena salah satu tujuan negara adalah untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sehingga setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua akan menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik maupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.

Berkaitan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan prioritas utama pembangunan di bidang pendidikan, baik di pusat, provinsi maupun daerah dengan melakukan reformasi pendidikan. Landasan utama yang mendasari diambilnya suatu kebijakan adalah hasil pertimbangan akal manusia yang merupakan unsur yang dominan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan dan mengandung unsur-unsur yang rasional.

Untuk mendukung kebijakan pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyediakan anggaran pendidikan yang mencukupi, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang keberhasilan mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menyiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas yang optimal dalam upaya mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kinerja yang memiliki daya saing tinggi.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan arah serta jalur dalam proses pendidikan itu sendiri. Pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang akan diambil, akan sangat berpengaruh pada kualitas mutu pendidikan dari tingkat satuan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diambil merupakan perubahan dari aspek pendidikan sebelumnya, yaitu perbaikan dalam tujuan, rencana, program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjadi pedoman ketika melakukan kegiatan atau mengambil keputusan.

Kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan harus direncanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perumusannya, analisis, implementasi, monitoring/pemantauan serta evaluasi seputar masalah pendidikan yang akan diterapkan agar dapat menjawab tantangan pendidikan, dapat diberlakukan dan diperbarui secara periodik. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kebijakan pendidikan dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dalam menentukan program pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

## 1.2 Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu 'polis' yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Syafaruddin, 2008). Hough (1984) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan, yaitu kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Koontz, Donnell dan Wehrich (1992) mengatakan bahwa kebijakan

adalah sebagai tuntunan dalam berpikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntun manajer dalam memutuskan komitmen. Dengan demikian, kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Muhadjir (2003) mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif, yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.

Sedangkan, Rahardjo (2010) menyampaikan pernyataan Duke dan Canady yang mengkolaborasikan konsep kebijakan dengan 8 (delapan) arah pemaknaan kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan;
2. Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya;
3. Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresioner;
4. Kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah;
5. Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi;
6. Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif;
7. Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan
8. Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan kebijakan merupakan tataran aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Sebuah kebijakan yang baik perlu dijabarkan

secara operasional dari tujuan umum menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik. Dalam penjabaran kebijakan yang akan diambil perlu adanya pengaturan sumber dana, sumber daya, serta perangkat organisasi lainnya agar kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Syafaruddin (2008) menyampaikan pernyataan Putt dan Springer bahwa ada 3 (tiga) tahapan dalam proses penentuan kebijakan, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu formulasi atau pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan yang divisualisasikan, yang berisi serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan;
2. Tahap implementasi kebijakan, yaitu yang memiliki prinsipnya dapat dilaksanakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi;
3. Tahap evaluasi, yaitu dalam proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (stakeholders), atau sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai sehingga dapat diterima umpan balik dari proses kebijakan.

Jadi evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan stakeholder mengetahui apa yang terjadi, sehingga memberikan paparan aktivitas implementasi kebijakan sehingga dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan yang sesuai sasaran, dan pemahaman terhadap alasan keberhasilan atau kegagalan

dan dapat memberikan sasaran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran.

Sedangkan, Prihatin (2011) menyatakan bahwa kebijakan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan memperhatikan kebijakan yang sederajat lainnya;
3. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi ke masa depan;
4. Kebijakan yang dibuat harus adil;
5. Kebijakan yang dibuat harus berlaku untuk waktu tertentu;
6. Kebijakan yang dibuat harus merupakan perbaikan atas kebijakan yang telah ada;
7. Kebijakan yang dibuat harus mudah dipahami, diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi;
8. Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan informasi yang benar dan up to date;
9. Sebelum kebijakan dijadikan keputusan formal, maka bila mungkin diujicobakan terlebih dahulu.

Pentingnya suatu kebijakan diambil untuk dapat dijadikan rujukan dalam suatu organisasi. Hal ini didukung pernyataan Dunn (2003) bahwa kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kebijakan diambil oleh pemegang otoritas dalam pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Abidin (2006) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan.

Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari makna sempitnya, pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga mendidik. Pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap manusia, karena pada dasarnya

pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak akan pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia. Suhaleyanti, dkk (2020) menyatakan pendidikan merupakan salah satu aspek dan penopang kehidupan terpenting dalam pembangunan bangsa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap manusia dan merupakan kebutuhan yang tidak akan pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia.

Sejarah menunjukkan kunci keberhasilan pembangunan negara maju adalah tersedianya penduduk yang terdidik dalam jumlah, jenis dan level yang memadai. Oleh karena itu, semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dijadikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan.

Konsep Kebijakan dan Pendidikan mengandung makna yang dalam dan luas sehingga menimbulkan berbagai definisi. Kebijakan pendidikan terdiri dari dua kata yaitu kebijakan (policy) dan pendidikan (education). Kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Amtu, 2013). Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai hak asasi manusia, kunci pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian serta stabilitas dalam suatu negeri (Syafarudin, 2008).

Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Nugroho (2008) menyatakan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Artinya, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di bidang pendidikan.

Rohman (2009) menyatakan istilah kebijakan pendidikan biasa disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), atau biasa disebut dengan kebijakan tentang pendidikan (policy of

education) namun istilah-istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut.

Pengertian kebijakan pendidikan menurut para ahli, yaitu:

1. Good (1959) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, yang dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.
2. Nugroho (2008) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
3. Tilaar (2009) menyatakan kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.
4. Rohman (2009) menyatakan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.

Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Artinya, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam

rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Jadi kebijakan pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perumusan, analisis, implementasi, monitoring/pemantauan serta evaluasi seputar masalah pendidikan yang diterapkan dalam menjawab tantangan pendidikan dan diberlakukan secara periodik.

## 1.3 Pendekatan Dalam Menentukan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan diambil agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengarahkan pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan. Artinya, kebijakan pendidikan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi pendidikan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan proses pendidikan. Untuk menentukan kebijakan dalam pendidikan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat maka harus dilakukan dengan berbagai pendekatan.

Sagala (2014) menyatakan pendekatan yang dilakukan untuk mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan dilakukan dengan:

1. Pendekatan Empirik (Empirical Approach), yaitu yang ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan yang bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Analisis kebijakan secara empirik diharapkan akan menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan pendidikan.

2. Pendekatan Evaluatif (Evaluatif Approach), yaitu pendekatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan atautkah tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak. Penekanan pendekatan evaluatif ini terutama pada penentuan bobot atau manfaatnya (nilai) beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif. Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluasi, yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dalam pendidikan yang ditentukan.

## 1.4 Tujuan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk perbaikan dalam konsep pendidikan, peraturan-peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik pendidikan masa lalu yang tidak sesuai sehingga adanya perubahan aspek pendidikan di masa yang akan datang. Untuk itu, kebijakan pendidikan sangat diperlukan guna mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien.

Bahtiar (2012) menyatakan tujuan kebijakan apabila dihubungkan dengan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Dilihat dari sisi tingkatan masyarakat, yaitu tujuan kebijakan dapat diamati, dianalisis dari fakta serta realita dari hakikat tujuan pendidikan yang universal, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Dilihat dari sisi tingkatan politisi, yaitu tujuan kebijakan ini dapat diamati dan ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Pendidikan sebagai suatu kebijakan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menciptakan generasi masyarakat dalam aspek adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga wawasan, sikap dan perilakunya semakin demokratis;
3. Dilihat dari sisi tingkatan ekonomi, yaitu tujuan kebijakan ini dapat dilihat dan ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai

investasi jangka panjang yang didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- a. Pendidikan adalah untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi.
- b. Inventasi pendidikan memberikan nilai baik yang lebih tinggi daripada inventasi fisik di bidang lain. Pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup signifikan terutama ketika seseorang telah menggali dan mengaktualisasikan potensi diri dan mempunyai kompetensi yang cukup sesuai dengan bidangnya.

## 1.5 Manfaat Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah segala sesuatu yang sifatnya esensial dan komprehensif, karena kebijakan yang diambil berkaitan dengan pendidikan yang ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi yang berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, mengatasi berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Hasbullah (2015) menyatakan kebijakan pendidikan agar dapat bermanfaat, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar. Dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat perlu diperhatikan faktor pendukung dan penghambatnya agar kebijakan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasbullah (2015) menyampaikan pendapat Siagian bahwa ada 5 faktor yang perlu diperhatikan yang berpengaruh dan dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan antara lain; (1) manusia, (2) struktur, (3) proses administrasi dan manajemen, (4) dana, (5) daya.

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan agar membawa manfaat haruslah bersifat bijaksana, dalam arti pendidikan tidak menimbulkan problematika baru yang lebih besar dan rumit jika dibandingkan dengan problem yang hendak dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah mendorong pencapaian produktivitas, dan kualitas serta pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Tilaar dan Nugroho (2009) menyatakan kebijakan pendidikan yang baik dan bermanfaat adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan. Oleh sebab itu, pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien. Berdasarkan pernyataan ini dapat dinyatakan kebijakan pendidikan harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, sumber dana yang memadai dan riset pengembangan.

## 1.6 Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat diperoleh manusia Indonesia berkualitas tinggi. Untuk itu, kebijakan pendidikan yang diambil haruslah dapat dirasakan dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang merata. Untuk meningkatkan kebijakan pendidikan haruslah memiliki karakteristik yang khusus.

Imron (2008) menyatakan bahwa karakteristik kebijakan pendidikan, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan, yaitu kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan;
2. Memenuhi aspek legal-formal, yaitu kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Untuk itu, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah, agar dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut, sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang memiliki legitimasi;
3. Memiliki konsep operasional, yaitu kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai

- manfaat operasional agar dapat diimplementasikan atau untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai;
4. Dibuat oleh yang berwenang, yaitu kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan;
  5. Dapat dievaluasi, yaitu kebijakan pendidikan tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka harus dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus segera diperbaiki, agar kebijakan pendidikan memiliki karakter dan dapat dievaluasi secara mudah dan efektif;
  6. Memiliki sistematika, yaitu kebijakan pendidikan merupakan sebuah sistem sehingga harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika tersebut dituntut memiliki efektivitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan struktur yang rapuh.

## 1.7 Aspek-aspek Kebijakan Pendidikan

Tilaar dan Nugroho (2012) menyatakan aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan, yaitu:

1. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan tentang hakikat manusia dalam lingkungan kemanusiaan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu;
2. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi;

3. Kebijakan pendidikan mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya;
4. Keterbukaan, yaitu proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan yang terjadi dalam interaksi sosial. Artinya, pendidikan itu merupakan milik masyarakat sehingga suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu didengar suara atau saran dari masyarakat;
5. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan, yaitu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan, yang merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga dapat dilihat output dalam praktiknya;
6. Analisis kebijakan, yaitu untuk berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan;
7. Kebijakan pendidikan ditujukan kepada kebutuhan peserta didik dan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat;
8. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang demokratis. Peserta didik akan mandiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif, pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global;
9. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret;

10. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi, yaitu bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praktek pendidikan, yang harus dilaksanakan masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan;
11. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik, yaitu sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik dan untuk memfasilitasi bertumbuhkembangnya peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif;
12. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang rasional. Akan tetapi, merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis risiko serta jalan keluar untuk pemecahannya;
13. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya.

## **Bab 2**

# **Inovasi dan Perubahan Dalam Pendidikan**

### **2.1 Pendahuluan**

Pada umumnya manusia suka pada hal-hal yang baru, misalnya baju baru, sepatu baru, semangat baru dan sebagainya. Inovasi selalu menciptakan hal-hal yang baru. Inovasi adalah munculnya gagasan, ide, pendapat baru terhadap suatu hal baik itu produk, proses maupun metode. Gagasan, ide, pendapat baru tersebut kemudian diadopsi dan diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Inovasi bisa dilakukan dengan mengemas produk barang dan jasa yang lama menjadi kelihatan baru atau yang disebut dengan rekayasa atau menciptakan barang dan jasa yang belum ada menjadi ada.

Di sisi lain, inovasi seringkali dilakukan untuk mencegah munculnya rasa bosan terhadap suatu hal. Namun inovasi yang dilakukan haruslah sesuai dengan selera pengguna barang dan jasa. Dengan inovasi, maka diharapkan akan muncul suasana baru dan bahkan semangat baru untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di satu sisi inovasi sering dilakukan untuk menjaga kesetiaan pelanggan atau pengguna barang dan jasa. Dengan kualitas dan kemasan baru

terhadap barang dan jasa, maka akan cenderung meningkatkan kesetiaan pengguna sehingga menjadi pengguna atau pelanggan yang setia.

Oleh karena itu inovasi menjadi suatu keharusan agar tujuan dapat tercapai dengan lebih baik. Pada era globalisasi ini, inovasi dan perubahan dalam pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan antara dengan semakin tingginya kebutuhan pasar dan dunia kerja terhadap lulusan lembaga pendidikan mengharuskan lembaga pendidikan melakukan inovasi dan perubahan dalam pendidikan.

Dalam prakteknya, inovasi dan perubahan dalam pendidikan seringkali dimulai dari munculnya suatu masalah. Masalah dalam pendidikan mengharuskan lembaga pendidikan melakukan terobosan baru atau inovasi serta perubahan dalam pendidikan agar kualitas lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan pasar dan dunia kerja. Inovasi dan perubahan pendidikan dalam hal ini meliputi kurikulum, metode atau strategi belajar mengajar, kualitas tenaga pengajar, pembiayaan hingga penggunaan sarana prasarana pendidikan.

## 2.2 Pengertian Inovasi

Inovasi adalah penemuan baru terhadap suatu hal yang sebelumnya belum ada menjadi ada atau yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Dengan inovasi maka produk barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan memiliki nilai tambah. Inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *innovation* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata inovasi. Inovasi sadar atau tidak sadar sesungguhnya sudah ada sejak nenek moyang kita dulu, hanya saja ketika itu inovasi yang dilakukan terbatas dengan cara *trial and error* (coba dan gagal dan coba lagi dan seterusnya) dan belum secanggih saat ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi terjadi disebabkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering juga disebut dengan istilah transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Anatan dan Elitan (2009) menyatakan inovasi adalah sistem aktivitas organisasi yang mentransformasi teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi. Demikian pula Stata (1989) menyatakan inovasi berkaitan erat dengan teknologi yang berfungsi membuka wawasan perusahaan tentang suatu produk baru atau meningkatkan desain dan manufaktur dari produk (layanan).

Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan meliputi semua tahapan mulai dari tahapan input (masukan), process (proses), dan output (produk) serta metode pemasaran barang maupun jasa sehingga menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Salim (2002) menyatakan transformasi adalah suatu proses penciptaan suatu hal yang baru (something new) yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun beberapa pengertian inovasi menurut para ahli ditampilkan sebagai berikut:

1. Robbins (1996) mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa
2. Durianto (2004) memberi batasan inovasi yaitu proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan dan memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial).
3. Hills (2008) menyatakan inovasi sebagai ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh seseorang individu atau unit pengguna lainnya.
4. Tjiptono (2008) memberi arti inovasi sebagai implementasi praktis sebuah gagasan ke dalam produk atau proses baru.
5. Fontana (2011) menyatakan inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, dan lingkungan.
6. Ancok (2012) menyatakan ada beberapa jenis inovasi yaitu (1) inovasi proses, (2) inovasi metode, (3) inovasi struktur organisasi, (4) inovasi dalam hubungan, (5) inovasi strategi, (6) inovasi pola pikir (mindset), (7) inovasi produk, dan (8) inovasi pelayanan. Dengan demikian, cakupan inovasi sesungguhnya cukup luas meliputi hampir seluruh proses kehidupan manusia mulai dari gagasan, sikap,

perilaku, proses maupun hasil atau produk barang dan jasa yang dihasilkan manusia.

## 2.3 Pengertian Perubahan

Perubahan adalah sesuatu yang abadi didunia ini. Tidak ada di dunia ini yang tetap kecuali perubahan. Tidak ada pula di dunia ini yang tidak pernah mengalami perubahan. Semuanya mengalami perubahan kecil atau besar, cepat atau lambat. Menurut Abdulsyani (2007) perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Dengan demikian perubahan terjadi disebabkan faktor keterbatasan manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Moeliono, 1988), perubahan berasal dari kata dasar ubah atau berubah yang artinya menjadi lain dari (berbeda) dari semula. Dengan demikian perubahan mengandung arti ada sesuatu yang berbeda antara yang lama dengan yang baru. Nanang Martono (2012) menyatakan bahwa perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu. Aspek yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat memengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang.

Pada hakikatnya perubahan dapat berasal dari internal yaitu dari dalam diri individu seperti motivasi, komitmen, maupun berasal dari eksternal yaitu dari luar diri individu seperti lingkungan masyarakat, sosial, budaya, politik, keluarga sendiri dan sebagainya. Perubahan dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Menurut Robbins (1996) perubahan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi.

Melakukan perubahan untuk manusia apalagi perubahan perilaku, dalam prakteknya tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Selalu ada orang yang menolak perubahan yang disebut dengan *resistance to change*. Namun dengan peningkatan pengetahuan dan pendidikan manusia secara terus menerus dengan pendekatan yang signifikan, maka perubahan biasanya akan dapat diterima. Oreg (2003) menyatakan *resistance to change*

dikonseptualisasikan sebagai karakteristik individu yang mencerminkan pendekatan umum (negatif) ke arah perubahan dan kecenderungan untuk menghindari atau melawannya.

Selanjutnya beberapa alasan menolak perubahan (*resistance to change*). Kotter dan Schlesinger (1979) menyatakan ada 4 (empat) hal yang menjadi alasan utama orang resisten terhadap perubahan yaitu (1) mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga, (2) mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya, (3) mereka percaya bahwa perubahan tidak masuk akal, (4) mereka memiliki toleransi yang rendah untuk perubahan. Selain itu, Oreg (2003) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sumber resistensi terhadap perubahan berasal dari dalam diri individu yang meliputi keengganan untuk kehilangan kontrol, kekakuan kognitif, kurangnya ketahanan psikologis.

## 2.4 Pengertian Pendidikan

Mendapatkan pendidikan yang berkualitas adalah hak dasar (asasi) bagi setiap manusia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hanya melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif. Rinawati (2015) menyatakan pendidikan bukan hanya sekedar memenuhi hak asasi manusia, akan tetapi juga merupakan alat strategis untuk membangun masyarakat.

Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kebutuhan dasar (asasi) manusia di bidang pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan hingga 9 (sembilan) tahun atau minimal tamat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Apabila ada warga negara yang tidak mengikuti wajib belajar tersebut akan dikenakan denda.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 tertulis sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan,

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta kesejahteraan manusia.

Pendidikan adalah tolok ukur kemajuan suatu bangsa dan menjadi cerminan kemajuan masyarakatnya (Hasbullah, 1996). Pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh manusia secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan pada dasarnya dilakukan manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hayatnya atau yang sering disebut dengan istilah long life education. Hal ini mengandung arti bahwa sifat pendidikan adalah lestari dan tanpa henti sampai ajal menjemputnya.

Pengertian pendidikan menurut para ahli tampak sebagai berikut:

1. Hamalik (2004) memberi arti pendidikan sebagai suatu proses dalam rangka memengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.
2. Dewey (2003) menyatakan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.
3. Ihsan (2005) mendefinisikan pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.
4. Siagian (2006) mengartikan pendidikan yaitu keseluruhan proses teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu

pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Heidjrachman dan Husnah (2011) memberi batasan pendidikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari

Dari pengertian para ahli di atas, dapat dinyatakan yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses belajar yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan tujuannya.

## 2.5 Inovasi dan Perubahan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan alat untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah dari tahun ke tahun sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai program dan kegiatan yaitu inovasi dan perubahan dalam pendidikan. Inovasi dan perubahan dalam pendidikan dilakukan di semua tingkatan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Demikian halnya dengan pendidikan informal dan nonformal turut menjadi perhatian pemerintah dengan melakukan inovasi dan perubahan-perubahan.

Ibrahim (1998) menyatakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil intervensi (penemuan baru) atau discovery (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional.

Pendidikan hanya akan berjalan dengan baik jika diiringi dengan inovasi. Adapun tujuan dari inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas, relevansi mulai dari kurikulum, kualitas sumber daya manusia (guru, siswa/mahasiswa dan tenaga kependidikan), metode, sarana dan prasarana pendidikan dengan sumber dana yang minim.

Adapun kendala-kendala yang memengaruhi keberhasilan usaha inovasi dan perubahan dalam pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain adalah: (1) perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi (2). konflik dan motivasi yang kurang sehat (3). lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan (4). keuangan (finansial) yang tidak terpenuhi (5). penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi (6) kurang adanya hubungan sosial dan publikasi (Subandiyah 1992). Dengan demikian secara garis besar jenis-jenis inovasi dan perubahan dalam pendidikan meliputi (a) inovasi guru, (b) inovasi kurikulum, (c) inovasi metode pembelajaran, (c) inovasi pembiayaan pendidikan, dan (d) inovasi sarana dan prasarana pembelajaran.

### **Inovasi Guru**

Guru adalah narasumber utama di sekolah. Oleh karena itu pengetahuan dan pendidikan guru harus ditingkatkan kualitasnya. Guru yang inovatif adalah guru yang selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya dalam melakukan pembelajaran. Hal ini akan berdampak pada kualitas “transfer of knowledge” guru kepada siswa/anak didik. Semakin inovatif guru dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya dalam melakukan pembelajaran maka akan semakin bagus kualitas anak didik dan sebaliknya.

Oleh karena itu guru yang inovatif adalah guru yang terus menerus belajar tanpa henti. Naim (2009) mengatakan bahwa guru yang terus belajar akan menjadikan pembelajaran yang menarik dan guru yang terus belajar akan ditiru oleh anak didiknya serta menjadikan relasi antara guru dan siswa semakin dekat dan sebaliknya. Dengan demikian guru yang inovatif akan selalu mencari cara-cara atau metode baru dalam melakukan pembelajaran agar menarik dan disenangi serta tentunya akan berdampak pada prestasi belajar siswa dan sebaliknya. Guru yang inovatif sekaligus berfungsi sebagai inspirasi dan motivator bagi siswa/anak didiknya agar menjadi yang terbaik untuk mencapai cita-citanya.

### **Inovasi Kurikulum**

Kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu *Curriculum* yang artinya rancangan belajar mengajar (a plan of learning). Kurikulum adalah pedoman utama atau acuan utama guru dan siswa/anak didik dalam melakukan proses belajar mengajar yang harus diimplementasikan dengan nyata. Syaodih (1997) mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar, sedangkan Nasution (2006) memberi arti kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tertulis pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang inovatif haruslah dapat mengikuti perkembangan jaman, teknologi informasi serta kebutuhan pasar.

Adapun prinsip-prinsip inovasi kurikulum menurut Hamalik (2011) yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan
2. Relevansi
3. Efisiensi dan efektivitas
4. Fleksibilitas (keluwesan)
5. Berkesinambungan (kontinuitas)
6. Keseimbangan
7. Keterpaduan, dan prinsip
8. Mutu.

Inovasi kurikulum sesungguhnya dimaksudkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah dirumuskan sebelum dilakukan kurikulum. Capaian pembelajaran selalu di inovasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar.

### **Inovasi Metode Pembelajaran**

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling memengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2004). Menurut Sanjaya (2010) yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran adalah suatu ide,

gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Strategi pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran yang menyenangkan baik bagi guru maupun siswa/anak didik (Simarmata *et al.*, 2019; Mawati *et al.*, 2020)

Guru sebagai nara sumber utama di sekolah harus dapat menciptakan strategi pembelajaran yang inovatif sehingga terkesan tidak kaku dan monoton sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi siswa untuk belajar. Menurut Blanchard (2001) pembelajaran yang inovatif meliputi 6 (enam) hal yaitu:

1. Pembelajaran bermakna
2. Penerapan pengetahuan
3. Berpikir tingkat tinggi
4. Kurikulum berdasarkan standar
5. Responsive terhadap budaya
6. Menggunakan penilaian autentik.

Pendapat Blanchard berbeda dengan Muslich (2009) yang menyatakan bahwa kunci pembelajaran inovatif meliputi:

1. Belajar dari kenyataan yang biasa diamati, dipraktikkan, dan dialami dalam kehidupan siswa (real world learning)
2. Belajar melalui pengalaman nyata yang dilakukan secara empiris
3. Menghasilkan pengetahuan yang bermakna pada diri siswa (meaningful)
4. Menggunakan berbagai teknik penilaian 9 (tidak hanya tes).

Selanjutnya Slavin (2005) menyatakan pembelajaran inovatif akan melibatkan siswa secara aktif melakukan sharing (berbagi) pengetahuan antar teman dalam kelompok dan pada saat diskusi tingkat kelas. Salah satu contoh inovasi strategi pembelajaran adalah dengan mengimplementasikan blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang mencoba menggabungkan metode pembelajaran tatap muka (offline) dengan daring (online). Dengan metode pembelajaran blended learning dapat saling akan mereduksi kelemahan kedua metode pembelajaran ini.

### **Inovasi pembiayaan pendidikan**

Biaya pendidikan adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu satuan pendidikan untuk mendapatkan jasa tanah, tenaga kerja, atau modal, untuk membeli barang dan jasa, atau untuk memberikan bantuan finansial kepada siswa (Bowen, 1981). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tertulis bahwa yang dimaksud dengan dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatnya kualitas pendidikan. Semakin baik atau mencukupi pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan, maka akan semakin baik kualitas pendidikan dan sebaliknya. Wibowo (2014) menyatakan pendidikan tanpa biaya, tidak akan bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Pembiayaan pendidikan meliputi semua jenis pengeluaran yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan berupa uang atau barang dan jasa pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan ada beberapa macam mulai dari sumbangan pendidikan dari siswa/anak didik, donasi dari pihak lain yang tidak mengikat, serta yang utama bersumber dari pemerintah.

Pada umumnya pembiayaan pendidikan di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan. Supriyadi (2006) menyatakan hambatan dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia ada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Keterbatasan kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan karena besarnya APBD tersedia yang rendah
2. Komitmen para pengelola pembiayaan pendidikan yang sangat beragam
3. Kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas.

Oleh karena itu diperlukan inovasi pembiayaan pendidikan. Adapun inovasi pembiayaan pendidikan yang dapat dilakukan lembaga pendidikan antara lain dengan membuat unit usaha lembaga pendidikan dan koperasi sekolah. Dengan unit usaha dan koperasi sekolah yang dikelola dengan manajemen yang profesional dan komitmen yang kuat akan dapat menambah pembiayaan pendidikan sekolah/lembaga pendidikan. Unit usaha sekolah sekaligus dapat meningkatkan jiwa wirausaha sekolah.

### **Inovasi sarana prasarana pembelajaran**

Sarana prasarana pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan yang berkualitas. Hal ini didukung oleh pernyataan Dalyono (2009) yaitu kelengkapan sarana dan prasarana belajar akan membantu siswa dalam belajar, dan kurang lengkapnya sarana dan prasarana belajar akan menghambat siswa dalam belajarnya. Sarana dan prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu peralatan yang dibutuhkan dan mendukung dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Sanjaya (2010) mendefinisikan sarana belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Syaodih (2009) menyatakan bahwa fasilitas belajar merupakan semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik bergerak maupun tidak bergerak agar tercapai tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Mulyasa (2004) menyatakan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan tersebut merupakan prasarana pendidikan.

Dalam praktiknya sarana prasarana pembelajaran memiliki keterbatasan baik disebabkan keterbatasan ruang/tempat maupun keterbatasan dana. Oleh karena itu diperlukan inovasi sarana prasarana pembelajaran. Adapun inovasi sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi dan informasi seperti penggunaan sarana dan prasarana e-learning, zoom, whatsapp, google meet, perpustakaan online, pembelajaran daring (online) dan sebagainya (Sudarsana *et al.*, 2018; Simanihuruk *et al.*, 2019; Fajrillah *et al.*, 2020; Yuliani *et al.*, 2020).

## **Bab 3**

# **Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya**

### **3.1 Pendahuluan**

Suatu proses perkembangan dapat terlihat melalui perubahan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Terjadinya perubahan sosial pada masyarakat biasanya diakibatkan oleh suatu hal yang alami dan direncanakan. Perubahan secara alami dapat terkait dengan fase primitif yang mencerminkan perubahan hidup manusia. Sedangkan perubahan terencana dapat terlihat dari kehidupan sosial yang tercermin dari pelaksanaan strata sosial. Hal ini dapat terlihat salah satunya melalui pendidikan.

Perubahan dalam hidup manusia berbeda dalam waktu. Ada yang cepat adapula yang lambat. Perubahan secara cepat dapat terlihat pada kehidupan masyarakat kota yang senantiasa mengikuti kebaruan keadaan. Kebaruan dalam hal isu-isu sosial dan politik. Sedangkan pada masyarakat yang masih berpegang teguh kepada nilai-nilai budaya mereka. Masyarakat ini cenderung sulit untuk menerima pengaruh dalam hal kebaruan yang terjadi. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat terjadi dalam hal nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan

dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lainnya. Perubahan yang terjadi pada masyarakat tidak dapat dicegah.

Perubahan ini tentunya harus diketahui arahnya. Sejatinya, perubahan itu dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meninggalkan hal lama (faktor yang diubah). Ketika perubahan terjadi, tentunya perubahan itu bergerak kepada suatu bentuk yang terbaru. Hal yang lainnya dapat terjadi adalah perubahan yang telah terjadi terhadap hal yang telah ada dalam waktu yang lampau.

Suatu awal dari perubahan adalah komunikasi. Hal yang terjadi pada saat ini adalah proses di mana suatu informasi yang disampaikan dari suatu individu kepada individu lainnya. Proses informasi tersebut mengandung gagasan, ide, dan keyakinan serta hasil budaya secara fisik. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat merupakan suatu bagian atau implikasi dari proses pendidikan melalui interaksi yang dilakukan oleh pengajar dan anak didik. Selain itu, dalam hal pergaulan-pergaulan bersama teman sejawat dalam kurun waktu tertentu, baik pada lingkungan sekolah atau diluar sangat berpengaruh. Ditambahkan pula kegiatan pendidikan yang dilaksanakan yang teratur atau terencana.

Kegiatan pendidikan dimaknai sebagai suatu aktivitas komunikasi yang berlangsung antara manusia dewasa sebagai pengajar dan anak didik. Prosesnya sendiri dapat berlangsung secara tatap muka (luring) dan melalui media seperti pembelajaran daring. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu bangsa. Terjadinya perubahan dalam segi sosial, baik dalam hal nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku dan sebagainya harus dihadapi dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Pendidikan diharapkan mampu menjadi pelaku dalam perubahan.

## 3.2 Perubahan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan suatu proses yang seharusnya dirasakan oleh seluruh umat manusia sebagai sebuah bentuk untuk mempelajari lingkungan mereka. Proses ini dilakukan untuk mencapai suatu tahapan agar manusia mampu menjadi manusia yang lebih baik dan mendapatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Secara sederhana proses pendidikan disamakan dengan proses belajar, yaitu perubahan dari tidak tahu atau belum tahu menjadi tahu dan paham (Martiana, 2015).

Dalam pemahaman filsafat timur pendidikan memiliki makna yang mendalam. Pendidikan diartikan sebagai suatu perubahan batin yang dapat membentuk kebudayaan baru. Perubahan inti yang terjadi jika si anak sedang mendalami sebuah pelatihan dalam bentuk keterampilan dan ilmu pengetahuan. Ketika proses tersebut terjadi, mereka juga diajarkan untuk menyadari proses-proses pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Rasa waspada yang dimiliki anak-anak pada proses ini membuat mereka menjadi pribadi yang kritis terhadap diri mereka sendiri. Hal ini membuat mereka mawas diri terhadap diri mereka sendiri dan mereka akan memiliki kecermatan dalam hal mengamati sehingga dapat membentuk suatu kecerdasan dalam melihat, membedakan dan menjalin hubungan dan komunikasi terhadap sesama manusia, alam dan alat-alat yang diciptakan oleh manusia.

Pada masa ini, pendidikan telah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kebutuhan akan pendidikan telah disamakan kedudukannya dengan kebutuhan-kebutuhan manusia lainnya. Pendidikan menjadi suatu jajaran kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Perubahan dalam persepsi dibutuhkannya pendidikan tercermin nyata pada kehidupan masyarakat. Dahulu yang mampu dan yang ingin mengenyam pendidikan hanyalah kaum bangsawan. Tentunya yang diberikan kesempatan hanyalah kaum pria pada umumnya sedangkan wanita tidak dianggap begitu penting untuk mengenyam pendidikan. Seiring berjalannya waktu, hal ini pun berubah. Kaum wanita diberikan kesempatan yang sama dengan kaum pria dalam dunia pendidikan.

Di Indonesia, pendidikan juga tentunya telah mengalami perubahan. Perubahan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam perubahan yang terjadi di dunia. Perubahan tersebut diantaranya perubahan yang terjadi dari segi teknologi, sosial dan budaya yang tentunya merupakan faktor utama pembawa kemajuan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Posisi pendidikan yang meningkat dan mampu menjadi salah satu faktor yang memberikan kesuksesan bagi suatu bangsa menjadi bukti nyata mengenai kedudukan pendidikan, terutama di Indonesia. Bangsa-bangsa barat, terutama di Amerika dan Eropa telah menjadi panutan pendidikan dunia. Di Benua Asia sendiri, perkembangan pendidikan juga terjadi. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura adalah contoh nyata bangsa yang sukses dengan sistem pendidikannya.

Sebagai suatu bangsa yang posisinya dapat dikatakan masih berkembang, masih mencari satu model pendidikan yang dapat disesuaikan dengan keadaan

demografis dan geografis bangsanya. Sistem pendidikan di Indonesia telah berpedoman kepada Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan sistem yang dinyatakan dapat membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan dapat menjawab berbagai tantangan zaman (Ira, 2015). Sistem pendidikan yang saat ini ada di Indonesia menurut Sistem Pendidikan Nasional secara garis besar dapat terlihat dalam beberapa aspek berikut:

### **Pengelolaan**

Sistem pengelolaan yang dimaksud adalah suatu sistem pendidikan yang dikelola secara sentralistik, tentunya hal ini berlaku di seluruh Indonesia. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran dan lainnya telah diatur oleh pemerintah pusat dan diberlakukan untuk semua sekolah yang berada di Indonesia (Ira, 2015).

Orientasi dari sistem pendidikan di Indonesia adalah kepentingan dan bukan untuk kepentingan peserta didik, pasar dan pengguna jasa pendidikan atau masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa strategi pendidikan nasional diperuntukkan bagi generasi muda agar mereka mampu untuk menaikkan derajat bangsa dan negara ini agar dapat sejajar dengan bangsa dan negara maju lainnya. Meski demikian, dalam kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Keahlian dan penguasaan ilmu yang didapatkan setelah menyelesaikan studinya dimiliki secara individual. Hal ini menjadikan kemampuan yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk menjadikan mereka sebagai cendekiawan yang peduli pada negara, melainkan sebagai seorang yang kemampuannya dinilai dengan uang sesuai dengan profesi kerjanya (Ira, 2015).

### **Peran Pemerintah dan Masyarakat**

Sistem pendidikan secara nasional dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadikan mereka sebagai pengendali pusat. Hal ini bertentangan dengan UU SISDIKNAS yang menyatakan posisi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat juga memiliki kesempatan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka pembinaan ataupun dalam rangka pengembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Masyarakat memiliki peranan yang krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari hasil pendidikan yang dimanifestasikan dalam

penyelenggaraan sekolah, keluarga, dan unit-unit lainnya, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal.

### **Materi Ajar**

Dalam hal materi ajar, orientasinya mengacu pada kepentingan pemerintah agar target pembangunan dapat mengejar pertumbuhan yang ditetapkan. Bahan ajar atau materi ajar merupakan suatu bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam pelaksanaan proses pembelajaran (Nurdyansyah and Mutala'liah, 2015). Selain materi ajar, dalam hal kurikulum pun masih memberikan kesan yang kurang. Hal ini terlihat pada bentuk kurikulum yang tidak konsisten dan tidak berkelanjutan. Di Indonesia sendiri perubahan kurikulum telah terjadi sebanyak kurang lebih 13 kali (Muhammedi, 2016). Apakah perubahan ini memberikan pengaruh yang lebih baik? Nyatanya tidak semua siswa atau anak didik mampu beradaptasi dengan kurikulum baru dengan cepat dan tepat. Ditambahkan pula bergantinya pemerintahan, maka berganti pula kurikulum dengan cepat, sehingga membuat para civitas akademik yang baru saja beradaptasi pada kurikulum yang baru harus beradaptasi ulang secara keseluruhan.

### **Pendekatan dan Metodologi Pembelajaran**

Sistem pendidikan yang ada di Indonesia memang masih berpegang pada Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, Sistem Pendidikan Nasional ini masih beranggapan bahwa ilmu hanya bisa disalurkan melalui orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah dari guru ke murid. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia masih berpegang kepada paradigma yang masih kuno. Pola "menyuapi" murid oleh guru masih diberlakukan. Seharusnya hal tersebut sudah tidak lagi dipraktekkan dan diganti menjadi pola lainnya. Semestinya, salah satu pola yang dapat dipraktekkan adalah guru memotivasi-mendorong-memfasilitasi-menemani murid mencari-bersama menemukan ilmu. Jika ini yang digunakan, maka murid lah yang akan lebih aktif dalam menemukan dan mencari ilmu. Maka dari itu, ungkapan mengenai sekolah boleh usai, namun belajar tidak akan pernah usai adalah hal yang sangat tepat (Ira, 2015).

### **Sumber Daya Manusia**

Seperti yang diketahui, Indonesia masih merupakan negara berkembang. Meski demikian, sumber daya manusia cukup banyak yang bisa dikembangkan. Akan tetapi karena perlakuan bagi para pegawai yang ada di

Indonesia itu menegaskan kepada kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, dan produksi kerja. Sedangkan bagi para pendidik atau pengajar, ditekankan pada asas kejujuran (moral, kedisiplinan dan pengabdian). Selain itu hal lainnya yang juga sangat ditekankan adalah kreativitas, inovasi dan dedikasi. Pendidik diharapkan mampu mengembangkan budaya belajar yang baik pada siswanya.

Meski demikian, kenyataannya kualitas maupun kuantitas guru saat ini masih sangat kurang. Kompetensi-kompetensi mereka dirasakan masih butuh untuk dikembangkan. Pada daerah-daerah terpencil, disinilah masalahnya. Banyak guru yang tidak sesuai dengan bidang ilmu mereka yang ditempatkan disini. Hal ini mengakibatkan banyak tenaga atau pegawai kantor yang “terpaksa” harus mengajar meskipun mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor utama yang menjadi penyebab perubahan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pertama adalah kemiskinan yang masih terdapat di Indonesia, dan kedua adalah sistem pengelolaan sebagai sebagai akibat penanganan sekolah di bawah otoritas kantor birokrasi dan bukan sebagai lembaga akademik (Ira, 2015).

### **Dana**

Dana menjadi salah satu faktor yang menentukan mutu dari penyelenggaraan pendidikan. Seringkali terdengar ujaran bahwa mutu pendidikan nasional yang rendah dikarenakan kurangnya dana. Benar adanya untuk melaksanakan pendidikan tentu dibutuhkan. Jika dana tidak ada, pengelolaan dan manajemen pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Tetapi, dana bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi penyebab berhasilnya penyelenggaraan pendidikan. Faktor lain tersebut diantaranya: sistem, keahlian dan moral penyelenggara (Ira, 2015).

### **Evaluasi Diri dan Akreditasi**

Dalam dunia pendidikan, dikenal istilah evaluasi diri dan akreditasi. Evaluasi diri adalah suatu evaluasi yang dilakukan institusi dengan tujuan untuk mengumpulkan data, analisis data dan interpretasi hasil yang digunakan untuk perencanaan, pengembangan, perbaikan dan/atau peningkatan kinerja lembaga (Soenarto and Sudarsono, 2013). Akreditasi merupakan alat ukur untuk mengetahui mutu pendidikan suatu institusi yang ada di Indonesia. Sistem akreditasi menjadi suatu kewajiban bagi institusi pendidikan di Indonesia. Bagi masyarakat akademisi Indonesia, saat ini akreditasi merupakan suatu hal yang penting. Selain itu, masyarakat awam juga telah mulai memilih institusi pendidikan berdasarkan tingkatan Akreditasinya.

Pemahaman seperti ini menjadikan timbulnya miskonsepsi. Masyarakat hanyalah peduli pada tingkat akreditasi. Hal ini dikarenakan ketika mereka mencari kerja nantinya, akreditasi sangatlah berpengaruh bagi peluang kerja mereka. Selain itu, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan juga menjadi salah satu alasan kuat masyarakat memilih akreditasi institusi. Perpindahan dari sekolah dasar dan menengah atau pendidikan non-formal ke pendidikan tinggi merupakan salah satu investasi personal dan pergeseran status sosial secara signifikan untuk berbagai kalangan (Briggs, Clark and Hall, 2012).

Instrumen akreditasi harus menitikberatkan pada performa satuan/institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Performa tersebut hendaknya fokus kepada pengembangan organisasi/satuan institusi pendidikan, evaluasi terhadap inovasi proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuan/institusi pendidikan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan oleh satuan/institusi pendidikan, serta pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan oleh mereka (Mahdiannur, 2018).

Dalam hal menafsirkan akreditasi, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan pekerjaan belum sepenuhnya dapat dimaknai secara komprehensif sesuai dengan konsep mutu pendidikan. Semestinya, masyarakat menyadari bahwa mutu institusi adalah hal yang lebih penting ketimbang peringkat akreditasi. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih ada kesenjangan antara keinginan dan realita. Dalam aspek-aspek yang lebih besar masih terdapat kesenjangan dalam sistem pendidikan. Faktor-faktor menyebabkan dikarenakan perubahan oleh hal-hal berikut ekonomi, politik, ekonomi, sosial-budaya yang senantiasa berubah dengan perubahan dan perkembangan zaman.

### 3.3 Perubahan Sosial Budaya pada Pendidikan Indonesia

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana. Usaha ini dilakukan dengan upaya untuk menyadarkan diri menjadi manusia yang lebih baik. Upaya penyadaran yang dilakukan oleh institusi pendidikan bukanlah usaha yang untuk memberitahukan bahwa perubahan yang harus

dilakukan oleh peserta didik yang keadaannya “bodoh“ untuk menjadi cerdas. Upaya yang dimaksudkan adalah kesadaran ini mengenai kesadaran akan eksistensi diri mereka. Selain itu, agar peserta didik mampu merefleksikan apa yang terjadi pada dirinya dengan masyarakat, permasalahan dirinya dengan masyarakat, permasalahan masyarakat dengan dirinya dan lebih luas lagi eksistensinya sebagai seorang warga sebuah negara (Mardeli, 2017).

Pendidikan yang saat ini berjalan di Indonesia menjadikan sebuah pernyataan yang berbunyi bahwa sarana pendidikan telah berubah menjadi sarana ekonomi. Pendidikan hanya menjadi suatu batu loncatan untuk mencari pekerjaan. Pendidikan hanya menjadi sandingan, hanya sebagai suatu sarana. Pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk karakter manusia secara keseluruhan, terutama menekankan kepada moral dan nilai-nilai. Meski demikian, perubahan-perubahan yang terjadi turut merubah wajah pendidikan saat ini.

Terjadinya perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat yang memberikan pengaruh kepada sistem sosial. Adapun yang termasuk diantaranya yaitu nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok. Sementara itu perubahan sosial budaya berasal dari dua konsep yang berbeda. Pertama, perubahan sosial dapat terlihat melalui perspektif Sosiologi. Sedangkan perubahan budaya dapat ditelisik melalui sudut pandang Antropologi. Meski demikian, kedua perubahan ini dapat dimaknai sebagai perubahan yang mencakup hampir seluruh aspek. Termasuk diantaranya kehidupan sosial budaya dari suatu masyarakat atau komunitas (Yuristia, 2017).

Kaitan antara perubahan sosial budaya dan pendidikan dapat terlihat melalui adanya perubahan pada struktur dan fungsi pada sistem sosial. Dalam hal ini yang termasuk adalah pendidikan. Alasannya adalah karena pendidikan yang ada dalam masyarakat baik itu pendidikan formal maupun non-formal.

Seperti yang telah diketahui, pendidikan memiliki andil besar dalam kehidupan manusia. Karenanya ada beberapa fungsi pendidikan yang terkait dengan perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat (Syamsidar, 2015), yaitu:

#### 1. Fungsi Pendidikan

Pada fungsi ini, peran pendidikan dapat terlihat sebagai pencetak penemu-penemu baru dengan hasil temuan mereka. Hasil temuan tersebut akan memengaruhi kebudayaan yang ada pada masyarakat.

Hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya suatu perubahan sosial budaya yang terjadi secara menyeluruh. Hal tersebut dapat terlihat melalui penemuan alat-alat elektronik seperti komputer, rice cooker, TV dan lainnya.

2. Fungsi Memindahkan Nilai-Nilai Budaya (Transformasi Kebudayaan)

Pendidikan dapat dijadikan suatu rumusan kegiatan yang terjadi secara direncanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memindahkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai serta kemampuan-kemampuan mental lainnya dari satu generasi ke generasi lainnya. Ini dapat terlihat dari adanya proses interaksi guru dan murid di dalam kelas ataupun pada kelompok-kelompok belajar lainnya.

3. Fungsi Mengembangkan dan Memantapkan Hubungan-hubungan Sosial.

Pada fungsi ini peserta dibentuk untuk mengetahui, memahami dan mengerti kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sosial mereka. Dalam proses ini yang berperan adalah pendidikan nonformal dan tentunya pendidikan formal. Kedua jenis pendidikan ini memberikan pengaruh yang sangat besar secara akademis. Ini adalah hal yang wajar dikarenakan kesempatan pendidikan terbuka lebar untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dijadikan suatu jalan untuk memperbaiki citra masyarakat.

Pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat berharga tidak hanya bagi manusia khususnya namu juga bagi negara umumnya. Hal ini dikarenakan pendidikan menyentuh seluruh kepentingan warga negara, negara dan institusi-institusi yang ada. Melalui hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan erat kaitannya dengan luarannya yaitu berupa tersedianya SDM dengan mutu yang lebih baik. Oleh karenanya, titik terberat suatu pembangunan pendidikan berada pada peningkatan mutu dari setiap jenis dan jenjang, seta keberataan kesempatan bagi setiap lapisan masyarakat untuk belajar dimulai dari pendidikan dasar.



# Bab 4

## Pendidikan dan Gender

### 4.1 Pendahuluan

Sebagian besar orang memahami gender seringkali bias dan salah diartikan sangat sempit. Gender sering diartikan sebagai masalah perempuan dan kodrat ke-perempuannya saja. Padahal gender sangat berbeda dengan jenis kelamin, yang tidak hanya membicarakan perempuan saja atau laki-laki saja, dan bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya (Widaningsih, 2014). Gender merupakan penyetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam berbagai hal, seperti pekerjaan, peran, pendidikan dan lain-lain. Kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat harus tetap disosialisasikan dan diedukasi, agar tidak ada lagi prasangka yang kurang baik tentang gender dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Setiap manusia mempunyai hak yang sama, sejajar dalam setiap sendi kehidupan. (Fibrianto A. S, 2016) mengatakan gender merupakan suatu konsep budaya untuk mengidentifikasi perbedaan (distinction), baik berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam hal karakteristik, emosional, perilaku, mentalitas, kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan dalam masyarakat. Psikologi terkait gender manusia dibentuk oleh sistem perkembangan yang melibatkan banyak pengaruh yang berinteraksi dari waktu ke waktu. Gender bersifat multidimensi dan penyebabnya memiliki banyak aspek. Untuk perkembangan gender pada

manusia, hormon testosteron berkontribusi pada perkembangan perilaku peran gender, terutama pada jenis gender, orientasi seksual dan identitas gender (Hines, 2020). Gender merupakan perbedaan peran, atribut, perilaku, sifat maupun sikap yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender dapat dibagi menjadi peran reproduksi, produktif dan sosial kemasyarakatan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Gender dikonstruksi dalam konteks kelembagaan dan budaya yang menghasilkan berbagai bentuk maskulinitas, akan tetapi pendidikan merupakan tempat dalam pembentukan identitas gender (Connell, 1996). Gender adalah jalan yang membuat seseorang menjadi maskulin atau feminin, yang merupakan interpretasi biologis oleh budaya, kombinasi bangunan biologis dasar dan merupakan sebuah informasi yang menyampaikan kepada orang lain bahwa orang yang dimaksud adalah maskulin atau feminin (Mosse, 1996).

Gender dapat didefinisikan sebagai aspek hubungan sosial yang berkaitan dengan diferensiasi seksual pada manusia (Demartoto, 2007). Tipe atau jenis merupakan arti kata dari gender yang berasal dari bahasa Spanyol, yaitu genus. Gender merupakan perilaku dan sifat manusia, baik yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki yang dibentuk oleh kultur maupun kehidupan sosial, akan tetapi tidak berlaku untuk selamanya tergantung pada ruang dan waktu. Wawasan sebagian masyarakat tentang arti gender saat ini belum sepenuhnya benar, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa gender itu adalah perempuan atau jenis kelamin (Dinas Sosial, 2018). Istilah gender merupakan hasil interpretasi sosial yang dibuat oleh manusia, yang bersifat dapat berubah, ditukar dan dialihkan berdasarkan tempat, waktu dan kultur masyarakat dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin yang lain. Gender juga merupakan karakteristik atau ciri perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh keluarga maupun masyarakat yang dipengaruhi oleh kultur dan interpretasi keyakinan (Purba, 2010).

Keadilan gender adalah sebuah proses maupun perlakuan secara adil kepada kaum perempuan dan laki-laki. Menurut (International Labour Organization, 2012), keadilan gender merupakan perlakuan secara adil kepada perempuan dan laki-laki yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dalam mendapatkan hak, kewajiban, laba dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi marginalisasi, subordinasi, beban ganda, perbedaan peran dan kekerasan terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki.

Gender adalah salah satu label yang digunakan oleh seseorang dan didefinisikan sendiri sebagai sebuah hal yang sangat penting untuk membuat konsep terhadap diri mereka sendiri dan memproses dunia disekitar mereka (Neale, Robbie and Martin, 2016). Rangsangan gender bahkan telah mengungguli dimensi kepribadian lain dalam memunculkan niat tujuan perjalanan dan loyalitas individu (Pan and Gursoy, 2020). Masih banyak orang yang menyamakan antara gender dengan jenis kelamin tertentu. Namun demikian, kedua istilah ini memiliki makna dan definisi yang tidak sama. Perbedaan antara jenis kelamin dengan gender dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1:** Perbedaan antara gender dengan jenis kelamin (Purba, 2010)

No	Gender	Jenis Kelamin
1.	Terdapat perbedaan fungsi, tanggungjawab dan peran perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil persetujuan masyarakat	Ada ketidaksamaan organ biologis pada perempuan dan laki-laki, terutama pada bagian alat reproduksi.
2	Tugas sosial bisa saja berubah, seperti istri yang merupakan ibu rumah tangga bisa membantu suami untuk mencari nafkah sekaligus menjalankan peran sebagai istri.	Terdapat alat reproduksi yang tidak bisa berubah, seperti laki-laki yang tidak bisa mempunyai rahim.
3	Fungsi sosial bisa ditukar pada saat tertentu, seperti suami yang belum mempunyai penghasilan, yang menyebankan suami yang tinggal di rumah untuk memasak dan mencuci, sementara istri yang bekerja untuk mencari nafkah.	Peran reproduksi tidak bisa ditukar, karena laki-laki tidak dapat melahirkan dan hamil serta perempuan tidak dapat membuahi.
4	Fungsi sosial terbatas, tergantung pada waktu dan kondisi	Fungsi alat reproduksi kesehatan berlaku seumur hidup
5	Fungsi sosial tergantung pada kultur masyarakat tertentu.	Fungsi alat reproduksi kesehatan berlaku di manapun.
6	Fungsi sosial tidak sama antara strata sosial yang satu dengan strata yang lain.	Fungsi reproduksi kesehatan berlaku untuk seluruh strata sosial.

7	Fungsi sosial merupakan hasil konstruksi manusia bukan kodrat Tuhan.	Fungsi reproduksi merupakan pemberian/kodrat Tuhan.
---	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Dari Tabel 4.1 terlihat jelas perbedaan antara gender dengan jenis kelamin. Gender merupakan sifat wanita dan pria, seperti peran, norma maupun interaksi antara laki-laki dan perempuan yang didesain secara sosial. Gender bisa tidak sama antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain dan bisa mengalami perubahan sesuai waktu maupun budaya masyarakat. Sedangkan jenis kelamin tidak dapat ditukar berdasarkan peran reproduksi masing-masing, laki-laki mempunyai alat kelamin tersendiri begitupun dengan wanita. Sementara gender dapat berubah, seperti pria ada yang bersifat feminim dan wanita ada yang bersifat maskulin. Namun disarankan agar tetap saling menghormati antar sesama manusia yang mungkin ekspresi gendernya tidak sama dengan jenis kelamin yang dimiliki oleh masing-masing individu.

## 4.2 Gender dalam Pendidikan

Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan harus dipahami sebagai hak atas pendidikan (akses dan partisipasi), tetapi juga sebagai hak dalam sistem pendidikan (lingkungan, proses dan hasil pendidikan dengan kesadaran gender) dan hak melalui pendidikan (hasil pendidikan yang signifikan yang menghubungkan kesetaraan pendidikan dengan proses keadilan gender yang lebih luas). Oleh karena itu, pusat pendidikan harus mengintegrasikan prinsip kesetaraan, meningkatkan partisipasi perempuan, dan mendorong proyek untuk promosi dan penyebaran prinsip kesetaraan (Gonzales, Liminana and Gonzales, 2020). Kesetaraan gender tidak saja vital dari segi keadilan dan moralitas, namun juga sangat terkait dari segi ekonomi. Kesetaraan gender merupakan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, partisipasi serta ekonomi politik (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Terdapat dua jenis tujuan yang terkait dengan kesetaraan gender dalam pendidikan, yaitu tujuan yang berorientasi pada kesetaraan gender (partisipasi setara anak perempuan dan laki-laki dalam semua bentuk pendidikan sesuai dengan rasio mereka dalam kelompok usia yang relevan dalam populasi) dan tujuan kesetaraan gender (untuk menjamin hak untuk memperoleh pendidikan

baik anak perempuan maupun laki-laki). Ukuran kesetaraan gender adalah tindakan yang mengakui bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan pendidikan diperlukan untuk memperbaiki ketidaksetaraan sebelumnya yang membatasi akses perempuan dengan kesetaraan laki-laki dalam pemanfaatan sumber daya. Meskipun secara bertahap, pendidikan membawa perubahan dalam kualitas hidup laki-laki dan perempuan, fokus yang kurang ditempatkan pada bagaimana perubahan ini bermanfaat bagi perempuan secara langsung (Subrahmanian, 2005).

Kesetaraan gender dalam pencapaian pendidikan bukan saja merupakan hak asasi manusia, namun juga merupakan landasan yang diperlukan untuk mendapatkan kedamaian, kesejahteraan yang berkelanjutan. Kesenjangan gender dalam pendidikan banyak terjadi di negara berkembang. Pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat, karena dengan pendidikan masyarakat dapat mencari dan menciptakan lapangan kerja, memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan kekayaan (Dong, Bai and et all, 2020).

Menurut Zaki (2020), ada enam bentuk kesetaraan gender untuk kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yaitu:

1. Kedudukan ditengah masyarakat sama seperti kaum laki-laki. Perempuan mempunyai posisi yang penting ditengah masyarakat untuk mengambil keputusan, demi mendapatkan keadilan untuk laki-laki maupun perempuan
2. Berhak mendapatkan kesempatan melalui pendidikan formal yang tinggi. Sejak dulu sebelum abad 18, kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk bersekolah, apalagi sampai ke tingkat universitas. Kaum perempuan dianjurkan agar cepat menikah, meskipun masih berumur masih muda serta belum mempunyai kesiapan mental dan fisik. Kenyataan seperti ini masih dapat dilihat pada masyarakat di wilayah pedesaan. Namun pada masa sekarang, perempuan memiliki akses yang sama seperti kaum laki-laki untuk bersekolah setinggi mungkin, asalkan mereka mampu, baik dari segi biaya maupun kecerdasan intelektual. Sekarang sudah banyak kaum perempuan yang menempuh pendidikan sampai jenjang S-2 dan S-3.

3. Tidak boleh diperlakukan semena mena. Wanita sering kali menjadi objek kekerasan oleh kaum pria. Hal ini sering terjadi baik pada hubungan pacaran maupun dalam kehidupan rumah tangga, bahkan sering terjadi kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual sering dilakukan terhadap kaum perempuan. Hal ini melanggar hak seseorang untuk diperlakukan baik oleh sesama manusia. Wanita dan pria mempunyai kesetaraan dan keadilan yang sama, tidak diperlakukan kasar yang akan mewujudkan kesetaraan seksual maupun gender.
4. Berhak mendapatkan pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan, kaum perempuan terkadang masih sering diperlakukan diskriminatif, seperti jam kerja dan beban kerja yang berlebihan serta pendapatan yang masih kurang. Begitupun pada saat pendaftaran pekerjaan, kaum perempuan terkadang diberikan syarat-syarat tertentu, seperti harus terlihat cantik, menarik, memiliki postur yang tinggi, serta warna kulit tertentu. Untuk mendapatkan kesetaraan gender pada dunia kerja, seorang pemimpin harus memahami kondisi fisik bawahannya, terutama kaum perempuan yang sedang hamil, perlu diberikan toleransi cuti atau jam kerja beberapa hari sampai kondisinya memungkinkan untuk bekerja lagi. Jangan menjadi alasan, apabila perempuan diberi waktu cuti akan mengurangi produktivitas pekerjaan.
5. Berhak memperoleh ruang untuk berpolitik praktis. Dahulu kala, kaum perempuan kurang diperhatikan dalam dunia politik. Namun masa sekarang, kaum perempuan sudah diperhitungkan, bahkan kuota anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kaum perempuan minimal 30 persen. Kaum perempuan juga kini sudah bisa menjabat di bidang pemerintahan, organisasi, birokrasi dan pemimpin negara. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat semakin sadar akan kesetaraan gender.
6. Berhak mempunyai kepemilikan. Kaum perempuan berhak atas kepemilikan dan akses untuk kepemilikan bangunan, properti, tanah, saham, perusahaan, akses ke pinjaman bank dan kredit.

## 4.3 Peran Gender Dalam Pembangunan

Gender merupakan salah satu tema dalam hal pembangunan, terutama pembangunan sumberdaya manusia. Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kualitas hidup kaum perempuan melalui pelatihan kelembagaan pengarusutamaan gender, akan tetapi kenyataannya masih banyak disparitas, baik laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan peran, manfaat, partisipasi serta pengelolaan akan sumber daya, terutama pada sektor pertanian, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan serta sektor strategis yang lain. Gaya et al., (2017) mengatakan mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara norma gender, kemampuan dan kemauan perempuan untuk membuktikan kemampuan mereka dalam penggunaan teknologi pertanian, merupakan langkah penting untuk merancang, meningkatkan kapasitas dan berinovasi dalam melakukan penelitian pertanian untuk meningkatkan pembangunan. Farnworth et al., (2020), mengatakan akan tetapi konsep ketidaksetaraan gender akan selalu merugikan perempuan, ini merupakan hal yang serius untuk diperhatikan dalam wacana pembangunan.

Kaum perempuan dan laki-laki selalu dibedakan dalam prioritas pelaksanaan pembangunan yang bisa dipengaruhi dan memengaruhi pengambilan keputusan pada proyek-proyek pembangunan. Untuk meningkatkan efektivitas, pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu diperhatikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak diperhatikan dengan serius, maka tindakan tersebut tidak hanya menghasilkan inefisiensi, tetapi juga dapat menimbulkan keadaan munculnya ketidaksetaraan dalam bermasyarakat (Anonim, 2014).

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan, karena memiliki makna yang penting secara global dan nasional. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan mencapai kesetaraan gender

dan pemberdayaan perempuan secara keseluruhan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

Untuk mendapatkan peran perempuan dan kesetaraan gender melalui pembangunan, banyak tantangan yang harus dihadapi, karena banyak anggapan masyarakat bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang kastanya lebih rendah dibanding dengan kaum laki-laki dalam berbagai hal. Faktor orang tua dan sosial budaya masyarakat yang selalu menganggap bahwa anak perempuan hanya untuk mengurus rumah tangga saja, seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mengarusutamakan gender dan melibatkan peran perempuan dalam proses pembangunan. Analisis gender tidak hanya melihat perbedaan kegiatan dan peran perempuan maupun laki-laki, namun juga melihat relasi mereka. Dari relasi ini akan nampak status laki-laki dan perempuan. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia untuk pembangunan sosial yang dilaksanakan di Denmark pada tahun 1995 membahas kesetaraan gender sebagai suatu cara untuk membangun ekonomi, sosial dan lingkungan (Probosiwi, 2015).

Pandangan mendasar masyarakat secara umum yang menganggap perempuan hanya bertugas untuk mengurus keluarga, menimbulkan pendapat bahwa perempuan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi untuk mengembangkan potensi dirinya di luar pekerjaan rumah tangga (Taufiq and Listani, 2017). Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sebagai subyek pembangunan, termasuk didalamnya adalah keadilan yang berspektif gender. Mosse (1996) mengatakan salah satu strategi dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama seperti kaum laki-laki terhadap pelaksanaan pembangunan melalui regulasi kebijakan. Adanya pembagian kerja berdasarkan gender harus dipahami oleh para perencana pembangunan berdasarkan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Di Indonesia, peraturan tentang perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, yang menetapkan gender sebagai salah satu dari 4 prinsip pengarusutamaan yang akan dilaksanakan oleh keseluruhan kegiatan pembangunan. Hal yang relevan dengan isu gender dalam pembangunan adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial,

ekonomi, hukum, politik, dan lainnya. Usaha yang dilakukan adalah strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan yang memberikan kepastian bahwa gender telah teridentifikasi dan tertangani dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan sampai evaluasi kegiatan pembangunan (Kementerian PPN, 2007).

Perempuan dapat berperan sebagai aktor penting dalam kegiatan pembangunan, bukan saja pembangunan di wilayah pedesaan, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat merubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Kaum perempuan mulai muncul dan berhasil membuktikan diri bahwa keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kaum perempuan ternyata memiliki kecerdasan dan kepiawaian untuk turut berkontribusi terhadap pembangunan. Kaum perempuan merupakan aset, investasi dan potensi yang memegang peran penting yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kaum perempuan yang bisa menjadi pemimpin, baik di tingkat desa (Kepala Desa), kabupaten (Bupati) maupun provinsi (Gubernur) di Indonesia.



# Bab 5

## Pendidikan dan Ekonomi

### 5.1 Pendahuluan

Sesungguhnya adanya masalah pendidikan tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumbangan atau kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui. Hal ini berarti, tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan. Kini tiba saatnya, pendidikan harus dipandang sebagai investasi, yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Lebih lanjut telah disepakati bahwa konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (education as investment) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Selanjutnya konsep tentang investasi sumber daya manusia (human capital investment) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (economic growth), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak jaman Adam Smith (1776) dan Heinrich Von Thunen (1875) dan para teoritis klasik lainnya sebelum abad ke 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia (Becker, 1993; Handitya, 2018; Ghulam, 2019; Purba and Situmorang, 2019; Ferinia et al., 2020; Mawati et al., 2020; Pakpahan et al., 2020; Siagian et al., 2020; Sudarmanto et al., 2020; Sudarso et al., 2020).

Konsep tentang pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul “Investment in human capital” di hadapan The American Economic Association merupakan letak dasar teori human capital modern. Yang merupakan tema utama dari pidato tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Lebih lanjut Schultz (1960) memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dalam pendidikan (Schultz, 1992; Becker, 1993; Oktarina, 2007; B. Purba et al., 2019; Bonaraja Purba et al., 2019; Purba, 2020a; Purba, Sudarmanto, et al., 2020; Revida et al., 2020).

Adapun yang merupakan alasan utama dari perubahan paradigma dan stigma ini adalah adanya pertumbuhan minat dan keinginan selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman mengenalkan suatu konsep “revolusi investasi manusia di dalam pemikiran ekonomis”. Para peneliti lainnya seperti Becker (1993) dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori human capital ini (Becker, 1993; Handitya, 2018; Hasan, 2018).

Selanjutnya sebagai akibat perkembangan tersebut telah memengaruhi stigma dan pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investment) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahan terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitmen terhadap anggaran pada sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi dalam format intervensi ekonomi (dukungan anggaran) dimaksud dalam pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya termasuk pembangunan ekonomi itu sendiri. Bagaimana pendidikan menjadi sebuah leading sector dalam perkembangan perekonomian dan modernisasi suatu bangsa.

Oleh sebab itu diperlukan suatu langkah yang pasti dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan negara ini menjadi negara yang disegani oleh negara lain (Becker and Woessmann, 2009; Gillies, 2017; Julyanthry et al., 2020; Parinduri et al., 2020; Purba, Nainggolan, et al., 2020). Bab ini akan menguraikan dan membahas tentang dimensi-dimensi korelativitas-sinergitas antara pendidikan dan ekonomi. Dengan harapan terbangun sebuah pemikiran substantif yang utuh tentang peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi itu sendiri.

## 5.2 Peran Pendidikan Terhadap Ekonomi

### 5.2.1 Pendidikan sebagai Investasi

Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan di segala sektor. Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran untuk sektor pendidikan. Mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat. Hal ini mengakibatkan alokasi anggaran sektor pendidikan pun biasanya sisa setelah program pembangunan yang lain terlebih dahulu. Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sector (Hasan, 2018; Parinduri et al., 2020; Purba, 2020b; Sari et al., 2020; Siagian et al., 2020).

Sejak periode tahun 1970-an, penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sempat mengalami stagnansi dan ambivalensi karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada

waktu itu. Kesangsian ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Gary Becker mengatakan bahwa teori human capital ini lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio-budaya (Becker, 2009; Gillies, 2017).

Kritik Becker ini justru membuka perspektif dari keyakinan filosofis bahwa pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis semata, tetapi lebih dari itu pendidikan harus dilihat dalam perspektif dan dimensi sosial serta budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan. Perspektif dan dimensi ini merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (human dignity) (Widiansyah, 2017).

Ada sejumlah besar penelitian neoklasik lain, telah dapat meyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik dalam menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung dan seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Berdasarkan keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya di berbagai negara. Sumbangan atau dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya. Hal ini bermakna, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut. Saat ini telah diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri (Becker and Woessmann, 2009; Handitya, 2018; Leuwol et al., 2020).

## 5.2.2 Investasi dalam Pendidikan

Investasi berarti penanaman modal atau uang. Modal atau uang yang ditanamkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa uang atau modal maupun dalam bentuk barang atau jasa. Kenneth J. Arrow (1962) mengemukakan bahwa istilah investasi atau investment merupakan alokasi current resources yang mempunyai alternatif produktif yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat menambah keuntungan yang diperoleh

dimasa yang akan datang. Biaya atau cost suatu investasi merupakan keuntungan yang diperoleh dibagi dengan penggunaan sumber daya dalam berbagai kegiatan lain. Dengan demikian jelas bahwa investasi merupakan penanaman modal atau uang yang sengaja dilakukan untuk mendatangkan keuntungan melalui produk yang dihasilkan (Becker, 1993; Utama, 2009; Slamet, 2011).

Sementara itu pendidikan merupakan usaha manusia untuk membangun manusia itu sendiri dengan segala masalah dan spektrumnya yang terlepas dari dimensi waktu dan ruang. Hal ini berarti bahwa inti pendidikan itu adalah pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*), sementara bentuk pendidikan formal, pendidikan non formal (luar sekolah) dan sebagainya hanya merupakan modus operandi dari proses pendidikan. Pendidikan disini dimaksud untuk meningkatkan martabat manusia agar mempunyai keterampilan dan kemampuan sehingga produktivitasnya meningkat. Oleh sebab itu maka hasil pendidikan akan menjadi sumber daya manusia yang sangat berguna dalam pembangunan suatu negara (Oktarina, 2007).

Investasi dalam pendidikan merupakan penanaman modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan itu. Dalam konteks ini pendidikan ini dipandang sebagai industri pembelajaran manusia, artinya melalui pendidikan dihasilkan manusia-manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sangat diperlukan bagi perekonomian suatu negara untuk meningkatkan pendapatan individu dan pendapatan nasional (Mankiw, Romer and Weil, 1992; Becker, 2009).

Dengan demikian maka investasi dalam pendidikan mempunyai jangka waktu yang panjang untuk dapat mengetahui hasilnya dan hasilnya itupun tidak dalam bentuk keuntungan langsung, melainkan keuntungan bagi pribadi yang menerima pendidikan dan bagi negara.

Sebagai fungsi investasi, pendidikan memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia dan pendapatan nasional, terutama dalam hal-hal berikut:

1. Proses belajar mengajar menjamin masyarakat yang terbuka (yaitu masyarakat yang senantiasa bersedia untuk mempertimbangkan gagasan- gagasan dan harapan-harapan baru serta menerima sikap dan proses baru tanpa harus mengorbankan dirinya).

2. Sistem pendidikan menyiapkan landasan yang tepat bagi pembangunan dan hasil-hasil rises (jaminan melekat untuk pertumbuhan masyarakat modern yang berkesinambungan). Investasi pendidikan dapat mempertahankan keutuhan dan secara konstan menambah persediaan pengetahuan dan penemuan metode serta teknik baru yang berkelanjutan.
3. Apabila dalam setiap sektor ekonomi kita dapatkan segala faktor yang dibutuhkan masyarakat kecuali tenaga kerja yang terampil, maka investasi dalam sektor pendidikan akan menaikkan pendapatan perkapita dalam sektor tersebut, kecuali bila struktur sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut tidak menguntungkan (Lucas Jr, 1990; Arifin, 2013).

Sistem pendidikan menciptakan dan mempertahankan penawaran keterampilan manusia di pasar tenaga kerja yang luwes. Selain itu juga mampu mengakomodasi dan beradaptasi dalam hubungannya dengan perubahan kebutuhan akan tenaga kerja dan masyarakat teknologi modern yang sedang berubah (Komaruddin, 1991). Investasi dalam pendidikan memusatkan perhatian pada manusia sebagai sumber daya yang akan menjadi modal (human capital) bagai capital (Gary S. Backer, 1962) yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang memengaruhi real income masa yang akan datang melalui penempatan sumber daya dalam bentuk manusia.

*Human capital* di sini merujuk pada tenaga kerja sebagai suatu faktor produksi yang menghubungkan aspek non-ekonomi pendidikan terhadap aspek ekonomi lainnya yang mempunyai dua ciri esensial, yaitu:

1. Kualitas tenaga kerja sebagai suatu input produktif tidak dapat dibagi dan digunakan secara terpisah.
2. Kemampuan tenaga kerja tersebut tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (Becker, 2002; Ghulam, 2019).

Dalam kaitan ini, Ace Suryadi (1991) mengungkapkan bahwa menurut teori human capital yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan dan produktivitas kerjanya. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa ada model investasi dalam bentuk sumber daya manusia yang secara langsung atau tidak melakukan hubungan antara indikator pendidikan di satu pihak dan indikator

ekonomi di lain pihak. Model yang dimaksudkan adalah model analisis biaya dan keuntungan pendidikan (*cost benefit analysis*). Model ini merupakan metodologi yang sangat penting dalam melakukan analisis untuk investasi pendidikan dan dapat membantu pengambilan keputusan untuk memutuskan dan memilih diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas agar mampu memberikan kemampuan yang paling tinggi (Widiansyah, 2017).

## 5.3 Peran dan Fungsi Ekonomi Dalam Pendidikan

Peran ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan tetapi bukan sebagai pemegang peranan penting. Sebab ada hal lain yang lebih menentukan hidup atau matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian dan keterampilan pengelola guru-gurunya. Hal inilah yang merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi. Hal ini bermakna bahwa jika pengelola dan guru-guru atau dosen-dosen memiliki dedikasi yang memadai, ahli dalam bidangnya dan memiliki keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, memberi kemungkinan lembaga pendidikan akan sukses melaksanakan misinya walaupun dengan ekonomi yang tidak memadai. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga mendapatkan keuntungan yang berlimpah (Becker, 2009; Arifin, 2013; Bonaraja Purba et al., 2019).

Di sini peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja dan bisa hidup hemat. Selain sebagai penunjang proses pendidikan ekonomi pendidikan juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian peranan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada hal-hal:

1. Pemenuhan keperluan pendidikan yang tak dapat dibuat sendiri seperti prasarana dan sarana, media, alat peraga dan sebagainya.

2. Membiayai semua perlengkapan gedung, seperti air, listrik, telpon.
3. Membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan.
4. Mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi, seperti; belajar hidup hemat.
5. Memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan.
6. Meningkatkan motivasi kerja.
7. Meningkatkan gairah kerja para personalia pendidikan (Lucas Jr, 1990; Jaenudin, 2014; Widiansyah, 2017).

Merujuk pendapat Kotler dan Mantrala (1985) peran ekonomi ekonomi dalam pendidikan bertalian erat dengan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang memberikan perubahan nilai-nilai yang dihasilkan dari sebuah proses pendidikan. Lebih lanjut menurut Mutrofin (2017), menyatakan bahwa negara-negara maju memiliki komitmen yang jelas dalam membangun sektor pendidikan. Komitmen tersebut diimplementasikan dengan dukungan ekonomi yang sangat jelas pula. Di mana sistem ekonomi diorientasikan kepada kebutuhan pendidikan yang didasari pada pemenuhan kebutuhan masyarakat modern yang meliputi: teknologi tinggi, fleksibilitas dan mobilitas angkatan kerja. Berdasarkan konteks dan perspektif Indonesia, pembangunan pendidikan mendapat tempat strategis, dengan munculnya Link and Match, kebijakan ini mengharapkan dunia pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan pasaran kerja, mencakup mutu, dan jumlah serta jenisnya dengan dukungan ekonomi yang memadai.

Vizey (1996) dalam Ghulam (2019) menyatakan ukuran yang paling populer dalam melihat peranan ekonomi dalam pendidikan adalah mempertautkan antara ekonomi dan pendidikan itu sendiri. Pemikiran Vizey ini didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan merupakan human capital. Pemikiran ini muncul pada era industrialisasi dalam masyarakat modern.

Argumen ini memiliki dua aspek, yaitu:

1. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi modern.
2. Pendidikan diharapkan menghasilkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan nyata.

Ternyata bahwa peran ekonomi dalam pendidikan berguna untuk menunjang kelancaran proses pendidikan, dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan hidup efisien (Arifin, 2013).

Selanjutnya bahwa pengembangan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas (rate of return) Arifin, 2013; Purba, Revida, et al., 2020; Purba, 2019; Simarmata et al., 2020; Siagian et al., 2020).

Berbagai penelitian lainnya relatif selalu menunjukkan bahwa nilai balikan modal manusia lebih besar daripada modal fisik. Tidak ada negara di dunia yang mengalami kemajuan pesat dengan dukungan SDM yang rendah pendidikannya. Jadi kalau kita mengharapkan kemajuan pembangunan, maka modal manusia (sektor pendidikan) harus dijadikan sebagai prasyarat utama. Permasalahan tersebut di atas merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Peranan pendidikan bila dikaji secara ekonomi, maka akan memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akan dialami negara Indonesia dalam jangka panjang ke depan dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara (Widiansyah, 2017; Purba, Gaspersz, et al., 2020).

Peranan ekonomi dalam mendukung pendidikan yang dalam bahasa teknisnya adalah modal manusia (human capital), memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikemukakan oleh Lucas (1990), Mankiw, Romer dan Weil (1992) dalam Ghulam (2019) yang merevisi teori pertumbuhan neoklasik dari Solow (1956) yang legendaris itu. Dalam studi-studinya, mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antar negara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan (Widiansyah, 2017).

Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat

produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Di sisi lain kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil. Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu bisa menjadi generalisasi. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok termiskin (Oktarina, 2007; Handitya, 2018; Hasan, 2018).

# Bab 6

## Pendidikan dan Mobilitas Sosial

### 6.1 Pendahuluan

Di negara maju maupun negara berkembang, pendidikan telah dipandang sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan memperoleh kedudukan di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini tidak hanya membawa pengaruh pada pendapatan, tetapi juga status sosial. Melalui pendidikan dipercayai sebagai peluang untuk berpindah golongan sosial yang lebih tinggi. Masyarakat golongan bawah yang memberikan anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan tinggi lebih cenderung beralih golongan sosial lebih tinggi dibanding mereka yang berpendidikan rendah (Assyari, 2018; Wulandari, 2019). Dengan demikian dengan adanya pendidikan yang diperoleh seseorang dapat mempunyai pekerjaan mampan, dianggap terhormat oleh lingkungan masyarakat, dipandang mampu memegang peran demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagian besar masyarakat sekarang lebih mengutamakan pendidikan untuk mengubah status ekonomi dan sosialnya.

Pendidikan sebagai jalan bagi mobilitas sosial. (Soekanto, 2003) mengungkapkan bahwa mobilitas sosial merupakan pergerakan di dalam struktur sosial. Mobilitas juga merupakan salah satu parameter terhadap masyarakat apakah menghadapi kemajuan ataupun tidak. Sebab, tanpa adanya mobilitas sosial masyarakat tidak dapat menggapai kesejahteraan.

Para tokoh ilmunan yang berpengaruh di bidang pendidikan meyakini bakal dampak dan pengaruh pendidikan untuk mengganti dan memperbaiki nasib seseorang. Dengan pemerataan pendidikan pada masyarakat diharapkan dapat menghapus garis rentang golongan-golongan sosial. Serta adanya kesempatan

mendapatkan pendidikan yang sama membuka jalur bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Kewajiban belajar memberikan pengetahuan dan keterampilan serta keahlian yang sama bagi seluruh individu dari semua golongan sosial. Walaupun perbandingan golongan sosial akan dikurangi, hal ini tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Meskipun pada realitasnya harapan tersebut tidak mudah diwujudkan (Syaripudin, 2010).

## 6.2 Memahami Mobilitas Sosial dan Pendidikan

Pendidikan adalah setiap usaha untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memperluas ilmu pengetahuannya yang diperoleh dari lembaga formal maupun informal. Langeveld dalam (Purwanto and Sulistyastuti, 2007) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan upaya, pengaruh, perlindungan, dan bantuan dengan tujuan menanam pendewasaan pada individu agar lebih mumpuni menjalankan kehidupannya sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran, namun pada realitasnya pendidikan merupakan proses dan usaha untuk membina dan mengembangkan kesadaran diri dalam individu.

Pelaksanaan pendidikan memiliki tujuan yang akan dicapai, maka sangat diperlukan perumusan tujuan pendidikan yang sesuai. Dengan adanya tujuan pendidikan akan menentukan ketercapaian dalam proses pembentukan pribadi individu yang bermutu, dengan tanpa menepikan peranan aspek-aspek lain dalam pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan sangat penting yang mengangkat moral sebagai konsep dalam setiap peradaban bangsa (Aziizu, 2015).

Mortimer memaparkan tujuan pendidikan sebagai berikut :

1. Memberikan peluang untuk perkembangan pribadi dan meningkatkan diri, semuanya segi mental, moral serta spritual.
2. Memberikan pengembangan peranan individu sebagai warga Negara.
3. Mengarahkan agar mampu mempunyai penghidupan serta kehidupan yang memadai dikarenakan memiliki jabatan ataupun pekerjaan tertentu (Barnadib, 1987).

Melalui pendidikan, mengajarkan pola tingkah laku manusia sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan. Begitu juga sebagai upaya untuk memanusiakan manusia agar menjadi individu yang optimal dalam mengembangkan potensinya dan dapat menyesuaikan diri dalam konteks sosial. Hal tersebut mengarah pada stratifikasi dan mobilitas sosial masyarakat (Nasution, 1999).

Mobilitas sosial merupakan gerakan komunitas dalam aktivitas yang mengarah pada perubahan yang baik. Mobilitas sosial bisa juga diartikan sebagai gerakan dalam struktur sosial (pergerakan antara individu dan masyarakat) (Gunawan, 2000). Mobilitas sosial merupakan suatu gerakan untuk bergeser dari satu kelas sosial ke kelas lain (Horton and Hunt, 2004). Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai peningkatan atau penurunan istilah status sosial, termasuk aspek pendapatan yang diperoleh dan dialami oleh beberapa individu atau kelompok (Soekanto, 2003).

Pitirim Sorokin menyatakan bahwa status sosial seseorang dapat diukur dari: jabatan, pendidikan serta luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, politis, generasi dan agama (Lubis, 2017). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penentu terhadap mobilitas sosial.

## 6.3 Hubungan Pendidikan Dan Mobilitas Sosial

### 6.3.1 Peran Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial

Pendidikan membuat individu memiliki pola pikir yang maju dan terpelajar dapat mengenali perkembangan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian hal ini membawa dampak positif bagi kepentingan masyarakat terutama memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakat. Pendidikan membuka kesempatan seseorang meraih kedudukan yang lebih baik di masyarakat juga secara merata memberikan kesamaan dasar pendidikan yang mengurukan perbandingan status dan golongan.

Perkembangan pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan membawa perubahan di dalam masyarakat sebagai kepentingan yang beragam. Dalam hal ini fungsi pendidikan tidak hanya usaha sadar yang berkesinambungan, namun sudah merupakan suatu alat untuk mengaplikasikan perubahan dalam

masyarakat tentang penjelasan realitas sosial, analisa sosial serta bagaimana mobilitas sosial.

Adapun fungsi pendidikan yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan, diantaranya adalah (Idi, 2011):

1. Mempersiapkan individu untuk suatu pekerjaan tertentu
2. Memberikan keterampilan serta keahlian dasar
3. Membuka peluang untuk mengubah nasib
4. Menyediakan tenaga kerja yang terampil dan ahli dalam sektor pembangunan
5. Membantu memecahkan permasalahan sosial di dalam masyarakat
6. Mentransmisi kebudayaan
7. Membentuk individu yang sosial dan dapat menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang berbeda-beda
8. Merupakan alat transformasi kebudayaan

Menurut (Sari, Mudana and Wirawan, 2020) dalam penelitiannya ditemukan -faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial, yaitu : prestasi kerja, pendidikan, kesempatan, latar belakang keluarga, dan modal sosial.

Narwoko and Suyanto mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial, adalah (Narwoko and Suyanto, 2004) :

1. Faktor Struktural, merupakan kesempatan seseorang dalam menempati kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Faktor ini meliputi struktur pekerjaan dan perbedaan tingkat kelahiran.
2. Faktor Individu, merupakan kualitas yang ada pada individu. Adapun kualitas tersebut dapat dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan pendidikan formal maupun informal serta keinginan untuk maju maupun menyesuaikan diri dengan lingkungannya
3. Status Sosial, yaitu status sosial yang dimiliki individu dari orangtuanya. Hal ini dapat menjadi penggerak untuk berusaha memperoleh status sosial yang lebih baik dari sebelumnya.

4. Faktor keadaan ekonomi, yaitu keadaan ekonomi yang menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Jika keadaan ekonomi dalam masyarakat cenderung menguntungkan, kesempatan dalam merubah status sosial lebih mudah melalui modal usaha dan juga tingkat pendidikan. Namun apabila kondisi ekonomi kurang baik, masyarakat akan berusaha memperoleh peluang untuk mendapaykani ekonomi yang lebih baik.
5. Faktor situasi politik, yaitu situasi politik atau negara. Situasi ini berakibat pada kondisi keamanan suatu tempat. Di Indonesia memiliki situasi keamanan yang cukup stabil sehingga tetap berjalannya roda pembangunan.
6. Faktor kependudukan, merupakan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk di Indonesia terus bertambah dan mengalami kepadatan penduduk sehingga berdampak pada pemukiman yang sempit, kurangnya kesempatan kerja, kemiskinan. Hal ini mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke daerah lain.
7. Faktor keinginan melihat daerah lain, yaitu keinginan orang untuk mengunjungi daerah tertentu dengan tujuan tertentu.

Untuk mencapai kemajuan dalam masyarakat tidak terlepas dari pentingnya perubahan kualitas individu tersebut. Dengan begitu diharapkan peranan pendidikan terhadap peningkatan kualitas individu. Dimana pelaksanaan pendidikan menghasilkan para ahli profesional sesuai bidangnya, yang nantinya dapat bekerja dan memberikan kontribusi dalam masyarakat.

### 6.3.2 Pendidikan Saluran Mobilitas Sosial

Pendidikan memiliki peranan penting untuk memperoleh perubahan dalam mobilitas sosial. Dari beberapa macam jenis pendidikan yang ada, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, serta pendidikan nonformal. Hanya pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dapat diandalkan dalam memberi peluang perubahan status sosial. Di dunia pekerjaan dan industri lebih mengutamakan pekerja dengan kepemilikan ijazah untuk naik status dan naik pangkat. Orang yang berpendidikan lebih tinggi maka akan tinggi pula derajat kelas sosialnya dalam masyarakat dan ini terfokus pada jenjang hasil keluaran pendidikan formal (Karsidi, 2005). Semakin tinggi jenjang pendidikan

seseorang maka akan semakin dihormati serta akan mendapat status sosial di lingkungan masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman bagi kepemilikan ijazah tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sebagai pemegang syarat tanda lulus, sehingga beralih pada kemampuan individu yang didapat dari pendidikan nonformal.

Hal ini memberikan peluang besar dalam pertumbuhan pendidikan nonformal yang membekali individu dengan keterampilan yang praktis dan sesuai dunia kerja. Pentingnya peranan pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial bergantung pada kondisi masyarakat dengan memberlakukan dasar pembelajaran yang terfokus pada pemecahan masalah guna terciptanya masyarakat yang lebih baik. Penyusunan proses pendidikan yang akan dibentuk adalah terciptanya negara ideal, dimana masyarakatnya secara individual maupun kelompok mempunyai keahlian sains dan teknologi serta memiliki pemahaman untuk merampungkan berbagai masalah dirinya, masyarakat, dan kebangsaan (Zaimudin, 2017).

## 6.4 Strategi Pembaruan Pendidikan Menghadapi Mobilitas Sosial

Pendidikan diyakini sebagai sarana peningkatan mobilitas sosial. Kualitas dari pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia demi kemajuan bangsa. Disini peran pendidikan sangat penting dalam menghasilkan individu yang dapat mengembangkan potensinya serta dapat beradaptasi dalam konteks sosial. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan pendidikan guna meningkatkan kualitas suatu bangsa.

Dalam proses perubahan pendidikan mempunyai peran yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut :

1. Pendidikan hendaknya memberikan pengaruh terhadap perubahan masyarakat
2. Pendidikan hendaknya memberikan sumbangan maksimal terhadap proses transformasi yang mengarah terwujudnya masyarakat madani.

Proses pembaruan sistem pendidikan merupakan proses perubahan terencana dengan tahap-tahap atas dasar kerjasama berupaya memperbaiki berbagai

masalah yang menghambat proses pendidikan dan menyusun tahap pembaruan yang praktis dan strategis. Sehingga pembaruan ini dapat diterapkan di lapangan.

Oleh sebab itu, pendidikan sangat mempengaruhi perubahan status sosial masyarakat. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses transformasi ilmu pengetahuan serta pelatihan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.



# Bab 7

## Pendidikan Multikultural

### 7.1 Pengertian

Pendidikan adalah sarana yang tepat bagi upaya melestarikan dan menanamkan berbagai nilai atau pandangan hidup dan kesadaran akan perbedaan budaya pada masyarakat multikultural. Upaya menanamkan kesadaran multikultural lewat pendidikan inilah yang disebut pendidikan multikultural (Maksum, 2011). James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai sebuah ide di mana semua siswa tanpa melihat suku bangsa, gender, budaya, ras, agama, kelas sosial seharusnya merasakan pendidikan yang setara di sekolah (Banks, 1988). Gorski dalam Maksum (2011) berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang membahas adanya berbagai kegagalan, kekurangan, dan tindak diskriminasi secara holistik dalam dunia pendidikan.

Gorski dan Cover menjelaskan secara detail pendidikan multikultural yaitu sebagai berikut (Maksum, 2011):

1. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan potensi diri.
2. Siswa dipersiapkan untuk turut berpartisipasi aktif dalam masyarakat antarbudaya.

3. Guru mempersiapkan siswa tanpa melihat latar belakang budayanya agar dapat belajar secara efektif.
4. Sekolah hendaknya aktif menyelesaikan semua bentuk penindasan
5. Siswa harus menjadi pusat dari pendidikan dan bersifat terbuka terhadap pengalaman dan aspirasi siswa.

Pendidikan multikultural mempunyai empat makna yaitu (Sada, 2004):

1. Pengajaran mengenai budaya yang beragam dengan menggunakan pendekatan asimilasi kultural,
2. Pengajaran mengenai berbagai pendekatan tata hubungan sosial,
3. Pengajaran untuk meningkatkan pluralisme dengan tidak membedakan tingkatan sosial masyarakat, dan
4. Pengajaran mengenai merefleksikan keragaman untuk meningkatkan kesamaan dan pluralisme.

Definisi di atas sesuai dengan pandangan Gollnick di mana pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menggabungkan perbedaan budaya dan kesamaan di sekolah (Gollnick et al., 2009). Kamanto Sunarto berpendapat bahwa pendidikan multikultural sebagai (Sunarto, 2004):

1. Pendidikan budaya yang beragam di masyarakat,
2. Pendidikan yang menawarkan berbagai model untuk budaya yang beragam di masyarakat,
3. Pendidikan untuk membina perilaku siswa untuk menghargai budaya yang beragam di masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural ialah suatu model pendidikan yang memberikan kepada seluruh siswa kesempatan belajar yang sama tanpa memandang jenis warna kulit, agama, dan darimana ia berasal sehingga tujuan dan cita-cita pendidikan nasional dapat terpenuhi.

## 7.2 Prinsip Pendidikan Multikultural

Beberapa prinsip dari pendidikan multikultural ialah (Maksum, 2011):

1. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka terhadap budaya dan berdasarkan pada siswa.
2. Pemilihan isi materi pelajaran harus menanamkan persamaan dan perbedaan dalam lintas kelompok.
3. Pemilihan materi pelajaran harus disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat.
4. Pengetahuan dan pengalaman yang dibawa siswa ke kelas harus dapat digambarkan dan digambarkan oleh semua pelajaran.
5. Penggunaan model belajar yang interaktif agar pembelajaran mudah dimengerti oleh siswa.

## 7.3 Tujuan Pendidikan Multikultural

Beberapa tujuan pendidikan multikultural menurut Gorski adalah sebagai berikut (Maksum, 2011):

1. Seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan prestasi
2. Belajar mengenai cara untuk berpikir secara kritis
3. Memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan
4. Semua gaya belajar siswa dapat diakomodasikan dengan baik
5. Berbagai kelompok yang berbeda memberikan kontribusi dan hal itu dapat dihargai
6. Perilaku positif kepada berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda dapat dikembangkan dengan baik
7. Menjadi warga yang baik di masyarakat dan di sekolah
8. Melihat dari perspektif yang berbeda untuk belajar menilai pengetahuan
9. Untuk pengembangan identitas nasional, etnis, dan global

10. Pengembangan berbagai keahlian, membuat keputusan dan melakukan analisis secara kritis.

Sedangkan Dodi Truna berpendapat bahwa beberapa tujuan pendidikan multikultural yaitu (Truna, 2010):

1. Pengembangan sudut pandang yang berbeda dari berbagai kelompok masyarakat.
2. Kesadaran budaya dalam masyarakat semakin kuat
3. Interkultural dari berbagai budaya dalam masyarakat semakin kuat
4. Membasmi seksisme, rasisme, dan prasangka lainnya
5. Pengembangan rasa sadar akan kepemilikan planet bumi.
6. Pengembangan keahlian aksi sosial.

## 7.4 Nilai-nilai Pendidikan Multikultural

Bannet menjelaskan nilai-nilai inti pendidikan multikultural, antara lain (Naim and Sauqi, 2008):

1. Mengapresiasi adanya pluralitas budaya di masyarakat
2. Mengakui hak asasi manusia dan harkat manusia
3. Mengembangkan rasa tanggung jawab masyarakat di dunia
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab manusia kepada planet bumi

## 7.5 Dimensi Pendidikan Multikultural

Beberapa dimensi pendidikan multikultural menurut James Bank ialah (Banks, 1988):

### **Dimensi yang mengintegrasikan materi dan isi.**

Dimensi ini dipakai oleh guru untuk menerangkan pelajaran dengan melakukan refleksi terhadap materi yang berbeda. Secara khusus, guru melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda ketika menyatukan materi ajar ke

dalam kurikulum. Mengakui kontribusi merupakan salah satu pendekatan umum di mana berbagai guru membatasi kenyataan tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Namun unit pembelajaran dan rancangan pembelajaran tidak diganti. Guru secara khusus memakai beberapa pendekatan untuk menambah beberapa topik atau unit yang berhubungan dengan materi multikultural.

### **Dimensi membangun pengetahuan.**

Suatu dimensi ketika para guru membantu siswa membuat kesimpulan di mana bidang pengetahuan yang dimiliki ikut memengaruhi hasil dan memahami berbagai sudut pandang. Dimensi ini juga berkaitan dengan perubahan pengetahuan pada diri mereka sendiri dan dipahami oleh siswa.

### **Dimensi untuk mengurangi prasangka.**

Guru berupaya membantu siswa melakukan pengembangan sikap positif mengenai kelompok yang berbeda. Contohnya adalah pada saat anak datang ke sekolah dengan sikap negatif dan mempunyai pemahaman yang salah kepada etnik atau ras yang berbeda. Pendidikan akan membantu siswa dalam pengembangan sikap antarkelompok yang lebih baik, menyediakan kondisi yang pasti dan mapan. Dua kondisi tersebut adalah bahan ajar yang memiliki citra yang positif tentang kelompok yang berbeda dan menggunakan secara terus-menerus dan konsisten bahan ajar tersebut.

### **Dimensi pendidikan yang adil dan sama.**

Dimensi ini berfokus pada berbagai cara untuk mengubah fasilitas pembelajaran agar hasil belajar dari sejumlah siswa dari berbagai kelompok dapat dengan mudah tercapai. Aktivitas dan strategi belajar yang dapat dipakai untuk menanamkan pendidikan yang adil ialah bukan dengan berbagai cara yang kompetitif melainkan menggunakan bentuk kerja sama. Dimensi berkaitan dengan pendidikan yang didesain sebagai pembentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok seperti wanita, etnik, dan para pelajar berkebutuhan khusus yang dapat menawarkan persamaan memperoleh hak, pengalaman pendidikan, dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

### **Dimensi untuk memberdayakan struktur sosial dan budaya sekolah.**

Dimensi ini penting dalam memberdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan

potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan, partisipasi ekstrakurikuler dan penghargaan staf dalam memberikan respon terhadap berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

## 7.6 Faktor Penyebab terjadinya Multikultural

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya multikulturalisme ialah (Puspita, 2018):

1. Faktor geografis  
Kebiasaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor geografis. Sehingga masyarakat yang berasal dari suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda akan memiliki perbedaan dalam masyarakat (multikultural).
2. Pengaruh budaya asing  
Salah satu penyebab terjadinya multikultural adalah budaya asing. karena masyarakat yang memahami berbagai budaya asing memiliki kemungkinan cara berpikir mereka akan ikut terpengaruh dan menjadi perbedaan antara budaya negaranya sendiri dan budaya asing.
3. Kondisi iklim yang tidak sama  
Memiliki arti yang hampir sama dengan letak geografis dari suatu daerah yang berbeda.

## 7.7 Tantangan Pendidikan Multikultural

Ada tiga tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu (Puspita, 2018):

1. Suku bangsa, agama dan tradisi

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa di mana agama merupakan ikatan yang paling penting bagi kehidupan orang Indonesia. Jika agama digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas kelompok ekonomi dan berbagai individu maka hal ini akan merusak pendidikan multikultural di Indonesia.

2. Kepercayaan

Unsur yang paling penting dalam hidup bermasyarakat adalah kepercayaan. Ketika masyarakat plural tidak melakukan komunikasi maka ketakutan, kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap orang lain dapat muncul.

3. Toleransi

Bentuk tertinggi ketika kita keyakinan kita tercapai dan hal ini dapat berubah ialah toleransi. Suatu pendekatan dalam perubahan wawasan, pandangan, dan akal pikiran disebut juga sebagai toleransi.

## 7.8 Pendekatan Pendidikan Multikultural

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut (Puspita, 2018):

1. Mengajarkan siswa yang memiliki perbedaan secara budaya dengan menitikberatkan pada terjadinya perubahan budaya di kalangan siswa.
2. Fokus pada pentingnya hubungan antar manusia dengan mendorong dan mengarahkan siswa untuk memiliki perasaan positif, pengembangan toleransi, pengembangan konsep diri, dan mau menerima orang lain.
3. Membuat arena belajar pada satu kelompok budaya.
4. Pendidikan multikultural dibuat sebagai usaha mendukung persamaan struktur sosial dan pluralisme budaya dengan memberikan kesamaan kekuasaan antar kelompok.
5. Pendidikan multikultural juga sebagai usaha pembangunan kembali sosial agar persamaan struktur sosial dan pluralitas budaya dapat

terjadi. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan agar semua warga negara Indonesia turut aktif mengusahakan adanya kesamaan struktur sosial.

## 7.9 Penerapan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dapat diterapkan di dunia pendidikan melalui berbagai cara (Puspita, 2018):

### **Multikulturalisme dalam Kurikulum.**

Langkah pertama yang harus dilaksanakan saat mengajarkan berbagai nilai multikultural adalah dengan mengenalkan ragam budaya atau kultur. Kultur mencakup berbagai aspek sosial manusia pembentuk identitas sebagai contoh ras, etnis, dan agama. Kurikulum tiap jenjang pendidikan perlu menjadikan pengenalan kultur sebagai bagian yang integral dengan mengintegrasikannya ke dalam berbagai mata pelajaran yang memungkinkan pengenalan kultur itu terjadi. Sehingga pengadaan mata pelajaran khusus untuk multikulturalisme tidak diperlukan karena hal tersebut menyebabkan struktur kurikulum menjadi terlalu banyak mata pelajaran dan gemuk. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang terbentuk oleh keragaman etnis, kehadiran agama, dan keadaan geografis masyarakat. Berbagai kelompok sosial yang membentuk masyarakat Indonesia perlu diperkenalkan kepada seluruh siswa.

Kelompok sosial adalah kelompok yang pembentuk identitas manusia secara individual maupun kolektif. Kelompok sosial dapat dibentuk berdasarkan suku bangsa, agama, dan etnis. Memperkenalkan identitas kelompok yang berbeda harus dilakukan agar siswa memahami keberadaan kelompok yang memiliki perbedaan identitas. Memperkenalkan keragaman sosial bangsa Indonesia kepada siswa membuat siswa dapat memahami bahwa kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sangat besar. Siswa perlu memahami bahwa perbedaan yang mereka alami dan lihat bukan sebagai pemisah antara kelompok melainkan sebagai sebuah kekayaan. Selain memperkenalkan ragam budaya bangsa Indonesia yang multi etnis, siswa harus memahami bahwa mereka juga bagian dari warga dunia. Sehingga siswa perlu memahami ragam kultur mancanegara. India, Arab, dan China merupakan budaya yang ikut memengaruhi kekayaan budaya Indonesia.

### **Menanamkan berbagai nilai multikultural dalam pembelajaran.**

Menanamkan berbagai nilai multikultural dapat dilakukan dengan membentuk berbagai sikap positif terhadap keragaman dan mengenalkan ragam budaya Indonesia dan dunia. Menanamkan berbagai nilai multikultural dapat dilaksanakan pada semua proses belajar-mengajar di kelas. Jika keragaman budaya dikenalkan dengan menggunakan pendekatan kognitif, maka penanaman berbagai nilai multikultural tersebut akan lebih mengena ke aspek afeksi siswa. Berbagai nilai multikultural yaitu: kesetaraan, identitas diri, pemahaman akan perbedaan, objektivitas, empati dan toleransi. Penanaman nilai multikultural adalah tanggung jawab dari semua guru yang berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Sehingga suasana kelas harus mengutamakan berbagai nilai multikultural dan berbagai hak individu di dalamnya. Internalisasi berbagai nilai multikultural dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan memilih strategi dan metode pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Metode yang dipakai seharusnya fokus pada berbagai prinsip objektivitas, kesetaraan, dan toleransi.

Prinsip kesetaraan bermakna bahwa setiap siswa berhak dan memiliki peluang yang sama untuk berperan secara aktif dalam proses belajar mengajar. Guru harus memperhatikan setiap siswa terlibat dalam proses belajar mengajar sehingga tidak terjadi dominasi oleh sekelompok atau seseorang. Perlu dipahami bahwa setiap siswa memiliki preferensi tersendiri untuk berpartisipasi dalam kelompok sosial karena setiap siswa memiliki sifat individu dan latar belakang yang berbeda. Ada siswa yang lebih cenderung agresif, aktif, dan dominan. Ada juga siswa yang lebih cenderung mengalah, pasif, dan mengikuti. Guru memiliki peran penting dalam hal ini yaitu untuk memastikan bahwa setiap siswa paham akan kesetaraan mereka sebagai siswa. Guru harus bersikap objektif kepada seluruh siswa sesuai dengan prinsip kesetaraan. Guru bertugas untuk membentuk karakter positif dalam diri siswa dengan menjauhi sikap yang merugikan yang orang lain dan menguntungkan sekelompok orang atau seseorang. guru yang bersikap objektif kepada seluruh siswanya akan berkesan pada siswa bahwa orang lain harus diperlakukan dengan bijak dan adil. Sehingga secara perlahan sikap positif tersebut akan tertanam dalam diri siswa.

Toleransi adalah bentuk penyimpangan terhadap berbagai nilai yang dianut atau kesepakatan. Bersikap toleransi memiliki arti untuk membiarkan orang lain untuk melaksanakan pelanggaran aturan yang telah ditentukan. Prinsip toleransi dilakukan secara terukur, hati-hati dan terbatas. Sebagai contoh: siswa

yang terlambat datang ke sekolah. Jika berdasarkan tertulis bahwa siswa harus tiba di sekolah pukul 07.30. Mereka yang tidak diperbolehkan masuk ke sekolah jika tiba lewat pukul 07.30, maka seharusnya siswa yang tiba pukul 07.31 tidak diizinkan untuk masuk ke sekolah. Kadang keterlambatan kurang dari 10 menit masih bisa dimaafkan oleh guru. Inilah yang dikatakan sebagai toleransi di mana memberikan kelonggaran terhadap peraturan. Memberikan kelonggaran peraturan harus dilakukan secara terbatas. Berdasarkan contoh di atas, maka siswa yang tiba pukul 07.31 tidak diperbolehkan masuk ke sekolah, kecuali siswa tersebut mempunyai alasan yang kuat agar mendapatkan toleransi. Toleransi juga harus berlaku pada hubungan antar kelompok maupun individu di sekolah. Toleransi harus ditetapkan dengan berbagai batasan sehingga toleransi tersebut masih terjaga.

### **Budaya multikultural di sekolah**

Berbagai lembaga pendidikan diharapkan mampu mengajarkan siswa untuk memahami budaya yang beragam sehingga konsep multikultural dapat dipahami oleh para generasi muda dengan baik. Namun, pemahaman tidak cukup, karena pemahaman secara kognitif yang tidak didukung oleh perbuatan nyata tidak berarti apa-apa. Konsep multikultural dapat dipahami dengan baik oleh banyak orang namun orang tersebut belum tentu dapat mengimplementasikan berbagai nilai multikultural tersebut. Keefektifan penanaman berbagai nilai multikultural dapat terjadi bila budaya multikultural digunakan dalam budaya sekolah. Sekolah terutama yang berada di kota besar merupakan tempat pertemuan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial. Jika dibandingkan dengan sekolah di desa, sekolah di daerah urbanisasi dan di kota cenderung lebih plural. Oleh sebab itu, sekolah harus mampu menjadi laboratorium budaya multikultural.

Budaya multikultural ialah budaya dari sekelompok populasi yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai perbedaan latar belakang dan menggunakan konsep multikulturalisme sebagai dasar pemahamannya. Budaya multikultural dapat diawali dengan mengakui berbagai perbedaan budaya tersebut dan sebuah kultur mendominasi kultur lainnya. Pengakuan tersebut harus disertai dengan adanya empati, toleransi, dan apresiasi. Penerapan budaya multikultural lebih mudah dilakukan di sekolah umum (non-keagamaan) karena sekolah tersebut lebih terbuka terhadap adanya perbedaan terutama perbedaan agama. Penerapan berbagai nilai multikultural juga dapat dilakukan di semua sekolah keagamaan di mana siswa di sekolah tersebut hanya

memiliki agama yang sama namun setiap siswa pasti mempunyai perbedaan identitas sosial sebagai contoh etnis, suku, dan status sosial.

### **Kegiatan yang mendukung pendidikan multikultural**

Berbagai macam kegiatan atau program sementara yang bertujuan untuk penanaman berbagai nilai multikultural dapat dirancang oleh lembaga pendidikan. Berbagai kegiatan tersebut dapat menggunakan tema multikultural secara khusus atau kegiatan dengan tema lain yang dilaksanakan secara multikultural. Siswa diperkenalkan dengan berbagai budaya dan nilai yang ada pada masyarakat lain melalui berbagai kegiatan tersebut. Ragam perbedaan dapat diperkenalkan kepada siswa dengan menggunakan berbagai perspektif multikultural.

Sebagai contoh dengan menggunakan perspektif Negara atau bangsa, perspektif agama, perspektif komunitas sosial tertentu dan perspektif suku bangsa. Selain kegiatan pendukung di sekolah, lembaga pendidikan juga bisa berkunjung ke berbagai tempat yang dapat membantu mewujudkan pendidikan multikultural sebagai contoh mengunjungi rumah ibadah agama lain, museum, sekolah lain yang sebagian besar siswanya merupakan etnis tertentu dan perkampungan komunitas tertentu.



# Bab 8

## Pendidikan Inklusi

### 8.1 Pengertian

Masalah dominan di bidang disabilitas adalah kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak dan orang dewasa penyandang disabilitas. Karena pendidikan adalah hak fundamental untuk semua, yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dilindungi melalui berbagai konvensi internasional, ini adalah permasalahan yang sangat serius. Di sebagian besar negara, terdapat perbedaan dramatis dalam kesempatan pendidikan yang disediakan untuk anak-anak penyandang disabilitas dan yang disediakan untuk anak-anak non-disabilitas. Tidak mungkin mewujudkan tujuan Pendidikan untuk Semua jika kita tidak mencapai perubahan total dalam situasi ini (Lindqvist, 1999).

Pendidikan inklusi dalam konteks tujuan EFA (Education For All) adalah masalah yang kompleks, tidak seperti masalah kesehatan dan tenaga kerja, disabilitas mencakup serangkaian masalah yang melintasi sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan (D. Cameron and Valentine, 2001). Akibatnya, pengembangan kebijakan menghadapi tantangan untuk menghindari fragmentasi, ketidakmerataan, dan sulitnya mengakses layanan. Pendidikan inklusi juga dapat diterapkan di tingkat yang berbeda, mencakup tujuan yang berbeda, didasarkan pada motif yang berbeda,

mencerminkan klasifikasi yang berbeda dari kebutuhan pendidikan khusus, dan memberikan layanan dalam konteks yang berbeda (Peters, 2004).

Sejak 2009, Indonesia memiliki komitmen dan upaya yang sangat baik khususnya pada pendidikan inklusi. Pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama dalam hal perolehan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus (Ediyanto et al., 2017). Pemerintah Indonesia membuat komitmen politik pada Forum Pendidikan Dunia (2000) untuk mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua. Dengan berpedoman pada visi, misi dan strategi pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) yaitu Undang-undang yang berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 (Hadis, 2005), dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70/2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa yang Memiliki Kecerdasan Potensial dan/atau Berbakat Khusus.

Selain itu juga menjadi jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *World Declaration on Education for All* (1990), *UN Standard Rules on the Equal Opportunity for Persons with Disabilities* (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-Undang Penyandang Disabilitas (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004) (Poemomo, 2016), menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Sasaran utama meliputi perluasan dan pemerataan, peningkatan kualitas dan relevansi, serta penerapan otonomi di Perguruan Tinggi. Tujuan utamanya adalah membuat pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat; untuk memajukan pengembangan pendidikan berbasis masyarakat; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan dasar (Hadis, 2005).

Semua instrumen hukum ini ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, berhak untuk mengakses pendidikan. Meskipun konsep pendidikan inklusi telah dipromosikan secara internasional, masih ditemukan banyak hambatan untuk keberadaan partisipasi penuh anak penyandang disabilitas dalam pendidikan. Kurangnya informasi, ditambah dengan sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat berkontribusi pada pengabaian hak mereka atas pendidikan yang terus berlanjut. Hal ini juga disebabkan angka pendaftaran dan partisipasi dalam proses pendidikan anak-anak penyandang disabilitas yang melampaui batas sekolah dan ruang kelas sehingga perolehan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus tidak

merata. Meskipun banyak hambatan yang ditemui, namun sejak dimulainya pendidikan inklusi di Indonesia, apresiasi dari masyarakat sangat luar biasa, sehingga implementasinya tumbuh dan berkembang pesat di berbagai pelosok tanah air dan banyak mendapat pujian dari UNESCO atas keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia (Poernomo, 2016).

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki kesamaan derajat untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada pengecualian, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Warganegara penyandang disabilitas juga berhak atas pendidikan yang pola pendidikannya dirancang dan disesuaikan dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Salah satu upaya memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus direalisasikan dengan pembentukan berbagai jenis pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus seperti Sekolah Luar Biasa mulai dari Sekolah Dasar sekolah sampai SMA, namun sayangnya masih mengecualikan anak-anak dengan kebutuhan khusus dengan kehidupan sosial yang seharusnya mereka juga layak mendapatkannya agar melatih interaksi sosial mereka dengan anak yang normal dan masyarakat pada umumnya (Ediyanto et al., 2017).

Dalam pengembangan Pendidikan, saat ini di Indonesia mengembangkan sistem pendidikan inklusi untuk menghilangkan diskriminasi antara anak-anak berkebutuhan khusus dan masyarakat (Ediyanto et al., 2017). Pendidikan inklusi bukanlah nama lain dari pendidikan, pendidikan inklusi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mencoba memecahkan kesulitan yang muncul di sekolah (Poernomo, 2016) dan Pendidikan luar biasa dapat menjadi penghalang bagi pengembangan praktik inklusi di sekolah (Stubbs, 2008).

Pendidikan inklusi mengacu pada berbagai strategi, kegiatan, dan proses yang berupaya mewujudkan hak universal atas pendidikan yang berkualitas, relevan, dan sesuai diantaranya:

1. Mengakui bahwa pembelajaran dimulai saat lahir dan berlanjut sepanjang hidup, termasuk belajar di rumah, komunitas, situasi formal, informal dan non-formal;
2. Merupakan proses dinamis yang terus berkembang sesuai dengan budaya dan konteks lain di dalamnya;

3. Berusaha untuk memungkinkan komunitas, sistem dan struktur untuk memerangi diskriminasi, menghargai keragaman, mengatasi hambatan pembelajaran dan partisipasi untuk semua pihak;
4. Segala perbedaan umur, jenis kelamin, suku, bahasa, status kesehatan, status ekonomi, agama, kecacatan, gaya hidup dan bentuk perbedaan lainnya diakui dan dihormati;
5. Merupakan bagian dari strategi dalam mengembangkan pendidikan inklusif, dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia, toleransi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan keadilan sosial; di mana kebutuhan dasar dan hak semua orang dapat terpenuhi;
6. Mengubah sistem untuk menyesuaikan siswa, bukan mengubah siswa menjadi sistem (Stubbs, 2008).

## 8.2 Konsep Pendidikan Inklusi

Prinsip pendidikan inklusi diadopsi pada “Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus: Akses dan Kualitas” (UNESCO, 1994) dan dinyatakan kembali di Forum Pendidikan Dunia (Dakar, 2000). Pernyataan tersebut menginginkan Pemerintah untuk memberikan prioritas tertinggi untuk menjadikan sistem pendidikan inklusi dan mengadopsi prinsip pendidikan inklusi sebagai masalah kebijakan. Gagasan tentang inklusi selanjutnya didukung oleh Peraturan Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang Mewartakan Partisipasi dan kesetaraan untuk semua. Pendidikan Inklusi (IE) didefinisikan sebagai proses untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari semua siswa dengan mengurangi hambatan, dan di dalam lingkungan belajar. Pendidikan inklusif adalah proses penguatan kapasitas sistem pendidikan untuk menjangkau semua peserta didik.

Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang mencakup semua siswa, dan menyambut serta mendukung mereka untuk belajar, siapapun mereka dan apa pun kemampuan atau persyaratan mereka. Ini berarti memastikan pengajaran dan kurikulum, gedung sekolah, ruang kelas, area bermain, transportasi dan toilet sesuai untuk semua anak di semua tingkatan. Pendidikan inklusif berarti semua anak belajar bersama di sekolah yang sama (UNICEF, 2017).

Pendidikan inklusif sebagai proses penguatan kapasitas sistem pendidikan untuk menjangkau semua peserta didik. Oleh karena itu, prinsip keseluruhan harus memandu semua kebijakan dan praktik pendidikan, mulai dari keyakinan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan landasan untuk masyarakat yang lebih adil. Pendidikan berlangsung dalam banyak konteks, baik formal maupun nonformal, serta dalam keluarga dan masyarakat luas. Akibatnya, pendidikan inklusif bukanlah masalah marginal tetapi merupakan pusat pencapaian pendidikan berkualitas tinggi untuk semua peserta didik dan pengembangan masyarakat yang lebih inklusif (Miles and Singal, 2010).

Pendidikan inklusif penting untuk mencapai kesetaraan sosial dan merupakan elemen penting dalam pembelajaran sepanjang hayat. Singkatnya, pendidikan inklusif adalah proses yang melibatkan transformasi sekolah dan pusat pembelajaran lainnya untuk melayani semua anak termasuk anak laki-laki dan perempuan, siswa dari etnis dan bahasa minoritas, penduduk pedesaan, mereka yang memiliki disabilitas dan kesulitan dalam belajar dan untuk menyediakan kesempatan belajar untuk semua remaja dan dewasa. Tujuannya adalah untuk menghilangkan eksklusi yang merupakan konsekuensi dari sikap negatif dan kurangnya respon terhadap keragaman ras, status ekonomi, kelas sosial, etnis, bahasa, agama, dan jenis kelamin (Imaniah and Fitria, 2018).

Sebagian besar negara mengadopsi prinsip Pendidikan untuk Semua dalam kebijakan dan undang-undang mereka, tetapi dalam praktiknya, pendidikan adalah untuk “hampir semua” atau untuk “kebanyakan orang” dan orang-orang yang dikecualikan justru adalah mereka yang paling membutuhkannya, untuk mengkompensasi situasi sosial dan pendidikan mereka yang kurang beruntung (Imaniah and Fitria, 2018).

Sistem pendidikan inklusi hanya dapat dibuat jika sekolah biasa menjadi lebih inklusi dengan kata lain, jika mereka menjadi lebih baik dalam mendidik semua anak di komunitas mereka. Inklusi sebagai proses menangani dan menanggapi keragaman kebutuhan semua anak, remaja dan orang dewasa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan komunitas, dan mengurangi dan menghilangkan eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Melibatkan perubahan dan modifikasi dalam konten, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi bersama yang mencakup semua anak dari rentang usia yang sesuai dan keyakinan yang merupakan tanggung jawab sistem reguler untuk mendidik semua anak. Istilah inklusi memiliki interpretasi yang berbeda di berbagai negara. Terkadang dikaitkan dengan siswa tersebut hidup dalam

konteks yang terpinggirkan atau miskin, tetapi seringkali terkait dengan partisipasi penyandang cacat atau mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus di sekolah umum. Dengan cara ini, inklusi dianggap hampir sama dengan integrasi, padahal keduanya merupakan dua pendekatan yang berbeda dengan visi dan perspektif yang berbeda. Sebagai konsekuensi dari kesalahpahaman ini, kebijakan inklusi dianggap sebagai tanggung jawab pendidikan khusus, membatasi analisis semua bentuk umum dari pengecualian dan diskriminasi yang terjadi dalam sistem pendidikan (Imaniah and Fitria, 2018).

Transformasi sistem pendidikan dan sekolah dapat memenuhi keragaman kebutuhan belajar siswa yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya serta karakteristik individu mereka, motivasi belajar, kemampuan, gaya dan ritme. Perspektif ini, bukan siswa yang terdaftar di sekolah yang harus beradaptasi dengan ketentuan pendidikan yang ada, melainkan sekolah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, karena semua siswa berbeda. Sistem pendidikan khusus berarti anak-anak penyandang disabilitas menerima pendidikan di lingkungan belajar yang terpisah seperti sekolah luar biasa yang sering terisolasi dari masyarakat, dari anak lain, atau dari pendidikan formal (H. Corps, G. Ceralli, 2012).

Elemen kunci inklusi bukanlah individualisasi tetapi diversifikasi penyediaan pendidikan dan personalisasi pengalaman belajar untuk mencapai tingkat partisipasi tertinggi dari semua siswa, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu mereka. Hal ini menyiratkan kemajuan menuju desain universal, di mana proses belajar mengajar dan kurikulum mempertimbangkan dari awal keragaman kebutuhan semua siswa. Respon terhadap keragaman merupakan kondisi penting untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi yang merupakan tantangan utama saat ini yang dihadapi oleh sekolah dan guru, karena melibatkan perubahan substantif dalam konsepsi, sikap, kurikulum, praktik pedagogis, pelatihan guru, sistem evaluasi dan organisasi sekolah yang ada (Imaniah and Fitria, 2018).

Sistem pendidikan inklusi mengambil pendekatan sistematis tentang Pendidikan. Pendidikan terintegrasi berarti bahwa anak penyandang disabilitas ditempatkan di sekolah umum, tetapi sekolah hanya melakukan sedikit upaya untuk menangani kebutuhan akademik atau sosial tertentu yang mungkin dimiliki anak, dan karenanya anak harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Kelas untuk anak-anak penyandang disabilitas di sekolah umum dibimbing oleh guru yang berdedikasi. Anak disabilitas dapat memiliki sedikit

atau tidak ada kontak dengan teman sebaya mereka yang bukan penyandang disabilitas. Selain itu, Sistem Pendidikan mempertimbangkan langkah-langkah yang harus diambil untuk dapat menyediakan pendidikan yang sesuai dengan semua anak (Imaniah and Fitria, 2018).

## 8.3 Perkembangan Pendidikan Inklusi

Enam tipologi cara berpikir tentang inklusi adalah sebagai berikut (Mel, Booth and Dyson, 2006):

1. Inklusi sebagai perhatian pada siswa difabel dan lainnya dikategorikan sebagai memiliki kebutuhan pendidikan khusus.
2. Inklusi sebagai respons terhadap pengucilan disipliner.
3. Inklusi dalam kaitannya dengan semua kelompok yang dianggap rentan terhadap pengecualian.
4. Inklusi sebagai pengembangan sekolah untuk semua.
5. Inklusi sebagai Pendidikan untuk Semua.
6. Inklusi sebagai pendekatan berprinsip untuk pendidikan dan masyarakat.

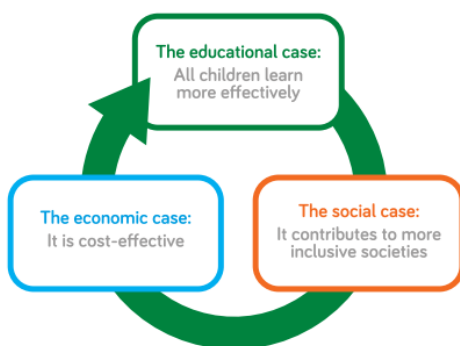
Interpretasi yang berbeda dari pendidikan inklusi ini menunjukkan bahwa ada kebingungan konseptual seputar masalah ini, tetapi mungkin juga bahwa hal itu membutuhkan bentuk yang berbeda, tergantung pada perhatian kontekstual. Pada dasarnya ini adalah proses menantang pengucilan di sekolah dan komunitas dan menjadi 'waspada tentang ancaman apapun yang muncul terhadap kesetaraan (Dyson, 2004).

## 8.4 Pentingnya Pendidikan Inklusi

Pentingnya Pendidikan Inklusi adalah sebagai berikut (UNICEF, 2017):

1. Meningkatkan pembelajaran untuk semua anak baik mereka yang memiliki atau tidak memiliki kecacatan.

2. Mempromosikan pemahaman, mengurangi prasangka dan memperkuat integrasi sosial.
3. Memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas difasilitasi untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi dan sosial dalam komunitas mereka.



**Gambar 8.1:** Pentingnya Pendidikan Inklusi (UNICEF, 2017)

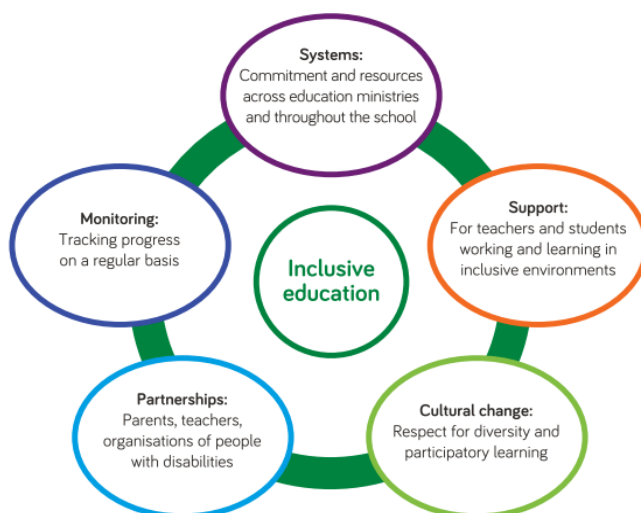
Pendidikan inklusi terhubung dengan anak penyandang disabilitas yang menyadari hak-hak lainnya. Semua hak asasi manusia saling terkait termasuk hak atas pendidikan. Tidak mungkin mencapai pendidikan yang efektif kecuali hak-hak lain direalisasikan. Dan jika hak atas pendidikan terpenuhi maka bermuara pada realisasi hak lainnya. Pemerintah harus memikirkan tentang pendidikan inklusif di samping hak-hak anak lain yang tidak dapat diperkenalkan secara terpisah (UNICEF, 2017).



**Gambar 8.2:** Pendidikan inklusi terhubung dengan anak penyandang disabilitas yang menyadari hak-hak lainnya (UNICEF, 2017).

## 8.5 Sistem Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif melibatkan transformasi seluruh sistem pendidikan, Undang-undang dan kebijakan, sistem pembiayaan, administrasi, desain, penyelenggaraan dan pemantauan pendidikan, dan pengaturan sekolah.



**Gambar 8.3:** Sistem Pendidikan Inklusi (UNICEF, 2017)

Sistem Pendidikan Inklusi terdiri dari (UNICEF, 2017):

1. Komitmen dan investasi dari Kementerian Pendidikan dibutuhkan waktu dan biaya untuk mengubah sistem.
2. Dukungan untuk guru dan siswa, guru membutuhkan pelatihan dan bimbingan, dan siswa perlu diberikan layanan untuk mengatasi hambatan belajar.
3. Promosi penghormatan terhadap keragaman dan pembelajaran inklusi, tindakan diperlukan untuk menantang sikap dan prasangka negatif terhadap anak penyandang disabilitas.
4. Harapan tinggi dari semua siswa, guru perlu berinvestasi dan mendukung semua anak.

5. Lingkungan yang aman dan inklusi, anak-anak tidak dapat belajar jika mereka takut pada guru atau adanya penindasan dari anak lain.
6. Kemitraan antara orang tua, organisasi penyandang disabilitas, dan sekolah, pendidikan inklusi akan mendapatkan manfaat dari pengalaman dan pengetahuan seluas mungkin.
7. Sistem untuk memantau kemajuan, penting untuk mengukur apakah situasinya membaik, dan jika tidak, perubahan lebih lanjut apa yang diperlukan.

## 8.6 Syarat Pendidikan Inklusi

Persyaratan untuk mewujudkan Pendidikan Inklusi adalah sebagai berikut (UNICEF, 2017):

1. Diakhirinya diskriminasi
2. Penghapusan anak penyandang disabilitas
3. Akses ke pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah sekolah yang dapat diakses dan inklusif yang memadai, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas yang terjebak dalam krisis dan keadaan darurat.
4. Dukungan atau adaptasi praktis bagi siswa untuk memungkinkan mereka belajar (akomodasi yang wajar).
5. Rencana pendidikan individu untuk anak-anak penyandang disabilitas dengan menetapkan akomodasi dan dukungan apa yang mereka butuhkan.
6. Layanan untuk kondisi khusus seperti belajar huruf braille atau bahasa isyarat, pengaturan ulang ruang kelas, dan materi pembelajaran yang dapat diakses.
7. Guru cukup terlatih untuk bekerja di sekolah inklusi.
8. Berkomitmen semua departemen atau institusi yang ada di pemerintah untuk bekerja menuju inklusi.
9. Memperkenalkan undang-undang dan kebijakan untuk mengakhiri diskriminasi dan menjamin hak atas pendidikan inklusi.

10. Membuat rencana tindakan dan jadwal untuk memperkenalkan pendidikan inklusi.
11. Menghasilkan uang dan sumber daya yang tersedia untuk memungkinkan transisi ke inklusi
12. Kumpulkan informasi dan mengukur kemajuan
13. Menghentikan lembaga untuk anak-anak penyandang disabilitas
14. Menyediakan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini
15. Memberikan pelatihan guru untuk pendidikan inklusif.
16. Memperkenalkan pengujian dan penilaian inklusif
17. Memperkenalkan prosedur pengaduan

Negara harus bekerja secepat mungkin menuju sistem pendidikan inklusi secara penuh (realisasi progresif) dan tidak diperbolehkan melakukan apa pun yang memperlambat kemajuan atau mencegah hal ini terjadi tanpa alasan yang kuat. Meskipun tidak semuanya menjadi mungkin dengan segera, ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh Negara (UNICEF, 2017):

1. Wajib, pendidikan dasar gratis untuk semua anak
2. Non-diskriminasi: menghapus segala bentuk diskriminasi yang menghentikan penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan
3. Akomodasi yang wajar: membuat penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan individu.

## 8.7 Pendidikan Inklusi di Abad 21

Parameter dan peluang bagi peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus dalam pendidikan inklusi yang efektif dan berkaitan dengan abad ke-21 diharapkan dapat membentuk lingkungan belajar multikultural, sosialisasi dan tumbuh kembang anak. Parameter yang diidentifikasi untuk pendidikan inklusi yang efektif adalah menempatkan anak di tempat kelas yang sesuai dengan usianya, tidak ada kelas atau sekolah khusus dan adanya pembelajaran kooperatif yang melatih guru untuk dapat berbagi ide demi perbaikan sistem pendidikan (Jacob and Olisaemeka, 2016).

Aspek penting dari pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus adalah memiliki penerimaan dan persahabatan dari teman sekelas yang dapat membantu kepercayaan dalam diri siswa (Jacob and Olisaemeka, 2016), selain itu diperlukan kolaborasi di dalam kelas dan di luar kelas antara guru pendidikan khusus dan umum dan konselor pembimbing, serta jenis dan tingkat dukungan optimal dari staf pengajar (Eskay, B.N. and J., 2013). Dua faktor penting dalam pembentukan sikap positif menuju inklusi, yaitu peningkatan pengetahuan dan informasi tentang sekolah inklusi dan disabilitas (Zambelli and Bonni, 2004). Sekolah inklusif harus dilengkapi dengan baik dalam semua aspek untuk memenuhi dan memberikan pendidikan berkualitas untuk semua siswa.

## 8.8 Manfaat Pendidikan Inklusi

Pendidikan Inklusi memiliki beberapa manfaat di antaranya (Mag, Sinfield and Burns, 2017):

1. Mengembangkan kekuatan dan bakat individu, dengan harapan yang tinggi dan sesuai untuk masing-masing anak
2. Dapat melibatkan orang tua dalam pendidikan mereka
3. Dapat menumbuhkan budaya sekolah yang saling menghormati
4. Dapat memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima perbedaan yang ada pada masing-masing individu
5. Dapat mengurangi dampak pelecehan dan penindasan
6. Dapat mengembangkan persahabatan dengan berbagai macam anak lain
7. Dari kebutuhan dan kemampuan masing-masing secara positif memengaruhi sekolah dan komunitas mereka untuk menghargai keragaman dan inklusi di tingkat yang lebih luas.
8. Guru inklusi memiliki pandangan pendidikan holistik dengan keterampilan dan pengalaman yang kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai konteks.

Sistem pendidikan inklusi hanya dapat diciptakan jika sekolah biasa menjadi lebih inklusi dalam mendidik semua anak di komunitas mereka. Inklusi sebagai proses menangani dan menanggapi keragaman kebutuhan semua anak, remaja dan orang dewasa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan komunitas. Pendidikan inklusi tidak terlepas dari pemangku kepentingan mulai dari pemerintah dan instansi seperti sekolah, pendidik, lingkungan sekolah, masyarakat dan orang tua untuk mendukung tujuan dari pendidikan inklusi itu sendiri. Infrastruktur yang memadai juga perlu diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk siswa yang efisien dan efektif dalam memahami pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi membutuhkan kerjasama yang intens untuk memenuhi kebutuhan pendidikan semua siswa. Beberapa kolaborasi ini terjadi ketika merencanakan program pembelajaran individual untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Dalam perencanaan seperti itu, guru, ahli terapi, pemimpin sekolah dan orang tua harus bergabung bersama untuk menemukan rencana yang paling efektif untuk anak. Prinsip komunikasi terbuka dan egaliter untuk dinamika kelompok akan membantu memastikan bahwa suara semua anggota tim didengar demi kepentingan terbaik siswa.

Di sekolah inklusi, guru tidak lagi diharapkan untuk bertanggung jawab penuh atas pembelajaran di kelas. Model pengajaran bersama yang muncul memungkinkan guru khusus atau asisten guru untuk bekerja sama dengan guru untuk merencanakan pelajaran secara efektif. Dalam pengajaran bersama, para profesional dapat bekerja dengan kelompok-kelompok kecil, memimpin pelajaran bersama, menargetkan dukungan untuk anak-anak tertentu atau berpindah antar peran dengan lancar. Pengajaran bersama memungkinkan dukungan untuk semua anak terjadi dalam kelas inklusi dengan memanfaatkan kekuatan profesional sebagai sebuah tim.

Faktanya, setiap sistem pendidikan di dunia perlu ditingkatkan dan diupayakan untuk mencapai hasil yang terbaik untuk semua. Dengan memenuhi kebutuhan pendidikan, mengembangkan kurikulum dan memberdayakan pedagogi, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali nilai-nilai universal yang esensial untuk perdamaian, keadilan dan kesejahteraan. Kita harus menjangkau dengan empati kepada orang-orang di samping kita, mendengarkan anak-anak kita, dan memperjuangkan keadilan, prinsip, dan nilai. Motivasi guru dalam mempraktikkan pendidikan inklusif memerlukan perhatian pada pengembangan profesionalnya sebagai faktor yang dapat berkontribusi pada masyarakat yang sehat dan kehidupan yang lebih baik bagi anak didik kita.



# **Bab 9**

## **Pendidikan dan Teknologi Informasi**

### **9.1 Pendahuluan**

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (Wardiana, 2002).

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kini telah mengubah cara pandang dan bertindak masyarakat dalam menghabiskan waktu untuk bekerja dan mengatasi segala

permasalahannya. Muncul paradigma baru dalam masyarakat yang mengekspresikan perubahan baru dalam aktifitas kehidupan masyarakat sebagai dampak dari kemajuan TI. Dengan demikian Dunia pendidikan termasuk yang sangat diuntungkan dari kemajuan TIK karena memperoleh manfaat yang luar biasa. Mulai dari eksplorasi materi-materi pembelajaran berkualitas seperti literatur, jurnal, dan buku, membangun forum-forum diskusi ilmiah, sampai konsultasi/diskusi dengan para pakar di dunia, semua itu dapat dengan mudah dilakukan dan tanpa mengalami sekat-sekat karena setiap individu dapat melakukannya sendiri. Bagi negara-negara maju, pendidikan berbasis TI bukan hal yang baru lagi. Mereka telah terlebih dulu dan lebih maju dalam menerapkan berbagai teknik dan model pendidikan berbasis TIK. Indonesia masih tergolong pemula dalam menerapkan sistem ini. Namun sebagai pemula tentu kita punya kesempatan berharga untuk belajar banyak atas keberhasilan dan kegagalan negara-negara maju yang telah menerapkannya sehingga penerapan pendidikan berbasis TIK di Indonesia menjadi lebih terarah (Asmawi, Syafei dan Yamin, 2019).

## 9.2 Macam-Macam Pendidikan

Dalam pendidikan tidak bisa lepas dengan masalah revolusi metode, kurikulum yang inovatif, teknologi serta SDM yang kritis untuk bisa menghasilkan daya cipta dan hasil kerja sekolah sebagai bentuk perubahan. Sekolah harus mempunyai orientasi bisnis pelanggan yang memiliki daya saing global. Untuk itu ada lima teknologi baru yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.

Menurut Andri dan SP (2017) ada lima macam Teknologi, yaitu:

1. Teknologi yang pertama : Sistem berpikir Sistem berpikir menjadikan kita untuk lebih hati-hati dengan munculnya tiap mode di dunia pendidikan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan yang tidak kita inginkan. Tanpa sistem berpikir kita akan sulit untuk mengadakan peningkatan riil di bidang pendidikan. Jadi sistem berpikir menghadirkan konsep sistem yang umum, di mana berbagai hal saling terkait.

2. Teknologi yang kedua: Desain sistem Desain sistem adalah teknologi merancang dan membangun sistem yang baru. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang cepat yang meningkatkan harapan. Desain sistem memberi kita peralatan untuk menciptakan suatu sistem yang baru dan suatu strategi untuk perubahan.
3. Teknologi yang ketiga: Kualitas pengetahuan Mutu atau kualitas pengetahuan merupakan teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa/ layanan yang sesuai harapan dan pelanggan. Ilmu pengetahuan yang berkualitas telah menjadi alat yang sangat berharga dalam inovasi pendidikan/ sekolah.
4. Teknologi yang keempat : Manajemen Perubahan Manajemen perubahan adalah suatu cara untuk memandu energi kreatif ke arah perubahan positif. Dapat juga diartikan sistem pemikiran yang berlaku untuk aspek manajemen inovasi tentunya dengan berorientasi pada POAC (Perencanaan, Organisasi, Aktualisasi dan Kontrol).
5. Teknologi yang kelima : Teknologi pembelajaran Disini ada dua bagian yaitu peralatan Pelajar elektronik (Komputer, multimedia, Internet,

## 9.3 Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan

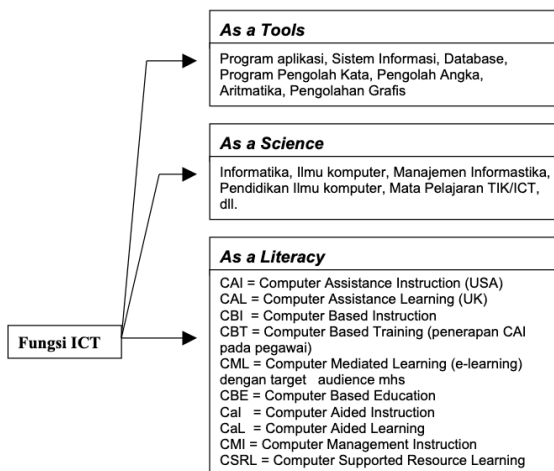
Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pertemuan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih ke arah terbuka. Pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes (fleksibel), terbuka dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Pendidikan masa mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukan berorientasi pada gedung sekolah. Kecenderungan perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan akan terus terjadi dan berkembang dalam memasuki abad ke-21 sekarang ini. Perubahan tersebut antara lain: lebih mudah dalam mencari sumber belajar,

lebih banyak pilihan untuk menggunakan dan memanfaatkan ICT, makin meningkatnya peran media dan multi media dalam kegiatan pembelajaran. Kecendrungan perubahan dan inovasi tersebut, memiliki implikasi yang sangat luas dalam dunia pendidikan, yaitu perubahan dalam program pembaruan dan teknologi pembelajaran, perubahan dalam program belajar dan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimental, pengendalian belajar lebih kepada peserta didik, peningkatan IQ (intelligence quotient) yang diimbangi dengan pembinaan EQ (emotional quotient), dan SQ (spiritual quotient), serta menuntut pengintegrasian TIK dalam kegiatan pembelajaran (Budiman, 2017).

Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki tiga fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu (Riyana, 2008):

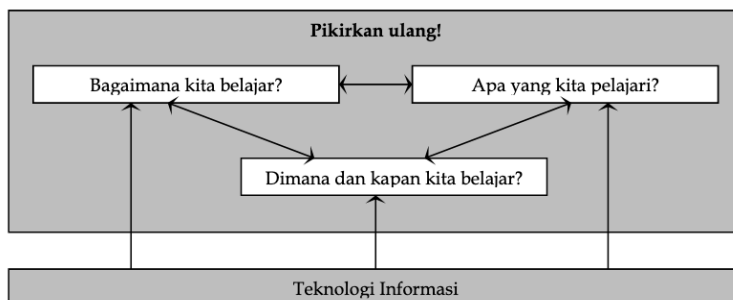
1. Teknologi berfungsi sebagai alat (tools), dalam hal ini TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna (user) atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian, keuangan dan sebagainya.
2. Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (science). Dalam hal ini teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006 terdapat mata pelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa semua kompetensinya.
3. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran (literacy). Dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal ini posisi teknologi tidak ubahnya

sebagai guru yang berfungsi sebagai : fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator.



**Gambar 9.1:** Fungsi TIK (Riyana, 2008)

Sedangkan menurut Resnick (2002) dalam (Wahid, 2005) ada tiga hal penting yang harus dipikirkan ulang terkait dengan modernisasi pendidikan: (1) bagaimana kita belajar (how people learn); (2) apa yang kita pelajari (what people learn); dan (3) kapan dan di mana kita belajar (where and when people learn). Dengan mencermati jawaban atas ketiga pertanyaan ini, dan potensi TI yang bisa dimanfaatkan seperti telah diuraikan sebelumnya, maka peran TI dalam modernisasi pendidikan bangsa dapat dirumuskan. Hubungan antara TI dan reformasi pendidikan secara grafis diilustrasikan pada Gambar 9.2.



**Gambar 9.2:** Intervensi TI dalam reformasi pendidikan (Wahid, 2005)

Sedang pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan yang dijabarkan oleh Husaini (2017) secara garis besar meliputi:

### 1. Manajemen Sistem Informasi

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen. SIM yang baik sangat membantu dalam efisiensi waktu dan materi transaksi-transaksi organisasi serta mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi memungkinkan aliran informasi berjalan dengan cepat dan akurat. Database online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data dengan cepat. Kemudahan ini berarti efisiensi pelaksanaan pendidikan dalam segala hal. Sistem informasi akademik dengan database online di lembaga pendidikan sangat membantu orang tua untuk mendapatkan informasi perkembangan anaknya setiap saat. Data base online memberikan kemudahan-kemudahan informasi bagi peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Keberadaan WEB interaktif Lembaga pendidikan memudahkan komunikasi antar lembaga pendidikan dengan masyarakat pelanggan. Visi, misi dan profil Lembaga pendidikan dengan mudah dapat diketahui oleh masyarakat secara umum, sehingga akan berdampak pada meningkatnya minat masyarakat terhadap lembaga Pendidikan tersebut. WEB akademik memberikan kemudahan peserta didik, dosen, karyawan, orangtua, dan masyarakat, seperti kemajuan-kemajuan akademik peserta didik, perkembangan harian, kewajiban administrasi, pendaftaran mahasiswa baru dan lain-lain.

### 2. E-learning

E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Melalui e-learning belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Belajar mandiriberbasis kreativitas peserta didik yang dilakukan melalui e-learning mendorong peserta didik

untuk melakukan analisa dan sintesa pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi dan pengetahuan sendiri. Peserta didik dirangsang untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. E-learning dilakukan melalui jaringan internet, sehingga sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga siapa saja yang ada diberbagai belahan dunia. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar melalui e-learning diantaranya: e-book, e-library, interaksi dengan pakar, email, mailing list, news group, world wide web (www), dan lain-lain. Situs-situs yang menyediakan e-learning beberapa diantaranya yaitu: educasi.net, ilmukomputer, plasa.com, pintar media.com dan banyak lagi situs lainnya. Pelaksanaan e-learning dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Perguruan tinggi diharapkan mampu untuk menyelenggarakan e-learning sendiri. Secara sederhana e-learning dapat dilaksanakan oleh dosen dengan membuat situs sendiri atau situs perguruan tinggi yang di-link dengan situs-situs yang berkaitan dengan pelajarannya. Situs dapat diisi dengan materi pelajaran yang dapat divisualisasikan, tugas-tugas dan evaluasi.

### 3. Media Pembelajaran

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena penggunaan media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru-peserta didik seperti hambatan fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan.

### 4. Pendidikan Life Skill

Teknologi informasi dengan komputer sebagai jantungnya telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan komputer. Pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan menggunakan komputer terbuka luas. Ketrampilan menggunakan

komputer merupakan salah satu kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan untuk bersaing dalam sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Pendidikan teknologi informasi mengandung kecakapan hidup yang dapat dikembangkan baik specific life skill maupun general life skill. Kecakapan dalam mengoperasikan komputer menggunakan program, baik aplikasi maupun Bahasa pemrograman merupakan kecakapan hidup yang bersifat vokasional. Sementara ketrampilan menggali informasi internet pada internet, mengolah dan memanfaatkannya merupakan general life skill.

# **Bab 10**

## **Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi**

### **10.1 Pendahuluan**

Pendidikan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945 (UUD RI 1945). Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah. Pendidikan tinggi dibentuk dengan mengemban tujuan mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik beserta profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan serta menyebarkan iptek dan kesenian untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (UU Nomor 12 Tahun 2012).

Ada berbagai macam jenis pendidikan tinggi di Indonesia yaitu Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi/Spesialis (UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Pendidikan Akademik merupakan sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu. Program Pendidikan Akademik mencakup program pendidikan Sarjana (S1), Magister atau Master (S2), dan Doktor (S3). Sedangkan Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan keahlian tertentu. Program Vokasi

mencakup program Pendidikan Diploma I (D1), Diploma II (D2), Diploma III (D3), Diploma IV (D4) yang disetarakan dengan Sarjana Terapan dengan gelar S.Tr, dan program Magister Terapan. Untuk program Pendidikan Profesi ditempuh setelah pendidikan S1 diselesaikan di mana bertujuan menguasai skill spesifik dalam menjalani profesi yang relevan.

Pada proses penyelenggaraan pendidikan tinggi terdapat Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang wajib dipenuhi seluruh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya standar-standar yang sudah ditetapkan maka perlu dilakukan kebijakan-kebijakan terkait proses tersebut (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020). Tentunya sebelum kita memahami mengenai implementasi dari kebijakan pendidikan tinggi. Mari kita pelajari terlebih dahulu makna dari kebijakan tersebut. Kebijakan (policy) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan Analisis kebijakan sebagai *the use of reason and evidence* berguna untuk *choose the best policy among a number of alternatives* (Duncan dalam Arwildayanto, Sukung and Sumar, 2018) atau menekankan pada instrumen pemilihan kebijakan yaitu penalaran dan bukti-bukti.

Hal senada dijelaskan analisis kebijakan sebagai penerapan dari disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah publik yang menekankan pada instrumen pemahaman kebijakan yakni aplikasi penalaran. dalam analisis kebijakan menurut (Dunn 2004) ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan empiris, evaluatif dan normatif. Pendekatan empiris bertujuan menjawab permasalahan fakta-fakta, begitu juga pendekatan evaluatif berupaya menemukan nilai atas sesuatu, serta pendekatan normatif sebagai tindakan lanjut atas apa yang mesti dilakukan pimpinan. Ketiga prosedur analisis kebijakan dapat dijelaskan seperti dalam Tabel 10.1.

**Tabel 10.1:** Prosedur Analisis Kebijakan Menurut Waktu Tindakan

Tindakan Kebijakan	Deskripsi	Evaluasi	Rekomendasi
Sebelum Tindakan (ex-ante)	Prediksi	-	Preskripsi
Sesudah Tindakan (ex-pace)	Deskripsi	Evaluasi	-

Analisis kebijakan mendeskripsikan kebijakan yang sedang dan yang akan dilaksanakan sehingga diperoleh gambaran kekurangan dan kelebihan alternatif tersebut, dengan demikian ada lima tahapan analisis kebijakan, perumusan masalah, meramalkan alternatif kebijakan (prediksi), merekomendasikan penerapan kebijakan (preskripsi), Monitoring kebijakan (deskripsi), dan mengevaluasi kinerja kebijakan. Kebijakan Pendidikan Tinggi juga merupakan bagian dari kebijakan publik (Arwildayanto et al. 2018) Hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari area publik. Sebagai contohnya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), kebijakan pengakuan sertifikat akreditasi bagi lulusan perguruan tinggi yang akan melamar kerja, dll. Hal itu tentunya akan berdampak bagi masyarakat umum yang akan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Sehingga untuk memahami kebijakan yang ada di Pendidikan Tinggi maka kita perlu mencermati permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia masa sekarang ini. Pada BAB ini akan dibahas isi permasalahan-permasalahan dalam Pendidikan Tinggi yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan kampus merdeka merdeka belajar yang telah digaungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020.

## 10.2 Isu dan Masalah dalam Pendidikan Tinggi

Permasalahan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan dunia. Masalah pendidikan di Indonesia apabila ditinjau dari sisi kualitas Sumberdaya Manusia masihlah jauh bila dibandingkan dengan negara- lain. Berdasarkan data *World Education Ranking* yang diterbitkan *Organisation for Economic Co- operation and Development* (OECD), di posisi mana suatu negara maju dalam segi pendidikan. Organisasi ini menentukan peringkat negara mana yang terbaik dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Indonesia menempati urutan ke 69 dari total 75 negara. Berdasarkan laporan OECD, posisi tertinggi diraih oleh Singapura kedua Hongkong, ketiga Korea Selatan dan keempat Jepang (Kurniawan 2016).

Untuk mengatasi masalah SDM di Indonesia, transformasi pendidikan merupakan suatu keniscayaan karena dengan ini pendidikan manusia

Indonesia seutuhnya dapat terlaksana. Dengan terlaksananya pendidikan manusia seutuhnya, pendidikan akan mampu mencetak anak-anak bangsa yang potensial dan siap berperan aktif dalam masyarakat dunia. Sebagai generasi yang potensial, empat pilar pendidikan dapat terintegrasi dalam diri mereka yang nantinya memberikan kesejahteraan bagi kehidupan mereka di masa depan. Menurut UNESCO empat pilar tersebut adalah: *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together* (Widodo 2016).

Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia yaitu adanya Revolusi Industri 4.0 yang mulai beralih dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin, serta diikuti teknologi digital dalam berbagai pemasaran produk-produk industri. Sebanyak 75-375 juta orang beralih profesi (McKinsey 2019). Oleh karena itu lulusan perguruan tinggi harus menguasai kemampuan/skill baru. Literasi yang harus dikuasai oleh mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia yaitu terkait dengan peningkatan tenaga kerja dengan teknologi digital (Parray 2017). Literasi baru tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.1



**Gambar 10.1:** Kompetensi Revolusi Industri 4.0 (Ahmad 2018)

Literasi baru yang dibutuhkan untuk menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 yaitu literasi data (kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan big data), literasi teknologi (memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi), literasi manusia (humanities, komunikasi dan desain). Literasi Manusia menjadi bagian dari General Education yang harus dikuasai manusia, biasanya didapatkan dari pengalaman ekstra kurikuler (Suryadi 2020).

Adanya tuntutan dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 tersebut serta kliterasi baru yang harus dikuasai mahasiswa, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar pada Tahun 2020. Kebijakan tersebut terlihat pada Gambar 10.2.



**Gambar 10.2:** Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (Junaidi 2020)

Kebijakan tersebut diantaranya terkait dengan pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum serta hak belajar tugas semester di luar program studi. Setiap kebijakan yang diambil terdapat dasar hukum yang mendasari serta implementasi yang berbeda di masing-masing perguruan tinggi. Setiap kebijakan akan dijelaskan pada sub-sub bab berikutnya.

## 10.3 Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Pembukaan Program Studi Baru

Kebijakan pembukaan program studi baru sekarang lebih fleksibel. Hal ini ditujukan agar program-program studi baru yang ditujukan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun dasar hukum pembukaan program studi baru terdapat dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Program studi baru yang didirikan nantinya juga

sudah memiliki akreditasi. Hal tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Secara umum terdapat lima bentuk usul pembukaan program studi yang diatur dalam aturan tersebut yaitu:

1. Pembukaan program studi akademik bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi;
2. Pembukaan program studi akademik sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
3. Pembukaan program studi akademik sebagai penambahan program studi akademik bersamaan dengan penambahan nama (nomenklatur) program studi akademik;
4. Pembukaan program studi akademik bersamaan dengan proses perubahan perguruan tinggi swasta yang berupa penggabungan, penyatuan, dan perubahan bentuk;

Pembukaan program studi akademik (selain program studi bidang kesehatan dan kependidikan) oleh perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Baik Sekali, akreditasi Unggul, akreditasi B, dan akreditasi A melalui kerjasama. Terkait pembukaan program studi melalui kerjasama, pada pasal 36 ayat (2) Permendikbud No. 7 Tahun 2020, disebutkan bahwa selain memenuhi syarat minimum akreditasi, juga telah melakukan perjanjian kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran; dan menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan Program Studi pada dunia kerja atas penyelenggaraan Program Studi yang baru dibuka.

Merujuk pada Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ institut /Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;

3. Pembukaan program studi pendidikan sarjana akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan matematik (STEM);
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi: daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Adapun pembukaan program studi baru tersebut secara keseluruhan menurut Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 24 harus memenuhi 8 syarat berikut:

1. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dosen paling sedikit berjumlah lima orang untuk satu program studi di kampus utama, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Pada program doktor memiliki paling sedikit dua orang calon dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi;
4. Pada program doktor terapan memiliki paling sedikit dua orang calon dosen tetap dengan jabatan akademik doktor/doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi;
5. Untuk dosen yang dimaksud bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 jam per minggu;
6. Penempatan dosen dan tenaga kependidikan pada program studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Persetujuan Badan Penyelenggara ini untuk pembukaan program studi pada PTS; dan
8. Program Studi dikelola oleh unit pengelola program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut: Pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara. Untuk pemenuhan

syarat minimum akreditasi di atas harus dimuat dalam dokumen usulan pembukaan Program Studi pada PTN atau PTS yang relevan.

Berdasarkan kebijakan tersebut perlu kiranya perguruan tinggi akademi dan perguruan tinggi vokasi ketika mengajukan pendirian program studi baru selain memiliki jumlah dosen minimal yang disyaratkan dalam peraturan juga menyiapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Hal ini memberikan makna bahwa siklus penjaminan mutu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) harus berjalan pada perguruan tinggi yang akan mengajukan program studi baru. Selain itu perlu kiranya penamaan program studi baru disesuaikan dengan program studi yang ada di perguruan-perguruan tinggi di luar negeri. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa lulusan yang ingin melanjutkan studi di luar negeri tidak kesulitan menentukan jurusan yang dipilihnya karena sudah relevan dengan program studi yang ditempuh sebelumnya.

## 10.4 Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Kebijakan sistem akreditasi perguruan tinggi dan program studi diatur dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020. Di mana terjadi perubahan dengan sistem akreditasi sebelumnya yang lebih sederhana. Salah satu kebijakan yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi.

Kebijakan ini berkaitan dengan beberapa hal berikut:

1. Program re-akreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama lima tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis.
2. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional.

3. Pengajuan re-akreditasi PT dan program studi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir. Hal itu berlaku untuk mengajukan peningkatan bagi perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C.

Perlu kebijakan yang berkelanjutan dari perguruan tinggi masing-masing untuk peningkatan mutu sehingga akreditasi dapat dipertahankan atau ditingkatkan dengan mengacu pada 9 kriteria yang ditetapkan oleh BAN PT misalkan dengan beberapa langkah berikut:

1. Adanya peningkatan kualitas SDM bagi dosen dan tenaga kependidikan melalui pendidikan pada jenjang S3 dan pelatihan-pelatihan kompetensi di bidangnya, serta magang-magang di industri.
2. Adanya implementasi kerjasama antara induk dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Hal itu dapat ditempuh melalui kerjasama dalam pendidikan (Joint Lecturer), penelitian yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang dihadapi saat ini. Selain kegiatan tri dharma perguruan tinggi juga dapat dilakukan kerjasama untuk penyerapan alumni (mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi tersebut).
3. Adanya perbaikan serta peningkatan sarana prasarana laboratorium atau bengkel sebagai tempat praktikum mahasiswa agar ketika memasuki dunia kerja dan industri, mahasiswa lebih siap.
4. Perlunya peningkatan kemampuan dosen untuk publikasi baik lokal maupun tingkat internasional melalui pelatihan-pelatihan pembuatan artikel ilmiah. Kegiatan publikasi dosen dan mahasiswa dapat membantu memperkenalkan kemampuan SDM baik secara nasional maupun internasional, sehingga menemukan ekosistem riset yang tepat dan saling dukung antar perguruan tinggi di dalam dan di luar Indonesia.
5. Perbaikan tata pamong dan tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Salah satu contohnya misalkan dahulu tidak dibutuhkan unit kerjasama yang mengelola kerjasama perguruan tinggi tersebut dengan pihak lain. Namun dalam adanya Era Revolusi

Industri 4.0 unit ini sangat dibutuhkan untuk menghubungkan perguruan tinggi tersebut dengan pihak IDUKA, pemerintahan, dan perguruan tinggi lain.

## 10.5 Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kebijakan pendidikan tinggi yang berbentuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum diatur dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Serta Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Adanya kebijakan kampus merdeka yang terkait dengan kebebasan bagi PTN Badan layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan hukum (PTN BH). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan lebih mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Adapun persyaratan PTN menjadi PTN BH yang terdapat dalam Pasal 2 permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 ada 5 yaitu:

1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu. Penyelenggaraan tri dharma yang bermutu dinilai dari beberapa hal yaitu 60% program studi dengan peringkat akreditasi unggul; relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual; mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional; partisipasi dalam kegiatan Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat.
2. Mengelola organisasi PTN berdasarkan tata kelola yang baik. Pengelolaan tata kelola yang baik dinilai dari beberapa hal yaitu akuntabilitas pengelolaan PTN; transparansi, efektivitas, efisiensi

dalam pengelolaan PTN; nirlaba dalam pengelolaan PTN; ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN; periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik PTN.

3. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial. Suatu PTN memenuhi standar minimum kelayakan finansial menjadi PTN BH apabila pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan; laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.
4. Menjalankan tanggung jawab sosial. Penilaian suatu PTN telah menjalani tanggung jawab sosial dinilai dari pTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa; dan PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.
5. Berperan dalam pembangunan perekonomian. Peranan PTN dinilai telah melakukan peranannya dengan baik dalam pembangunan perekonomian yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah; pengembangan dunia usaha dunia industri; menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa.

## 10.6 Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Hak Belajar di Luar Program Studi

Pendidikan kita saat ini sudah masuk kedalam era society 5.0, di mana dalam era ini masyarakat diarahkan berpusat pada keseimbangan. Internet tidak hanya sebagai informasi melainkan untuk menjalani kehidupan, sebuah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri dan perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada

manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari (Puspita et al. 2020). Hak belajar di luar program studi ini sesuai dengan kondisi masing-masing program studi dengan memperhatikan Standar Nasional Perguruan Tinggi dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hak belajar diluar kampus ini tidak dipaksakan kepada mahasiswa yang menempuh studi. Namun program studi memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan, keterampilan serta pengalamannya di dunia industri dan dunia kerja. SKS yang ditempuh mahasiswa diluar program studi sebanyak 3 semester disetarakan dengan 60 sks dengan sebaran 20 sks di program studi yang berbeda di dalam kampusnya. Sedangkan 40 sks di luar perguruan tingginya setara 2 semester.

Adapun perubahan makna sks yaitu (Dirjen Dikti Kemendikbud 2020).

1. Setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”.
2. Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktek kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
3. Definisi “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan diluar kampus asal, oleh mahasiswa yang melakukan kegiatan merdeka belajar dapat dilihat pada Tabel 10.2

**Tabel 10.2:** Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Asal

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1	Magang/praktek kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
2	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparaturnya desa, BUMDes, Koperasi atau organisasi lain

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil	Program yang difasilitasi Kemendikbud
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian/ riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan oleh lembaga riset seperti LIPI/BRIN
6	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen	Wajib dibimbing seorang dosen/pengajar
7	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing seorang dosen/pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Organisasi formal yang disetujui oleh Rektor antara lain Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dll



# Bab 11

## Implementasi Kebijakan

### 11.1 Pendahuluan

Kehadiran dan keberadaan sektor pendidikan memiliki peranan dan sumbangan bagi pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah atau suatu pemerintahan. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan keberadaan penguatan nilai pengetahuan, ilmu pengetahuan dan nilai kognitif, nilai afektif, nilai psikomotorik dan berbagai nilai lainnya. Penguatan sumbangan sektor pendidikan dapat dilihat dari pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia dalam suatu daerah/wilayah tertentu. Kebijakan pendidikan diterbitkan atau dikeluarkan organisasi pendidikan dari suatu organisasi pemerintahan baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Nasional.

Kehadiran dan kelahiran kebijakan pendidikan melalui berbagai proses panjang dari mulai mengidentifikasi data dan informasi kebutuhan pendidikan, memproses data dan informasi itu sesuai dengan sarana dan prasarana serta prosedural organisasi, menghasilkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, kemanfaatan kehadiran kebijakan pendidikan itu bagi masyarakat, masukan dan ide pemikiran masyarakat atas kekurangan dan kelebihan kebijakan pendidikan itu dan terakhir masuk kembali kedalam penjarangan data dan informasi dan selanjutnya mengikuti mekanisme sistematika alur kebijakan khususnya sektor pendidikan.

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya memberikan dorongan besar bagi perubahan dan dinamika implementasi kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan. Dinamika dan perubahan lingkungan eksternal adalah contoh aktual dari bagaimana melaksanakan kebijakan pendidikan yang responsif dan adaptif terhadap situasi dan kondisi perubahan dan perkembangan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal di mana kebijakan pendidikan akan dilaksanakan. Kemampuan melaksanakan kebijakan pendidikan yang adaptif dan responsif akan memberikan peluang dan kesempatan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan yang mungkin dilakukan dari berbagai faktor kebijakan pendidikan tersebut.

Perkuliahan daring melalui berbagai aplikasi teknologi adalah contoh faktual dari perubahan kebijakan pendidikan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal yang dihadapinya. Dalam ruang perencanaan dikenal adanya rencana kontigensi yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi pengambil kebijakan itu sendiri. Kebijakan pendidikan mengenai ujian akhir menjadi asesmen berbasis sekolah bagi peserta didik sekolah lanjutan atas (SMA misalnya) adalah contoh lain dari kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan memperhatikan berbagai faktor yang diambil para pengambil kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan tidak berada dalam suatu ruang hampa yang tidak bisa disesuaikan karena perubahan dan perkembangan lingkungan yang tidak bisa diprediksi atau bersifat cepat. Kemampuan adaptif dan responsif kebijakan pendidikan menjadi barometer keberhasilan mencapai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kehadiran pelaksanaan kebijakan pendidikan akan membuat rencana sebelumnya menjadi konkret dan dapat dirasakan masyarakat atau objek dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Kehadiran dimensi implementasi dalam kebijakan pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan dimensi perencanaan, dan dimensi monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Dimensi perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan monitoring dan evaluasi adalah satu kesatuan dalam proses dan mekanisme serta prosedural kelahiran atau keberadaan kebijakan pendidikan.

Kemampuan pengambil kebijakan pendidikan dalam kegiatan merencanakan akan terwujud dalam kegiatan pelaksanaannya. Profesionalitas dan akuntabilitas sumber daya pendidikan (baik pendidik mau tenaga kependidikan) menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan kebijakan

pendidikan mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sumber daya manusia pendidikan yang harus mendapatkan prioritas dalam pengembangan dan penguatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Penguatan dan pengembangan partisipasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan garda terdepan dalam proses transformasi perilaku dan tindakan kepada peserta didik. Keluwesan, kreativitas, dan inovasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi nilai utama dalam proses belajar mengajar yang berlangsung pada khususnya dalam kebijakan pendidikan pada umumnya.

Transformasi nilai dari pendidik kepada peserta didik memberikan energi besar dalam proses menganalisa kebijakan pendidikan khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Berbagai indikator keberhasilan kegiatan perencanaan pendidikan akan diterjemahkan dan dioperasionalisasikan maksimal oleh sumber daya pendidikan. Sebagai contohnya adalah kegiatan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi pendidikan misalnya. Kegiatan tersebut diterjemahkan sumber daya manusia pendidikan dengan profesional dan akuntabel sehingga dalam ruang proses memantapkan data dan informasi akan terbit suatu hasil yang dapat dihasilkan organisasi pendidikan itu misalnya.

Pada umumnya, keberadaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana menjadi masalah klasik yang selalu muncul dalam setiap mendiskusikan kebijakan pendidikan. Sebagai contohnya adalah keberadaan sekolah yang jauh dari jangkauan moda transportasi dan alat telekomunikasi. Keberadaan sarana dan prasarana menjadi permasalahan utama yang dihadapi sekolah tersebut. Agenda setting kebijakan pendidikan yang diambil pengambil kebijakan pendidikan akan sampai pada suatu titik bahwa dibutuhkan dukungan dan penguatan sarana dan prasarana atau paling tidak diberikan dispensasi atau kemudahan atau ada ayat khusus bagi daerah tertentu bila dalam suatu norma perundangan misalnya. Hal demikian itu menjadi dimaklumi karena suatu daerah/wilayah pemerintahan tidak memiliki wilayah topografi, demografi dan sebagainya menjadi suatu kenyataan yang harus dihadapi dari suatu produk kebijakan pendidikan misalnya.

## 11.2 Peranan dan Keberadaan Implementasi Kebijakan

Kegiatan melaksanakan atau mengimplementasikan dilaksanakan setelah kegiatan merencanakan telah selesai dilakukan. Pada hakekatnya, berbagai kegiatan atau program yang telah direncanakan itu menjadi landasan operasional dari kegiatan implementasi itu sendiri. Demikian juga dengan implementasi kebijakan pendidikan akan menerjemahkan dan mengoperasionalkan kegiatan dan program pendidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Kehadiran kebijakan pendidikan memiliki peranan dan sumbangan besar kepada keberhasilan pendidikan daerah karena kebijakan pendidikan telah melewati berbagai proses panjang sebelum diterbitkan dalam suatu kebijakan pendidikan daerah.

Berbagai stakeholder pendidikan telah dilibatkan dalam rapat, sosialisasi, komunikasi dan berbagai kegiatan lainnya sebelum diterbitkannya kebijakan pendidikan itu sendiri. Merencanakan pendidikan daerah atau pendidikan pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan karena masyarakat menjadi objek dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Berbagai kelompok kepentingan dilibatkan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Membicarakan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang pekerjaan umum dan bidang pembangunan daerah lainnya.

Sebelum kebijakan pendidikan diterbitkan pastilah melewati proses perencanaan yang mengikuti serta semua pemangku kebijakan pendidikan itu sendiri. Pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan masyarakat peduli pendidikan seperti komite sekolah, dan sebagainya turut serta dalam pembahasan rencana kerja bidang pendidikan yang akan dirancang bangun sebelum dibuat dalam suatu dokumen perencanaan pendidikan. Dokumen perencanaan pendidikan merupakan dokumen perencanaan yang melibatkan semua pemangku pendidikan sehingga pada saatnya terbina komunikasi dan sinergitas dalam implementasi kependidikan itu sendiri.

Mengimplementasikan atau melaksanakan berbagai program dan kegiatan harus melibatkan pemangku kepentingan sehingga mereka memiliki komitmen dan konsistensi dalam gerak pelaksanaannya. Melibatkan partisipasi berbagai pihak merupakan cara elegan dalam membangun komunikasi sinergis

dalam menerjemahkan rencana yang telah terdokumentasi dalam grand design pembangunan pendidikan daerah. Mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri karena bidang pendidikan adalah salah satu bidang dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah karena itu komunikasi perangkat daerah menjadi suatu kata kunci keberhasilan pembangunan pendidikan daerah sehingga visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan dapat mencapai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Mengimplementasikan kebijakan pendidikan tentunya didasarkan kepada rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Misalnya pembangunan gedung sekolah vokasi daerah, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan sumber daya daerah yang berkenaan dengan sekolah vokasi yang akan didirikan. Sumber daya daerah menjadi pedoman penting dalam merancang bangun sekolah vokasi daerah. Mengimplementasikan kebijakan pendidikan daerah memperhatikan banyak faktor sehingga dapat efektif dan efisien dalam pencapaian visi dan misi daerah. Sebagai salah satu faktor, sumber daya daerah maka analisa potensi daerah yang terdokumentasi dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi kata kunci penting dalam merencanakan kegiatan apa saja yang dapat membangun pendidikan daerah untuk jangka waktu tertentu.

Faktor kedua adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif sesuai dengan proses penerimaan dan penempatan pegawai dalam struktur organisasi pendidikan daerah. Menempatkan pegawai sesuai dengan pendidikan, pengalaman, keterampilan dan karakternya menjadi elemen penting dalam menyusun rencana kerja pembangunan pendidikan daerah yang sesuai dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi pemerintah daerah. Siapa saja yang melaksanakan kegiatan pembangunan pendidikan daerah harus memahami tugas, fungsi dan kewenangan yang menjadi landasan pokok melaksanakan tugasnya. Sebagai contohnya, kegiatan pembangunan pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan tidak berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota karena sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Dengan dasar pemahaman seperti itu maka landasan utamanya adalah pemahaman tugas dan kewenangan yang akan dilaksanakan.

Faktor lainnya adalah keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki daerah sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan terukur dan terarah kepada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberadaan

implementasi pendidikan sangat krusial dan sangat perlu diberdayakan gunakan karena bagaimana mungkin suatu kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuannya tapi tidak dilaksanakan dengan maksimal. Dokumentasi perencanaan pembangunan daerah menjadi modal besar dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Mengimplementasikan mengandung makna bahwa perencanaan kebijakan pendidikan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal hal apa saja yang akan dilaksanakan sangat tergantung kepada dokumentasi rencana pembangunan pendidikan yang telah disusun sebelumnya.

Dokumentasi perencanaan pembangunan pendidikan itu merupakan produk dari masukan, kritik saran, pandangan dan partisipasi semua pemangku kebijakan pendidikan. Dalam mengimplementasikan kebijakan adalah lanjutan dari kegiatan yang telah didokumentasikan tadi. Tahapan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan itu yang menjadi paham diskusi panjang karena menyangkut berbagai pihak dan berbagai sumber daya yang mendukungnya. Pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran sekolah dari rumah sebagai contohnya. Kesiapan orang tua murid juga sangat perlu diperhatikan karena fungsi mengajar juga diperanakan orang tua murid misalnya murid sekolah dasar.

Sarana dan prasarana penunjang juga harus diperhatikan agar efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran tidak jauh melenceng dari kurikulum pembelajaran yang telah ada. Efisiensi penggunaan sumber daya organisasi juga perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan mendapatkan dukungan pendanaan, dukungan pegawai yang profesional, dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya itu menjadi sangat penting diperhatikan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan daerah. Kinerja organisasi pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menjadi barometer efektivitas dan efisiensi pembangunan pendidikan daerah. Banyak pertanyaan yang akan muncul bila kinerja organisasi yang rendah tapi pelaksanaan kegiatan dapat berhasil maksimal. Maksimalisasi fungsi dan kewenangan organisasi pendidikan menjadi sangat penting karena kinerja organisasi itulah yang mengujudnyatakan kewenangan itu mencapai sarana yang telah direncanakan sebelumnya.

Keberadaan implementasi kebijakan pendidikan memiliki peranan dan sumbangan yang besar kepada keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan adanya implementasi (pelaksanaan) maka program dan

kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan adanya pelaksanaan atau implementasi dapat diketahui bahwa apa saja dari program dan kegiatan yang belum dapat dicapai, apa kendalanya, apa masalahnya, apakah program dan kegiatan itu tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang dihadapi atau apa saja yang perlu diperbaiki atau diperhatikan. Ibarat kata pepatah bahwa kita jalan dulu baru kita tahu di mana kekurangan kita. Demikian pula dengan implementasi kebijakan pendidikan adalah barometer keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan. Tidak mungkin direncanakan program dan kegiatan pendidikan vokasi (misalnya) dengan tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan vokasi tersebut sebagai contohnya. Melalui kegiatan implementasi pendidikan daerah misalnya, maka dapat diketahui bahwa kualitas dan kuantitas perencanaan pendidikan yang dihasilkan pengambil kebijakan pendidikan itu.

Hubungan erat antara perencanaan dan implementasi menjadi pusat perhatian dari keberadaan dan peranan implementasi pendidikan itu sendiri. Hubungan yang saling melengkapi dan saling mendukung tersebut akan memberikan petunjuk dan identifikasi keberhasilan perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan. Kehadiran implementasi kebijakan akan memberikan gambaran atau indikasi keberhasilan perencanaan pendidikan yang dilakukan. Sumber daya daerah atau kewilayahan menjadi salah satu dasar menyusun rencana kerja pembangunan pendidikan daerah. Kehadiran sumber daya daerah adalah bagian penting dalam keberadaan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan itu sendiri. Kualitas dan kuantitas perencanaan akan terlihat dan tergambar dari kegiatan implementasi yang dilakukan. Perbaikan dan monitoring serta evaluasi kebijakan menjadi salah satu energi perbaikan yang dibutuhkan organisasi pendidikan.

Organisasi pendidikan daerah atau pusat membutuhkan kehadiran implementasi kebijakan pendidikan sehingga dapat terlihat seberapa besar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan seberapa besar yang dapat diperbaiki atau disesuaikan kembali sesuai dengan perubahan dan perkembangan lingkungan organisasi. Melalui dokumentasi program dan kegiatan pendidikan yang ada, dapat dianalisa faktor penghambat dan faktor pendorong untuk mensukseskan kebijakan pendidikan yang telah direncanakan tersebut. Untuk itu maka dokumentasi perencanaan pembangunan pendidikan adalah dokumentasi yang telah disusun dan dianalisis sesuai dengan berbagai faktor yang diputuskan pengambil kebijakan

pendidikan. Kuantitas dan kualitas program dan kegiatan pendidikan dalam dokumentasi perencanaan pembangunan pendidikan daerah menjadi elemen dasar dalam melaksanakan dan mengevaluasi dan memonitoring seluruh kegiatan pembangunan pendidikan daerah.

## 11.3 Keberdayaan Implementasi Kebijakan

Kinerja organisasi pendidikan menjadi landasan penting dalam mengujudnyatakan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melaksanakan kegiatan pendidikan pada hakekatnya adalah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki pegawai organisasi pendidikan. Kinerja pegawai itu pada hakekatnya mengimplementasikan kebijakan pendidikan itu. Sebagai wujud nyata dari kegiatan merencanakan maka akan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Bagaimana memperkuat daya dukung dan daya saing dari melaksanakan pembangunan pendidikan adalah strategi pokok yang harus dilaksanakan organisasi pendidikan itu sendiri. Daya dukung dan daya saing atau daya penguangkit menjadi bagian penting dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Memberdayakan pendekatan sistem dan manajemen baik sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi lainnya adalah teknis operasionalisasi memberdayakan pelaksanaan kebijakan pendidikan itu sendiri.

Memperkuat daya dukung dan daya dorong serta daya saing implementasi kebijakan menjadi suatu kebutuhan dalam dinamika pelaksanaan kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. Bagaimana memberdayakan kegiatan implementasi kebijakan pendidikan adalah pertanyaan besar dalam kebijakan pendidikan daerah. Memberdayakan implementasi kebijakan pendidikan memiliki hubungan dan kaitan dengan kinerja maksimal dari semua pegawai dan unit kerja organisasi pendidikan.

Pelaksana kebijakan pendidikan itu adalah sumber daya manusia baik yang berada diseluruh unit kerja organisasi pendidikan. Memperkuat daya saing dan profesionalitas serta akuntabilitas sumber daya pendidikan akan memberikan energi besar dalam meningkatkan keberdayaan kegiatan implementasi

kebijakan pendidikan. Agenda kebijakan pendidikan disusun berbagai pegawai yang menduduki struktur organisasi pendidikan daerah termasuk organisasi perangkat daerah lainnya. Komunikasi dan sinergitas pemangku kebijakan pendidikan adalah kata kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Membangun komunikasi dan sinergitas baik dalam organisasi internal pendidikan maupun organisasi eksternal pendidikan maka akan diperkuat sektor atau bagian yang lemah dari kegiatan pelaksanaan kebijakan pendidikan itu. Produk membangun komunikasi dan sinergitas itu adalah komitmen dan konsisten dalam membentuk kemitraan kerja misalnya kemitraan pembangunan pendidikan antar beberapa daerah.

Proses pembangunan kemitraan itu akan memperhatikan berbagai faktor dan dimensi yang dapat saling memperkuat dan saling melengkapi. Situasi dan kondisi sumber daya organisasi yang membangun kemitraan pastilah berbeda beda. Melalui kemitraan itu diharapkan kegiatan pembangunan pendidikan dalam berjalan dengan maksimal sesuai dengan rencana kerja pembangunan pendidikan yang ada. Analisis kebijakan pendidikan yang diterapkan suatu organisasi pendidikan dengan organisasi pendidikan lainnya tidaklah selalu sama. Berbagai faktor dan dimensi memberikan sumbangan analisa dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan. Sebagai contohnya adalah keberadaan sumber daya manusia bidang pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan). Kualifikasi tingkatan pendidikan, kuantitas yang dimiliki dan faktor lainnya menjadi pertimbangan dalam menyusun analisis kebijakan pendidikan.

Kehadiran perencanaan yang komprehensif memberikan masukan dan pendapat dari pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan dan pengawasannya semakin mudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut. Berkaitan dengan masukan dari pemangku kepentingan itu, Syafaruddin (2008) mengatakan bahwa “Dengan demikian, mainstream pengaruh masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik berkaitan partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok dalam memenuhi kebutuhan melalui kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mungkin memiliki otonomi bidang pendidikan atau sebagian kebijakan yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat.”

Masukan dan pendapat dari masyarakat menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan pendidikan karena masyarakat menjadi objek dari kebijakan pendidikan itu. Artinya bahwa masyarakat akan merasakan manfaat dari kebijakan pendidikan itu. Mendengar dan memperhatikan masukan dari

masyarakat menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pendidikan. Kehadiran kebijakan pendidikan merupakan bagian penting dalam rencana pembangunan karena masyarakat membutuhkan pelayanan pendidikan. Menghadirkan kebijakan pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja pembangunan yang disusun berdasarkan berbagai masukan dan pendapat dari pemangku kebijakan pendidikan itu sendiri. Berkaitan dengan kebijakan pendidikan, Marto Silalahi, dkk. (2020) mengatakan bahwa “Layanan Pendidikan misalnya, maka organisasi pendidikan daerah akan bekerja sama dengan organisasi pendidikan swasta sehingga kebutuhan layanan pendidikan masyarakat dapat terpenuhi.

Membangun kerja sama dapat dilakukan melalui kerja sama membangun standarisasi pelayanan pendidikan.” Pelaksanaan pelayanan pendidikan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kependidikan itu sendiri. Organisasi swasta juga melakukan kegiatan pendidikan mulai dari pendidikan terendah (pendidikan anak usia dini – PAUD) sampai dengan pendidikan tertinggi (misalnya perguruan tinggi swasta). Kegiatan Pemberdayaan implementasi kebijakan pendidikan dapat juga dilihat dari kemampuan organisasi perangkat pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi pendidikan lainnya.

Kemajuan pelayanan pendidikan dapat dilihat dari berbagai standarisasi pendidikan misalnya standar kelulusan, standar melek huruf dan standar pendidikan lainnya. Keberdayaan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan menjadi salah satu barometer keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan dilaksanakan dapat ditanyakan kepada objek kegiatan pendidikan itu sendiri baik orang tua peserta didik, peserta didik, lembaga pendidikan, masyarakat peduli pendidikan, maupun pihak terkait lainnya. Implementasi kebijakan pendidikan masih bisa diperbaiki lagi sesuai dengan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan pelayanan pendidikan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan rencana pembangunan pendidikan atau tidak.

Tahapan monitoring dan evaluasi menjadi sangat krusial dalam menilai perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan. Pemanfaatan pelayanan pendidikan menjadi dasar membuat indikator keberhasilan agenda penyusunan kebijakan pendidikan. Sebagai contohnya adalah pada tahap perencanaan diuraikan kegiatan mendirikan gedung perpustakaan atau gedung laboratorium tapi dalam kenyataan dilapangan tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung kehadiran gedung perpustakaan atau gedung laboratorium itu. Tahapan monitoring dan evaluasi sangat penting dalam penyusunan agenda

kebijakan pendidikan. Untuk itu adalah wajar bila siklus merencanakan, mengimplementasikan dan monitoring dan evaluasi adalah bagian utama dalam menyusun agenda kebijakan pendidikan.

Kemampuan aparatur pemerintahan menyusun rencana kerja pembangunan (misalnya bidang pendidikan) akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Kinerja maksimal menjadi jalan pendekat dan pengungkit tersedianya rencana kerja pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyerapan data dan informasi kebutuhan masyarakat merupakan salah satu langkah sebelum menyusun rencana kerja pemerintah. Kebutuhan masyarakat merupakan elemen penting dalam penyusunan agenda kebijakan pemerintahan termasuk kebijakan pendidikan.

Kemampuan aparatur menyesuaikan dengan rencana kerja yang menjadi tugas dan kewenangannya. Visi dan misi organisasi dijabarkan terinci kedalam tugas dan kewenangan organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi menjadi bagian penting dalam merinci tugas dan kewenangan organisasi perangkat pemerintahan. Dalam bidang pendidikan misalnya, tugas dan kewenangan yang diberikan diatur dalam norma perundangan. Penguatan organisasi perangkat pemerintah mempermudah dan memperlancar kegiatan pendidikan yang direncanakan sebelumnya. Kemampuan aparatur pemerintah sejatinya dibarengi ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Kegiatan merencanakan, mengimplementasikan dan monitoring dan evaluasi adalah langkah strategis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemerintahan termasuk kegiatan pendidikan. Pemberian tugas dan kewenangan menjadi dasar melakukan kegiatan yang menjadi bagiannya. Adalah wajar bila pembangunan (misalnya bidang pendidikan) mendapatkan perhatian semua pemangku kepentingan pemerintahan. Mengimplementasikan kebijakan tidak semudah membalikan telapak tangan karena memiliki hubungan dengan kegiatan merencanakan program dan kegiatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Kemampuan merencanakan, melaksanakan (mengimplementasikan) dan mengevaluasi kebijakan pendidikan merupakan kegiatan organisasi pendidikan (baik perangkat daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun perangkat Pemerintah Pusat) menjadi kinerja organisasi yang telah mengikuti pedoman dan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan pendidikan memiliki sumbangan besar dalam kegiatan pemerintahan dan

pembangunan. Sebagai salah satu kegiatan pemerintahan daerah maka keberdayaan organisasi menjadi wadah operasional bagi tercapainya rencana kerja bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak bisa dianalisa dan dibahas terlepas dari kebijakan pemerintah secara keseluruhan karena sumber daya pemerintah menjadi faktor utama penggerak keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan pendidikan itu sendiri. Kegiatan organisasi pendidikan akan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan apa saja yang akan ditingkatkan pada periode tertentu. Keterbatasan sumber daya organisasi (misalnya keterbatasan sumber dana) akan memberikan sumbangan besar kepada pencapaian target dan tujuan yang hendak dicapai termasuk bidang pendidikan.

Sebagai contohnya adalah organisasi pendidikan, akan menyusun rencana kerja melalui menganalisa data dan informasi yang diambil dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal. Sebagai contoh adalah pembangunan sekolah dasar akan berkaitan dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar, jumlah ruangan kelas yang akan dibangun dan kegiatan lainnya. Kehadiran data dan informasi tersebut akan mempermudah bagi penyusun rencana kerja pembangunan gedung sekolah dasar (misalnya aparaturnya dinas pendidikan daerah). Data dan informasi yang diperoleh akan didokumentasikan ke dalam dokumen perencanaan bidang pendidikan yang pada akhirnya menjadi pedoman bagi pengambil keputusan bidang pendidikan itu sendiri. Dokumentasi kebijakan pendidikan menjadi sumber data dalam menyusun rencana kegiatan pendidikan dan sinergitas kegiatan pembangunan bidang lainnya.

Mengimplementasikan kebijakan (misalnya pendidikan) tidak bisa dipisahkan dari rencana kerja organisasi bidang pendidikan sebelumnya. Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai data dan informasi yang diperlukan yang telah disusun dalam dokumentasi pembangunan pendidikan. Kegiatan melaksanakan kebijakan pendidikan menuntut pemberdayaan dan partisipasi sumber daya organisasi secara maksimal. Kinerja organisasi pendidikan menjadi motor penggerak keberhasilan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Kinerja organisasi pendidikan (misalnya dinas pendidikan daerah) merupakan operasionalisasi kegiatan unit kerja dalam struktur organisasi pendidikan daerah. Kepala dinas dan perangkat dinas pendidikan daerah merupakan salah satu stakeholder kebijakan pendidikan daerah. Pemberdayaan dan partisipasi pimpinan dan staf dinas pendidikan daerah menjadi faktor utama menggerakkan motor organisasi

pendidikan daerah. Sumber daya dinas pendidikan daerah merupakan sarana dan prasarana yang sangat perlu diperhatikan pengambil kebijakan pendidikan daerah dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing.

Mengimplementasikan kebijakan pendidikan tidak semudah membalikan telapak tangan karena sangat dibutuhkan komunikasi dan koordinasi dalam berbagai hal dan faktor penting lainnya. Keberadaan kegiatan melaksanakan kebijakan pendidikan memberikan gambaran dan indikator keberhasilan pencapaian rencana kerja yang sebelumnya. Komunikasi dan koordinasi kegiatan pembangunan ruang gedung sekolah dasar misalnya akan dilakukan dinas pendidikan daerah dengan dinas pekerjaan umum (misalnya berkaitan dengan akses jalan, sanitasi), dengan dinas pertambangan dan energi dan PLN (misalnya berkaitan dengan keberadaan listrik) dengan dinas perhubungan (misalnya berkaitan dengan alat transportasi) dan sebagainya.

Komunikasi dan koordinasi merupakan wadah dinas pendidikan daerah mengaktualisasi kebijakan pendidikan dengan maksimal. Kehadiran dan keberadaan implementasi kebijakan pendidikan merupakan realisasi dari berbagai rencana kebijakan pendidikan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan implementasi kebijakan pendidikan membutuhkan keberdayaan sumber daya dinas pendidikan daerah misalnya. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi barometer utama keberhasilan kegiatan implementasi kebijakan pendidikan. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan membutuhkan sumber dana yang besar. Data dan informasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi pendidikan daerah (misalnya) harus disesuaikan dengan keuangan daerah karena keterbatasan dana masih fenomena yang dihadapi dinas pendidikan daerah.



# **Bab 12**

## **Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

### **12.1 Pendahuluan**

Monitoring dan evaluasi (pengawasan) kebijakan pendidikan terkait standar nasional pendidikan (standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar evaluasi, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana), sangatlah penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan.

Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda. Monitoring kebijakan pendidikan lebih fokus kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, apabila monitoring dilakukan dengan baik, maka akan bermanfaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman perencanaan program yang telah ditetapkan). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hasil monitoring menjadi masukan bagi kepentingan proses selanjutnya. Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan

pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi kebijakan pendidikan bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lain. Siklus manajemen monev kebijakan pendidikan, fungsi monitoring dan evaluasi merupakan satu di antara tiga komponen penting lainnya dalam sistem manajemen program kebijakan pendidikan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan korektif (melalui umpan balik), sehingga mencapai target dan tujuan program kebijakan pendidikan (Sedarmayanti & Gunawan, 2020).

Kenyataan di lapangan menunjukkan. Pertama, indikasi rendahnya mutu pendidikan di atas diduga karena rendahnya kinerja sekolah, yang dinyatakan dengan rendahnya kualitas program pendidikan (kurikulum dan pembelajaran), inputnya (pengembangan peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan), dan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Faktor-faktor ini menjadi sangat penting berhubungan dengan kinerja sekolah karena merupakan komponen sistem yang utama. Rendahnya kualitas pendidikan, diduga pula karena kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah yang kurang tepat di masa lalu, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan penentu mutu pendidikan (Balitbang Depdiknas, 2007; Syafarudin, 2008; Nurhaeni, 2008; Emzir & Chan, 2010).

Kedua, munculnya kebijakan zonasi untuk pemerataan pendidikan disebabkan karena masalah mendasar pendidikan adalah disparitas mutu dan mutu pendidikan yang tidak merata. Ketiga, konsekuensi adaptasi pendidikan memunculkan adanya pergeseran pendidikan, transformasi pendidikan, fleksibilitas (kelenturan) pendidikan, dan konvertibilitas (pengkonversian) pendidikan (Saryono, 2020).

Keempat, beberapa kebijakan pendidikan Kemendikbud yang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah:

1. Kebijakan Merdeka Belajar;
2. Kebijakan Menghapus Ujian Nasional (UN);
3. Relaksasi Dana BOS;
4. Kurikulum Darurat;
5. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh;
6. Program Organisasi Penggerak;
7. Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak;
8. Asesmen Nasional Maret 2021;

9. Bantuan Kuota Internet;
10. Bantuan Subsidi Upah Guru;
11. Rekrutmen Satu Juta Guru Pada 2021;
12. Pelajar Pancasila;
13. Penyederhanaan (Perubahan) Kurikulum 2021;
14. Komunikasi Kemendikbud dengan Pemangku Kepentingan;
15. Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Januari 2021.

Kelima, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, dunia pendidikan yang mengedepankan pada pengembangan strategi transformasi SDM berkompetensi dan profesional. Keenam, kebijakan strategis bidang pendidikan:

1. Kelembagaan;
2. Bidang studi;
3. Kurikulum;
4. Sumber daya;
5. Pengembangan "cyber university" pada perguruan tinggi;
6. Riset dan pengembangan (Arifin, 2020)

Keenam, pelaksanaan monev masih belum maksimal. Ini disebabkan oleh kurang dipahaminya konsep dan manfaat monev (LPPKS, 2013).

Hasil penelitian Karimi, Mulwa & Kyalo (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan untuk monitoring dan evaluasi sangat memengaruhi kinerja literasi dan program pendidikan numerasi seperti yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi, yang secara statistik signifikan. Pelajar harus mengeksplorasi lebih banyak hal sendiri untuk membuat jawaban prediktif. Dalam penelitian ini keterlibatan stakeholder pendidikan sangat penting dalam melakukan monev kebijakan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas pertanyaan yang muncul adalah:

1. Mengapa monitoring dan evaluasi perlu dilakukan?;
2. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai pelaku kebijakan pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi?

Dalam tulisan ini dibahas hal-hal pokok sebagai berikut: (1) konsep dasar monitoring dalam analisis kebijakan; (2) konsep dasar evaluasi dalam analisis kebijakan; (3) monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan

## 12.2 Konsep Dasar Monitoring dalam Analisis Kebijakan

Monitoring (pemantauan) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Monitoring merupakan sumber informasi utama tentang implementasi. Pemantauan merupakan cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya penjelasan (*designative claims*) tentang tindakan kebijakan di waktu lalu maupun sekarang. Fungsi monitoring dalam analisis kebijakan ada empat yaitu: fungsi kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi dan eksplanasi.

Keempat fungsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama, kepatuhan (*compliance*). Monitoring bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator, instansi pemerintah dan lembaga profesional.
2. Kedua, pemeriksaan (*auditing*). Monitoring membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu (*individu, keluarga, kota, Negara bagian, wilayah*) memang telah sampai kepada mereka.
3. Ketiga, akuntansi. Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Misalnya, perubahan dalam kualitas hidup dapat dipantau dengan indikator sosial tertentu seperti tingkat pendidikan, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, dan tingkat pendapatan.
4. Keempat, eksplanasi. Monitoring menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program

berbeda. Misalnya, eksperimen sosial dalam peradilan pidana, pendidikan, dan kesejahteraan sosial membantu kita menemukan kebijakan dan program apa yang berfungsi secara baik, bagaimana mereka berproses dan mengapa (Dunn, 2000).

Cassely dan Kumar; Clayton dan Petry (Sedarmayanti & Gunawan, 2020), monitoring adalah program yang terintegrasi, bagian penting di praktek manajemen yang baik dan karena itu merupakan bagian integral di manajemen sehari-hari. Monitoring merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program/projek.

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan/atau standar yang telah ditetapkan serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. Monitoring lebih berpusat pada pengontrolan selama program berjalan dan lebih bersifat klinis. Melalui monitoring, dapat diperoleh umpan balik bagi sekolah atau pihak lain yang terkait untuk mensukseskan ketercapaian tujuan. Aspek-aspek yang dicermati dalam monitoring adalah hal-hal yang dikembangkan dan dijalankan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Melalui monitoring akan didapatkan kepastian yang berkaitan dengan tiga hal yaitu:

1. Apakah sumber daya (uang, bahan, alat dan fasilitas yang lain) yang disiapkan cukup untuk melaksanakan program sekolah dan digunakan dengan benar/tepat;
2. Apakah kapasitas SDM sekolah cukup dan tepat untuk melaksanakan program itu;
3. Apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Melalui monitoring yang benar kepala sekolah akan bisa melakukan penyesuaian dan/atau perbaikan sehingga rencana bisa berjalan dengan efektif dan efisien (LPPKS, 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa monitoring dalam analisis kebijakan yaitu. Pertama, monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan

guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan public. Monitoring memungkinkan analisis untuk menjelaskan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasil-hasilnya. Kedua, monitoring menghasilkan pernyataan yang bersifat penandaan setelah kebijakan dan program diadopsi dan diimplementasikan (*ex post facto*), sedangkan peramalan menghasilkan pernyataan yang bersifat penandaan sebelum tindakan dilakukan (*ex ante*).

## 12.3 Konsep Dasar Evaluasi Dalam Analisis Kebijakan

Evaluasi dalam pandangan ahli dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000).

Evaluasi atau penilaian merupakan suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang dinilai biasanya adalah hasil kerja, cara kerja dan orang yang mengerjakannya (Wahab, 2008). Scriven (Supriyono, 2007), evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif sebagai fungsi evaluasi yang utama. Fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan (*improvement*) dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (*program, orang, produk dan sebagainya*). Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi dan lanjutan. Sahertian (1985), evaluasi adalah usaha untuk meningkatkan kualitas kerja dan perbaikan rencana yang bergantung kepada situasi yang melingkupi cara kita berpikir.

Sementara itu, Ametembun (1981b), evaluasi adalah mengadakan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan (*proses*) dan hasil-hasil yang tercapai; dan juga

menilai apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Wrihstone, dkk, Sudjono, Nurkencana, Arikunto (Sedarmayanti & Gunawan, 2020), pengertian evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan kearah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Kedua, evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Ketiga, evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Keempat, evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan evaluasi utamanya adalah untuk; (a) mengetahui tingkat keterlaksanaan program; (b) mengetahui keberhasilan program; (c) mendapatkan bahan/masukan dalam perencanaan tahun berikutnya; dan (d) memberikan penilaian (judgement) terhadap sekolah. Kegiatan evaluasi berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan maka dapat dipahami bahwa tidak hanya siswa yang harus dievaluasi, melainkan semua aspek dalam program kerja sekolah juga mutlak dievaluasi (LPPKS, 2013).

Evaluasi memiliki tujuan:

1. Untuk menilai keefektifan program. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi apakah tujuan program telah tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya;
2. Untuk menunjukkan atau melihat dampak. Melalui evaluasi akan bisa dilihat apakah program kegiatan berdampak pada kualitas sekolah;
3. Untuk memperkuat atau meningkatkan akuntabilitas. Melalui laporan evaluasi, pemangku kepentingan mendapatkan gambaran jelas bahwa sumber daya telah dimanfaatkan dengan tepat dan sesuai peruntukannya;
4. Untuk mendapatkan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pelaksanaan program sekolah yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam pelaksanaan program sekolah tahun berikutnya (LPPKS, 2013).

Dunn (2000); Wahab (2008); Fattah (2012); Amins (2011); Subarsono (2011), evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan adalah:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik;
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. Adapun kriteria evaluasi didasarkan pada tipe-tipe: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Kriteria evaluasi dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 12.1:** Kriteria Evaluasi

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

*Sumber: Dunn (2000),*

Berdasarkan tabel kriteria evaluasi dapat dipahami bahwa tipe kriteria tersebut sangat penting dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan. Hal senada menurut Dunn (2000), pendekatan terhadap evaluasi dapat dibagi menjadi tiga pendekatan.

1. Pertama, pendekatan evaluasi semu. Tujuan dari pendekatan ini yaitu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.
2. Kedua, pendekatan evaluasi formal. Tujuan dari pendekatan ini dengan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.
3. Ketiga, pendekatan evaluasi keputusan teoritis. Tujuan pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa evaluasi dalam analisis kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, evaluasi secara umum memiliki arti penaksiran dan penilaian. Kedua, evaluasi dalam analisis kebijakan berarti pembuatan informasi mengenai seberapa jauh suatu hasil kebijakan memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan dan sarana.

## 12.4 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

### 12.4.1 Manfaat Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Manfaat penerapan sistem monitoring dan evaluasi (monev) dalam suatu program kebijakan pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama, monitoring dan evaluasi (monev) sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Penerapan sistem monev yang disertai

dengan pemilihan dan penggunaan indikator akan memperjelas tujuan serta arah kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut. Pemilihan indikator program yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif tidak saja berguna untuk mendapatkan indikator yang tepat, tetapi juga akan mendorong berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendukung suksesnya program.

2. Kedua, monev sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program. Adanya sistem monev yang berfungsi dengan baik memungkinkan pelaksana program mengetahui kemajuan serta hambatan atau hal yang tidak diduga yang secara potensial dapat menghambat jalannya program secara dini. Hal terakhir bermanfaat bagi pelaksana program untuk melakukan tindakan secara tepat waktu dalam mengatasi masalah. Informasi hasil monev dapat memberi umpan balik kepada pelaksana program tentang hasil capaian program, dalam arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apabila hasil program belum sesuai dengan harapan, maka pelaksana program dapat melakukan tindakan penyesuaian atau koreksi secara tepat dan cepat sebelum program terlanjur berjalan tidak pada jalurnya atau tidak sesuai rencana. Dengan demikian, informasi hasil monev kebijakan pendidikan bermanfaat dalam memperbaiki jalannya implementasi program.
3. Ketiga, monev sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi. Monev tidak hanya memantau aktivitas program, tetapi juga hasil dari aktivitas tersebut. Informasi pemantauan terhadap luaran dan hasil (output dan outcome) program yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan akan meningkatkan akuntabilitas program. Informasi hasil monev dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk advokasi program kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut akan memicu dialog dan pembelajaran serta memacu keikutsertaan (Sedarmayanti & Gunawan, 2020; Dunn, 2000). Hal senada terkait dengan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas program kebijakan contohnya adalah akreditasi.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Beberapa upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru, standar kepala sekolah/madrasah, dan standar nasional pendidikan, dan sistem penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional untuk pendidikan dasar dan menengah.

Lahirnya Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 38 ayat 1-4 tentang kriteria untuk menjadi kepala sekolah dari TK/RA-SMA, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) pasal 50, Ayat 3 menyatakan bahwa” pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional”. Selanjutnya pasal 50 ayat 5 menyatakan bahwa: ” Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang di dalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru, kepala sekolah dan mutu pendidikan.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tersebut terdapat 8 standar dalam penyelenggaraan SMA sebagai lembaga pendidikan formal, yaitu:

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Standar Sarana Dan Prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan;
8. Standar penilaian pendidikan (Yamin, 2006; Mulyasa, 2006; Aqib & Rohmanto, 2007).

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005, menunjukkan bahwa adanya trimatra manajemen mutu pendidikan (meliputi: standar nasional pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, dan akreditasi satuan pendidikan) diharapkan

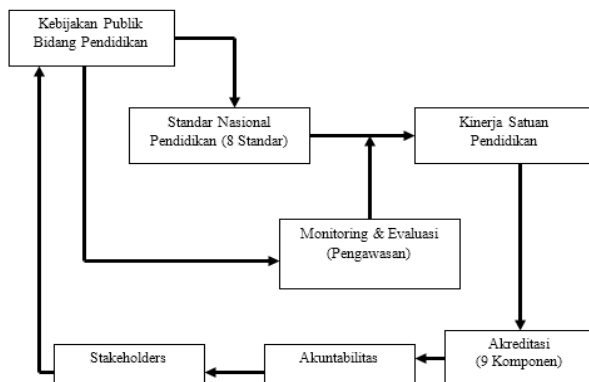
menjadi pilar yang mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, sehingga kompetensi lulusan dapat bersaing baik di tingkat nasional, regional maupun global. Akreditasi satuan pendidikan akan mendorong sekolah untuk mempersiapkan diri, selain untuk evaluasi diri demi kebaikan masa datang juga sebagai alat akuntabilitas publik.

Tujuan akreditasi adalah agar pihak luar, pengguna jasa pendidikan, mengetahui mutu pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik mengetahui mutu sekolah di mana mereka sedang belajar, orang tua mengetahui mutu dan reputasi perguruan di mana anak mereka belajar, pasar atau dunia kerja juga mengetahui kemana mereka harus memilih dan merekrut tenaga kerjanya, lebih dari itu, pemerintah sangat berkepentingan untuk mengetahui, baik langsung maupun tidak langsung, mutu pendidikan nasional (Mastuhu, 2004).

Komponen akreditasi meliputi:

1. Kurikulum dan program pembelajaran;
2. Administrasi dan manajemen;
3. Organisasi kelembagaan;
4. Sarana dan prasarana;
5. Ketenagaan;
6. Pembiayaan;
7. Peserta didik;
8. Peran serta masyarakat;
9. Lingkungan dan budaya (BAN-S/M Depdiknas, 2007).

Adapun tahapan-tahapan dari proses akreditasi sendiri yaitu: (a) evaluasi diri; (b) pengajuan akreditasi; (c) penentuan kelayakan visitasi; (d) pelaksanaan visitasi; (e) penetapan hasil. Sedangkan prinsip akreditasi yang harus dipegang yaitu efektif, efisien, objektif dan mandiri. Adapun pentingnya akreditasi sebagai alat akuntabilitas publik secara konseptual dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 12.1:** Pentingnya Akreditasi Sebagai Alat Akuntabilitas Publik.  
Diadaptasi dari Balitbang Depdiknas (2007).

Akreditasi dapat dilakukan oleh banyak lembaga secara independen atau otonom, baik oleh pemerintah maupun oleh ikatan profesi, atau asosiasi ahli menurut bidang-bidang keahlian. Siklus akreditasi dimulai dari telaah hasil evaluasi diri, yang kemudian dicek di lapangan mengenai kebenarannya. Seperti pada evaluasi diri, akreditasi menggunakan penilai atau asesor yang ahli, baik di bidang institusi manajemen penyelenggaraan sekolah atau perguruan, maupun di bidang studi atau program studi yang diakreditasi. Baik untuk evaluasi diri maupun akreditasi, nilai keberlakuannya hanya berlaku untuk masa-masa tertentu, mengingat perubahan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan berubah dengan cepat. Hasil penilaian akreditasi dapat dijadikan bahan pengawasan, pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah dan pertimbangan oleh para pengguna jasa pendidikan untuk menentukan kerjasama selanjutnya (Mastuhu, 2004).

Lewis & Smith (Rochaety, dkk, 200) mengatakan bahwa ada tiga pendekatan yang digunakan untuk menjamin kualitas lembaga pendidikan yaitu:

1. Pertama, pendekatan akreditasi, berfokus pada input lembaga pendidikan, seperti prestasi siswa, jumlah kelas, dan sumber daya fisik. Asumsi dasar pendekatan ini apabila tersedia input berkualitas tinggi, akan diperoleh hasil output berkualitas tinggi pula. Pendekatan ini memberikan data mengenai apa yang masuk dalam sistem, tetapi hanya sedikit data mengenai apa yang terjadi dalam sistem dan apa yang dihasilkan dari sistem tersebut.

2. Kedua, pendekatan *outcome assessment*, yaitu menekankan pentingnya evaluasi lulusan lembaga pendidikan, seperti prestasi siswa, *graduation*, dan pekerjaan/jabatan.
3. Ketiga, pendekatan sistem terbuka, yaitu merupakan sistem jaminan kualitas terintegrasi bagi lembaga pendidikan. Pendekatan ini menekankan kebutuhan akan kualitas pada tiga tahap utama, yaitu input, proses transformasi, dan output. Upaya penyempurnaan kualitas harus difokuskan pada ketiga tahap tersebut dengan mempertimbangkan tantangan atas perlunya pemenuhan standar kualitas lembaga pendidikan, baik secara nasional maupun internasional.

#### 12.4.2. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Satuan Pendidikan (Sekolah)

Pendidikan dan pembelajaran saat ini mengalami guncangan besar dan mengalami gegar berat harus segera melakukan respon dengan cepat dan tepat. Kebijakan, kerangka dan pemikiran ditinjau kembali sebagai respon (Saryono, 2020). Oleh karena itu kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dan sebagai manajer sekolah perlu memiliki kemampuan adaptif, fleksibilitas dan secara terus menerus melakukan inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan dalam upaya mewujudkan kualitas pendidikan.

Peran kepala sekolah sebagai pelaku kebijakan pendidikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi perlu adanya komitmen dan pemikiran serius dalam mengelola pendidikan, komunikasi, koordinasi, sinergitas dan kolaborasi peran guru, orang tua, masyarakat, lingkungan dan budaya (Arifin, 2020). Dalam melakukan monitoring, kepala sekolah harus melengkapi diri dengan perangkat atau daftar isian yang memuat seluruh indikator program kegiatan sekolah yang harus diamati dan dinilai (LPPKS, 2013). Secara ringkas dapat digambarkan hubungan dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi sebagai berikut.

**Tabel 11.2:** Hubungan dan Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi

Aspek	Monitoring	Evaluasi
Waktu	Terus menerus selama program dilaksanakan	Dilakukan terhadap keseluruhan program setelah program selesai.
Kedalaman dan Tujuan	Merupakan bagian manajemen yang dilakukan secara regular; Fokusnya pada keterlaksanaan program, membandingkan apakah yang terjadi seperti yang direncanakan.	Evaluasi melihat keberhasilan program dan menilai apakah program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.  Evaluasi mengukur capaian, termasuk dampak jangka pendek yang positif maupun yang negative, yang diinginkan maupun yang tidak.  Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan pelajaran dari keberhasilan dan kekurang-berhasilan program dan untuk menemukan praktik terbaik yang bisa diterapkan di tempat lain.
Pelaku	Biasanya dilakukan oleh orang yang terlibat langsung dalam sebuah program	Sebaiknya dilakukan oleh pihak lain yang tidak punya kepentingan dengan program tersebut.
Hubungan antara monitoring dan evaluasi	Data yang terkumpul dan kesimpulan yang diperoleh selama proses monitoring menjadi masukan dan digunakan dalam proses evaluasi.	

Sumber: LPPKS (2013)

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, kepala sekolah sebagai aktor (pelaku) dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan perlu memperhatikan dan memberdayakan ekosistem pendidikan.

1. Pertama, perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang meliputi:
  - a. Kebijakan pendidikan di satuan pendidikan (sekolah);
  - b. Penyelenggara pendidikan yaitu meliputi swasta/yayasan; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) termasuk peraturan daerah (Perda).
2. Kedua, perlu memperhatikan:
  - a. Pengalaman hidup siswa;
  - b. Supervisi sekolah yang dilakukan pengawas;
  - c. Lingkungan keluarga peserta didik;
  - d. Politik global, nasional dan lokal.
3. Ketiga, perlu memperhatikan regulasi implementasi kebijakan pada kementerian yang meliputi: Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan/RB tentang rekrutmen ASN dan Kemendagri.
4. Keempat, perlu memperhatikan:
  - a. Kegiatan ekstrakurikuler;
  - b. Praktik pembelajaran yang dilakukan guru;
  - c. Komunikasi dan interaksi antar warga sekolah (karyawan, satpam, petugas kebersihan, pengelola kantin dan lain-lain);
  - d. Pembiasaan dan budaya (symbol, diksi, norma-norma);
  - e. Lingkungan sekitar sekolah dan masyarakat lokal (Koesoema, 2020).

Hal senada dengan pendapat di atas, kepala sekolah sebagai aktor (pelaku) kebijakan pendidikan diharapkan dapat: (1) memengaruhi public-siswa, orang tua, guru, masyarakat dan stakeholder pendidikan; (2) memantau peristiwa, keputusan kebijakan, tren, dan masalah pendidikan; (3) memantau dan menanggapi aktivitas kebijakan nasional, daerah dan lokal yang berkaitan dengan pendidikan (Kaluge, 2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan, melakukan identifikasi permasalahan serta memberikan antisipasi/upaya penyelesaian masalah terkait dengan kegiatan, program, dan kebijakan pendidikan.

Monitoring menjawab pertanyaan:” Apa yang terjadi, bagaimana dan mengapa”. Evaluasi menjawab pertanyaan”Perbedaan apa yang terjadi”. Dalam implementasi monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.

1. Pertama, kepala sekolah/madrasah sebagai pelaku kebijakan pendidikan di satuan pendidikan perlu memperhatikan:
  - a. prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan
  - b. supervisi sekolah yang dilakukan pengawas baik supervisi akademik (pendidik) maupun supervisi manajerial (tenaga kependidikan)
  - c. Lingkungan keluarga peserta didik
  - d. regulasi implementasi kebijakan pada masing-masing Kementerian yang meliputi: Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan/RB dan Kemendagri
  - e. kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan sekolah
  - f. praktik pembelajaran yang dilakukan guru
  - g. komunikasi dan interaksi antar warga sekolah) pembiasaan dan budaya sekolah serta lingkungan sekitar sekolah dan masyarakat lokal.
2. Kedua, monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif, sistematis, terencana, terprogram dan berkesinambungan dengan berbasis pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.



# **Bab 13**

## **Penelitian Kebijakan Pendidikan**

### **13.1 Pendahuluan**

Produk dari setiap proses kebijakan publik adalah seperangkat arah dan langkah menyelesaikan masalah publik. Berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan yang merepresentasikan dari berbagai kepentingan. Studi kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan untuk mengeksplorasi tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, mengapa tindakan itu dilakukan atau justru tidak dilakukan, dengan cara dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat, dan dampaknya. Sama halnya dengan dunia pendidikan di mana hal tersebut merupakan bagian dari proses dan produk dari sebuah kebijakan.

Dalam dimensi filsafat pendidikan menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi sekelompok manusia untuk dapat berkembang selaras dengan keinginannya untuk meningkatkan harkat, martabat dan budaya dalam membangun kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh mereka. Tentu saja hal ini dalam membangun konsep pendidikan tidak dapat

dilepaskan dari penjaminan terhadap mutu dan kualitas yang dibentuk dalam pendidikan.

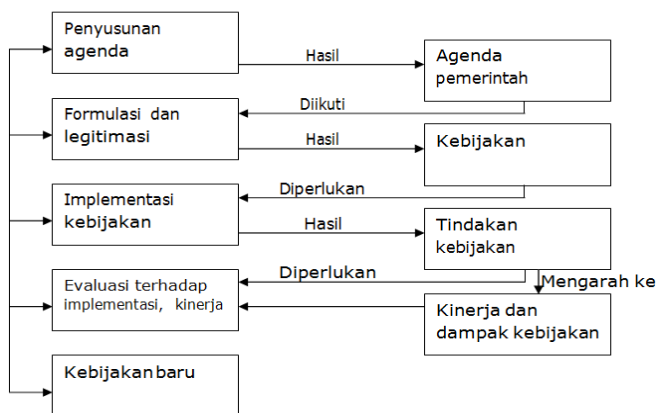
Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan penentuan kurikulum pendidikan atau kurikulum berdasarkan kompetensi dan karakter. Berbagai isu lainnya semisal CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan isu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) serta UU tentang Pendidikan Tinggi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Beberapa hal tersebut memiliki korelasi terhadap konsep dan keberlangsungan pendidikan dan kebijakan karena mendasarkan pada hal, yaitu: (1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3) merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak dan atau konsekuensi, (6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga terkait.

Hal tersebut menandai bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Nugroho pun menyebutkan kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (H.A.R and Nugroho, 2008). Ditambahkan lagi olehnya berkaitan dengan kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yaitu bahwa menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Dalam perspektif kebijakan semua produk kebijakan terbentuk dari sebuah proses. Oleh sebab itu setidaknya kita harus mengenal bagaimana proses kebijakan publik itu terbentuk. Kebijakan publik adalah *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Proses pembuatan kebijakan publik

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Berikut ini merupakan bagan yang sederhana untuk dapat menjelaskan bagaimana proses kebijakan tersebut terbentuk melalui serangkaian proses.



**Gambar 13.1:** Tahapan Kebijakan Publik (Sumber Ripley, 1985)

## 13.2 Definisi Penelitian Kebijakan Pendidikan

Konsep penelitian kebijakan pendidikan adalah penelitian yang dilakukan apabila sedang dan atau sudah selesai diimplementasikan kebijakan pendidikan. Apabila sedang diimplementasikan kebijakan pendidikan yang diteliti, maka tujuannya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan pendidikan tersebut. Penelitian kebijakan pendidikan dilakukan pada saat kebijakan pendidikan itu sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan, maka tujuannya untuk menilai kebijakan pendidikan tersebut secara menyeluruh berhasil atau gagal, menemukan masalah yang fundamental untuk diselesaikan bagi para pengambil kebijakan pendidikan (Nusa and Hendarmawan, 2012).

Prof Sugiyono seorang pakar metodologi penelitian kebijakan mengungkapkan bahwa dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sesungguhnya dalam kegiatan penelitian kebijakan itu dihadirkan untuk meng

ilmiah”kan kebijakan atau dapat menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sigit Purnama memberikan pemahaman mengenai penelitian kebijakan sebagai sebuah proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan mengambil keputusan sebagai bentuk pemecahan masalah dengan jalan memberikan rekomendasi yang bermuara pada tindakan pengambilan keputusan. Keputusan yang didasarkan pada hasil rekomendasi penelitian yang aplikatif dalam memecahkan permasalahan sosial misalnya dalam bidang pendidikan (Purnama, 2010).

Hal ini berarti bahwa penelitian kebijakan adalah sebuah usaha ilmiah yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang secara metodologi menggunakan pendekatan ilmiah yang tepat dan benar yang digunakan sebagai instrumentasi ilmiah dalam kegiatan penelitian kebijakan sehingga mampu menjawab dan menghasilkan rekomendasi yang tepat dan terukur dalam upaya pembuatan dasar kebijakan bagi pemangku kepentingan. Dipertanggungjawabkan berarti dapat dibuktikan dari proses kegiatan penelitian yang telah dilakukan sehingga reliable dan valid dalam membuat sebuah keputusan bagi penelitian kebijakan dalam bidang pendidikan utamanya. Noeng Muhdjir pun menegaskan bahwa *Policy Research* muncul dari adanya keterbatasan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Keterbatasan dana, lebih luas lagi menjadi keterbatasan resources (Muhadjir, 2004).

Dengan percepatan pertumbuhan penduduk dan percepatan kesadaran kualitas hidup, tema mengatasi keterbatasan tersebut berkembang menjadi politics of scarcity, yaitu politik untuk mengatasi kelangkaan. Jadi pada dasarnya adalah bahwa penelitian ilmiah adalah mencari kebenaran. *Core* daripada *policy research* atau penelitian kebijakan adalah pilihan optimal agar *scarcity of resources* dapat dioptimalkan penggunaannya. (Muhadjir, 2004). Penelitian kebijakan menjadi sebuah bentuk konkrit dalam administrasi publik karena berkaitan dengan birokrasi dalam implementasi kebijakannya karena ruang lingkupnya dalam bidang kebijakan (Revida et al., 2020) Selain itu pula dalam konteks penelitian akan memiliki relevansi dengan kinerja organisasi atau lembaga yang melaksanakan rekomendasi kebijakannya, sehingga perlu adanya proses manajemen kinerja pengelolaan hasil dari kebijakan penelitian yang dilakukannya (Sinaga et al., 2020).

Penelitian kebijakan pendidikan juga diterjemahkan sebagai tindakan untuk memecahkan masalah pendidikan, atas dasar saran-saran yang dibuat oleh

*policy researcher* sesuai hasil penelitiannya. Penelitian kebijakan pendidikan dalam hal ini tidak asumsikan dari sudut pandang politik pemerintahan semata, tetapi juga sebagai objek studi ilmiah (*field of study*). Dalam konteks penelitian kebijakan pendidikan sebagai *field of study* mengacu pada dua hal, apa yang dikerjakan peneliti dan apa yang diusulkan atau dikehendaki pengguna (*user*) bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*keilmuan*). Karena peneliti tampil profesional dengan metodologi dan berpikir analitis. Perilaku profesional disini dipandang sebagai seseorang yang menjaga profesinya, menunjukkan keberadaan akan keluhuran ilmunya, didukung kemampuan akademik yang diperoleh di bangku kuliah, juga bukan hanya sekedar konsep, tapi ahli dibidang pendidikan berdasarkan keilmuan yang ditekuni dan pelatihan yang diikuti.

Disamping itu, penelitian kebijakan pendidikan juga dipandang sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis masalah pendidikan yang bersifat fundamental secara teratur, membantu pengambil kebijakan dalam memecahkan masalah, tujuannya bukan hanya mendapatkan rekomendasi, melainkan mendalami (*verstehen*) terhadap suatu kebijakan yang berorientasi pada tindakan (*action*), tingkah laku pragmatis, merujuk pada hasil penelitian.

Keberhasilan penelitian kebijakan pendidikan ditentukan oleh kemampuan para peneliti menggabungkan unsur pengetahuan dan seni yang dimilikinya didukung kreativitas dan kapasitas peneliti tentang pendidikan secara menyeluruh. Keahlian seorang peneliti sangat dimungkinkan dalam riset kebijakan menentukan kesuksesannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan akhir yaitu penyusunan rekomendasi teknis untuk pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan, terdiri administrator, eksekutif, legislatif dan sejenisnya. Keikutsertaan beberapa pihak ada dalam proses identifikasi persoalan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan, dengan kadar yang berbeda.

Penelitian kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh:

1. Makin banyaknya penyandang dana, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.
2. Pengguna hasil studi yang makin variatif dan beragam karakter kebutuhan.
3. Fokus persoalan yang dikaji semakin umum dan memiliki bermacam-macam tipe dan bentuknya.

4. Penyelenggaraan penelitian kebijakan yang semakin bervariasi.
5. Bervariasinya latar belakang peneliti memungkinkan beragamnya perspektif hasil risetnya.
6. Adanya political will untuk melegalkan suatu kebijakan.
7. Makin terbatasnya kemampuan organisasi, terutama organisasi pemerintah, untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan dan olehnya sendiri.
8. Makin tingginya harapan masyarakat dan diikuti penyediaan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan semakin besar.

Ada delapan arah konsep konsep kebijakan tatkala dianalisis menggunakan pemaknaan kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan sebagai penegasan dari maksud dan tujuan
  2. Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya
  3. Kebijakan sebagai panduan tindakan diskresioner
  4. Kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah
  5. Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi
  6. Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif
  7. Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan
  8. Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.
- (Duke, D. L. and Canady, 1991)

## 13.3 Karakteristik dan Ciri Penelitian Kebijakan Pendidikan

Penelitian kebijakan pendidikan berorientasi tinggi pada tindakan (high action orientation) dan lebih diarahkan untuk mendapatkan kemanfaatan hasil segera dibandingkan dengan proses penelitian yang berorientasi rendah pada tindakan (low action orientation). Munculnya variasi atau keanekaragaman membawa implikasi penting bagi ditemukannya lingkup spesifik penelitian kebijakan pendidikan, sekaligus membuka peluang bagi penajaman proses dan diskusi penelitian kebijakan pendidikan. Masing-masing bentuk melahirkan sosok perilaku dan ikatan yang berbeda antara peneliti dengan pengguna hasil penelitian kebijakan, fokus kajian dan setting-nya. Disinilah letak ciri khas penelitian kebijakan pendidikan dapat dibedakan dengan penelitian tradisional lainnya, meskipun perbedaan itu tidak selalu dapat diketahui dan dimunculkan setiap waktu (Arwildayanto, Sukung and Suma, 2018).

Namun demikian peneliti kebijakan pendidikan dalam berbagai model riset dengan ketertiban ilmiah (scientific regulation) sebagaimana layaknya penelitian ilmiah lainnya, dengan memperhatikan beberapa karakteristik, antara lain:

1. Diselenggarakan atas permintaan donatur (penyumbang dana) dan pengguna hasil studi kebijakan pendidikan.
2. Penelitian kebijakan pendidikan berfokus pada perumusan atau pemecahan masalah pendidikan.
3. Penelitian kebijakan pendidikan juga sebagai kajian terhadap setting organisasi yang memberikan layanan pendidikan.
4. Penelitian kebijakan di bidang pendidikan sebagai kajian keilmuan peneliti.
5. Fokus penelitian bersifat multidimensi.
6. Orientasi penelitian bersifat empirik-induktif.
7. Menggabungkan dua dimensi masa kini dan masa depan.
8. Merespons kebutuhan pemakai hasil studi.
9. Menonjolkan dimensi kerja sama secara eksplisit (Majchrzak, 1984)

Disamping hal tersebut diatas, penelitian kebijakan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini.

1. Pemikiran yang intensif, kapasitas dalam merumuskan masalah dan kerangka masalah kebijakan yang jelas, terbatas ataupun terfokus.
2. Bersifat aplikatif-praktis, mendahulukan tindakan nyata dalam menciptakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik.
3. Terfokus pada tindakan yang nyata sebagai usaha untuk menemukan solusi terhadap masalah fundamental pendidikan; masalah yang benar-benar ada, dihadapi dan dirasakan dalam pelayanan pendidikan nasional, daerah maupun sekolah.
4. Dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, dan memerlukan solusi yang cepat atau segera ditangani.
5. Menggunakan metode yang beragam seperti deskriptif, analisis, hubungan kausalitas, dan eksplanatori serta kombinasi penelitian.

Disamping karakteristik yang telah disebutkan diatas ada pula ciri-ciri yang diketahui sehingga dapat diungkapkan melalui jenis penelitiannya. Ciri umum tersebut dapat diketahui dalam kebijakan pendidikan yaitu:

1. Basic Social Research yaitu riset dalam lingkup kebijakan yang harus melalui kaidah atau ketentuan ilmiah sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan secara ilmiah.
2. Technical Social Research yaitu riset atau penelitian kebijakan mampu untuk merumuskan kebijakan yang strategis sehingga dapat dikembangkan parameter teknisnya melalui indikator dan instrumennya secara operasional.
3. Policy Research yaitu penelitian yang diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
4. Comprehensive Research adalah riset kebijakan pendidikan yang menjangkau seluruh variabel yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk dapat dirumuskan point kebijakannya (Rosyada, 2020).

## 13.4 Tata Kelola Penelitian Kebijakan Pendidikan

Dalam wawasan idealisme, proses penelitian kebijakan pendidikan mengikuti tahapan:

1. Identifikasi dan formulasi masalah pendidikan.
2. Penentuan alternatif kebijakan pendidikan untuk pemecahan masalah.
3. Analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan pendidikan.
4. Pelaksanaan kebijakan pendidikan.
5. Menentukan standar kinerja minimal.
6. Evaluasi keberhasilan kebijakan pendidikan, dengan ukuran-ukuran kuantitatif maupun kualitatif serta lainnya (Tilaar, 1998).

Penelitian kebijakan pendidikan terhadap tata kelolanya bisa dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut mengemukakan lima langkah penelitian kebijakan pendidikan sebagai berikut:

### **Persiapan**

Aktivitas-aktivitas utama pada persiapan awal (preliminary activities) mengarah pada satu tujuan, yaitu diperolehnya informasi memadai untuk menentukan fokus studi penelitian kebijakan pendidikan. Informasi yang cukup menjadi titik awal keberhasilan proses kerja (throughout) penelitian.

### **Konseptualisasi Studi**

Tahapan kedua melakukan konseptualisasi studi adalah proses pembentukan konsep dengan bertitik tolak pada kajian-kajian kepustakaan yang relevan dari masalah yang diteliti.

### **Analisis Teknikal**

Adapun analisis teknikal yang perlu dilakukan mencakup penggunaan metodologi.

### **Metodologi Penelitian Kebijakan Pendidikan**

Banyak metode penelitian biasa yang digunakan atau dikombinasi (mixing) dalam melaksanakan penelitian kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan, antara lain: metode sejarah; metode deskripsi, terdiri; studi kasus, analisis

pekerjaan, atau aktivitas, studi komparatif, studi waktu dan gerakan, metode eksperimen, grounded research, metode penelitian tindakan. Seperti sintesis terfokus. Gunakan, antara lain: metode analisis isi (content analysis) dan metode penelitian jaringan.

### **Pelaksanaan Rekomendasi**

Banyak rekomendasi disampaikan untuk memudahkan peneliti kebijakan untuk menarik atau menentukan kesimpulan dan hasil penelitian. Rekomendasi ini harus mendapatkan perhatian serius bagi peneliti kebijakan, agar hasil, kesimpulan dan rekomendasi studi menjadi bermakna (Arwildayanto, Sukung and Suma, 2018).

Hasil studi penelitian kebijakan pendidikan, berupa rekomendasi yang dapat menyelesaikan suatu masalah pendidikan, tanpa dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan pendidikan atau dikomunikasikan dalam keadaan tidak dapat diterima baik olehnya, merupakan pekerjaan yang sia-sia. Penelitian itu, tidak punya arti apa-apa, jika hasilnya berupa rekomendasi untuk pemecahan pendidikan tidak bisa disampaikan secara baik kepada perancang kebijakan. Kemampuan mengkomunikasikan adalah proses penyampaian informasi dari seseorang peneliti kepada pengguna (user) untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam rumusan ini, seseorang disebut sebagai peneliti dan orang lain disebut sebagai pembuat kebijakan, sedangkan informasi adalah isi rekomendasi yang disusun oleh peneliti kebijakan, serta manfaat tersebut diasumsikan sebagai pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan pendidikan ada di dalam laporan penelitian tersebut. Diperlukan strategi yang dapat dilakukan oleh peneliti kebijakan pendidikan dalam usaha mengefektifkan proses komunikasinya dengan pembuat kebijakan. Perlu ditingkatkan efektivitas komunikasi antara peneliti dengan pembuat kebijakan yang akan menjelma dalam realitas. Proses komunikasi pembuat kebijakan dengan para peneliti dengan segala persoalannya, banyak diwarnai oleh peristiwa interaktif mengkomunikasikan hasil penelitian (study results) kepada pembuat kebijakan.

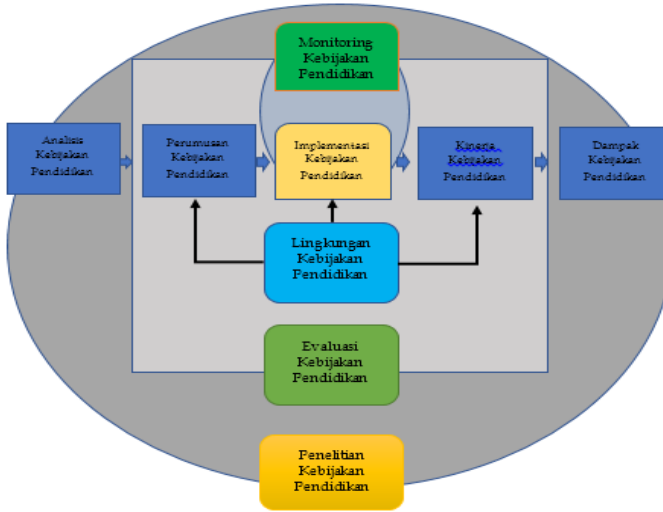
Hubungan komunikatif yang efektif antara pembuat kebijakan dengan peneliti study user, stakeholder lain akan menghasilkan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Menghindari keraguan dari pembuat kebijakan terhadap hasil riset dan kemampuan peneliti.

2. Memberi kesempatan luas bagi peneliti untuk memahami masalah dan fakta-fakta kerja perancang kebijakan.
3. Menyatupadukan perbedaan kepentingan peneliti dengan kepentingan pembuat kebijakan, bahwa tujuan akhir kerja mereka adalah untuk memecahkan masalah sosial.
4. Memberi kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk dapat mengetahui secara lebih jauh tentang. Informasi yang sesuai bagi penyusunan kebijakan di periode yang datang.
5. Memberi kesempatan kepada peneliti kebijakan untuk dapat menggambarkan berbagai perubahan di sekitar kebijakan yang mungkin berdampak terhadap studi lebih lanjut.

## 13.5 Lokus Penelitian Kebijakan Pendidikan

Penelitian kebijakan pendidikan dapat dibedakan dengan analisis, monitoring, evaluasi kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan pendidikan atau merupakan proses inisiasi dari perumusan kebijakan pendidikan. Analisis lebih digunakan pada suatu kegiatan yang dilakukan pra perumusan dilakukan sedangkan monitoring lebih cenderung pada aktivitas yang dilakukan ketika kebijakan dalam pendidikan diimplementasikan (on going) sehingga diketahui perkembangan pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu evaluasi pendidikan adakah kebijakan yang dilakukan dalam sebuah proses penilaian terhadap sebagian atau seluruh dari tahapan yang telah dilakukan untuk dinilai keberhasilannya dalam suatu implementasi kebijakan.



**Gambar 13.2:** Lokus dan Ruang Penelitian Kebijakan Pendidikan (Tilaar and Nugroho, 2009)

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik. Oleh karena itu maka penelitian dalam kebijakan pendidikan dapat dilakukan terhadap semua proses atau tahapan yang dilakukan karena diharapkan untuk melihat pemahaman kebijakan yang dilakukan. Guna memahami secara lebih sederhana maka perlu kiranya dipahami grand design mengenai ruang lingkup penelitian kebijakan. Ada pun pemahaman secara sederhana dapat ditampilkan dalam gambar 13.2.

Berdasarkan pada gambar ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian mengenai kebijakan pendidikan adalah penelitian yang dilakukan lebih pada content atau isi yang ada dalam kebijakan pendidikan. Dalam hal metode yang digunakan adalah analisis isi, bisa dalam wujud kuantitatif (frekuensi, semantik) atau bersifat kualitatif (semiotika, politik dan filsafat) dan bisa jadi membandingkan keduanya atau studi komparasi dalam dua kebijakan yang berbeda.
2. Penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan yaitu sebuah riset yang dilakukan tentang bagaimana suatu kebijakan di aplikasikan atau diimplementasikan misalnya penerapan

pembelajaran tatap muka berbasis virtual ketika pada masa pandemi covid-19 ini dalam bidang pendidikan.

3. Penelitian tentang kinerja kebijakan pendidikan yaitu sebuah riset yang dilakukan sehubungan dengan bentuk pencapaian dari kebijakan pendidikan di hubungkan dengan target yang telah ditetapkan atau yang diharapkan. Penelitian ini berarti akan menganalisis tentang apa yang telah dicapai dengan target yang telah disepakati bersama. Metode yang dilakukan dan yang cocok adalah metode gap analysis atau analisis kesenjangan. Analisis yang akan membahas pencapaian yang telah diperoleh dengan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan.
4. Penelitian atau riset tentang lingkungan kebijakan pendidikan berhubungan dengan kebijakan pendidikan yang berproses dalam suatu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan kinerja sebuah kebijakan dalam konteks pendidikan.
5. Penelitian tentang proses kebijakan pendidikan adalah riset yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan pendidikan itu berproses secara institusionalisasi yang cakupannya pada proses perumusan, perumusan kebijakan, implementasi, kinerja yang hendak dicapai dan lingkungan atau ekosistem di mana implementasi kebijakan itu lakukan atau diselenggarakan.

## 13.6 Fungsi dan manfaat dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan

Fungsi daripada penelitian kebijakan pendidikan bisa dikategorikan sebagai berikut:

1. Memberikan layanan dalam bentuk fakta (evidence), input yang bersifat verifikasi afirmatif sebagai penyempurnaan untuk seluruh tahapan dalam proses riset kebijakan dan dapat dimanfaatkan di setiap tahapan atau unsur kebijakan serta terhadap seluruh unsur kebijakan pendidikan.

2. Memberikan kritik berupa perspektif, alternatif bersifat falsifikasi atau kritik-konstruktif terhadap peningkatan mutu (quality) kebijakan pendidikan melalui perumusan kebijakan.
3. Memudahkan penyusun kebijakan (policy maker) dalam menyusun desain kebijakan, dengan jalan memberikan argumentasi atau informasi yang mereka perlukan dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang fundamental.

Manfaat penelitian kebijakan pendidikan; untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada baik melalui metode, kuantitatif, mulai dari perhitungan sederhana, menggunakan analisis t-test, korelasi sederhana, multivariat, metode kualitatif, metode sintesis terfokus, metode analisis data sekunder, metode eksperimen lapangan, metode survei, penelitian kasus, metode analisis biaya-keuntungan (cost-benefit analysis), metode analisis keefektifan biaya (cost-effectiveness analysis), metode analisis kombinasi (mix method) dan penelitian tindakan (action research) (Arwildayanto, Sukiing and Suma, 2018).

## 13.7 Pendekatan Dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan

Dalam konteks pendekatan yang dilakukan ini digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian kebijakan pendidikan. William N Dunn menegaskan bahwa ada 3 pendekatan dalam analisis penelitian kebijakan yaitu:

1. Empirical Approach atau pendekatan empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan sebab dan akibat dari kebijakan publik yang diimplementasikan. Semisal mendapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan Kementerian Sosial misalnya dalam reformulasi kelompok sasaran penerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dalam program perlindungan sosial.

2. Evaluation Approach atau pendekatan evaluasi yaitu sebuah pendekatan dalam menentukan hasil dari implementasi kebijakan misalnya dalam mengukur keberhasilan atau hasil implementasi tentang evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) besar disaat pandemi covid-19 berlangsung. Bagaimana hasil evaluasi yang telah dilakukan pemerintah tersebut.
3. Normative approach atau pendekatan normatif dilakukan guna mengakomodasi berbagai kepentingan dari hasil usulan yang berkembang yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. (Dunn, 2003)

Selain menggunakan pendekatan sebagaimana yang disampaikan oleh William M Dunn tersebut, maka bagi seorang peneliti juga dapat menggunakan pendekatan atau berbagai model –model dalam analisis kebijakannya seperti:

1. Institutional Model  
Pendekatan model ini erat dengan lembaga yang membuat dan melegalkan kebijakan dan bagaimana lembaga tersebut menggunakan power agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.
2. Process Model  
Dalam penelitian evaluasi dan analisis kebijakan maka setidaknya akan menggunakan langkah, pertama, identifikasi masalah dan keuntungan bagi policy maker. Kedua, Formulasi rencana kebijakan dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dan ikut memiliki kepentingan di dalamnya (eksekutif, legislatif dan lainnya), legitimasi publik atas kebijakan tersebut dan terakhir adalah adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan.
3. Rational Model  
Model ini merupakan bentuk analisis kebijakan yang dilihat dari sudut pandang pilihan yang secara rasional (berangkat dari rational choice theory) seberapa besar keuntungan sosial yang akan didapatkan di dibandingkan dengan biaya yang telah dikucurkan dalam penyelenggaraan kebijakan yang telah dilakukan.

#### 4. Incremental Model

Model ini merupakan revidi yang secara bertahap dan sistemik dilakukan terhadap kebijakan dalam satu rentang waktu tertentu di mana dasarnya adalah kebijakan akan mengalami keberlanjutan, perubahan akan terjadi atau bagian-bagian mana yang dinilai lemah maka diperbaiki. Analisis ini lebih tepatnya pada kebijakan tambal sulam.

#### 5. Group Model

Analisis kebijakan dari sudut pandang peran sistem politik sebagai generator dan katalisator dari sebuah proses keputusan yang berbagai intrik dan konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya di dalam pengambilan keputusan dan menetapkan RUU yang bersifat kontroversial di kalangan masyarakat semisal penetapan terhadap implementasi dan pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

#### 6. Elite Model

Dalam konteks model ini maka kebijakan hampir selalu merupakan bentuk reflektif dari kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat (elit lokal) dan tidak dibangun atas dasar kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan keadaan yang berbeda atau paradoks dengan sifat populis (berpihak pada masyarakat luas).

#### 7. Six Step Model

Model ini mengacu pada 6 (enam) langkah yaitu melakukan verifikasi, mendefinisikan dan mendetailkan masalah, menetapkan kriteria evaluasi, mengidentifikasi kebijakan alternatif (jika ada pilihan), mengevaluasi kebijakan alternatif tersebut, mempresentasikan dan menunjukkan diferensiasi kebijakan alternatif tersebut dan terakhir adalah memonitor implementasi kebijakan.

## 13.8 Metode Penelitian Kebijakan Pendidikan

Dalam penelitian kebijakan akan memunculkan berbagai kombinasi penelitian kebijakan.

Nazir (1985) memberikan 5 (lima) metode penelitian yaitu:

1. Metode Sejarah atau historis yaitu metode yang menggunakan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang merupakan bentuk kristalisasi dari fakta sejarah sehingga belum tentu dapat terulang kembali.
2. Metode deskripsi yaitu metode untuk melakukan riset dari status sekelompok manusia atau objek tertentu, suatu bentuk kondisi atau situasi, suatu pemikiran atau peristiwa yang terjadi pada masa kini. Metode ini beragam turunannya yaitu metode survey, metode deskripsi berkelanjutan, metode studi kasus metode analisis pekerjaan, metode studi komparasi (perbandingan) atau metode studi waktu serta gerakan.
3. Metode eksperimental yaitu metode riset di bawah keadaan yang diciptakan oleh peneliti sehingga dapat dilakukan perlakuan tertentu oleh seorang peneliti untuk dapat mengendalikan objek dari suatu penelitian.
4. Metode Grounded Research yaitu suatu metode yang didasarkan pada fakta guna melakukan upaya generalisasi, menerapkan konsep, membuktikan, menemukan atau menguatkan teorisasi yang ditentukan. Metode tersebut intinya merupakan upaya untuk mencari proses mencari data sebanyak-banyaknya dengan bekal penentuan hipotesa, menjelaskan sebuah peristiwa yang berdasarkan observasi pengamatan yang dilakukan.
5. Metode Penelitian tindakan yaitu suatu penelitian atau riset yang dilakukan untuk menetapkan suatu desain keputusan di masa depan. Metode ini seringkali dilakukan oleh para guru melalui penelitian tindakan kelas guna mendapatkan feedback dalam membangun dan

menciptakan strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga aspek afektif dan kognitif dalam pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dimasa mendatang.

Selain dari kelima metode tersebut di atas (Tilaar and Nugroho, 2009) pun memberikan dua metode penelitian yang di rasa baru dan banyak dikembangkan dalam studi ilmu komunikasi terutama yaitu:

1. Metode Analisis Isi (konten) yaitu suatu teknik yang sistematis dan dapat diulang dengan memilah dan memilih kata dalam jumlah besar menjadi bentuk kata-kata yang di kategorisasikan dengan coding yang dikehendaki oleh peneliti. Metode ini berkembang hingga menjadi pada analisis wacana dan analisis latar belakang isu. Sebuah penelitian kebijakan tidak hanya pada riset pada sis daripada sebuah produk kebijakan tetapi meneliti pada background terhadap lahirnya produk kebijakan tersebut.
2. Metode Penelitian Jaringan (Jejaring antar aktor) di mana dalam metode ini penelitian dilakukan guna menemukan jaringan sosial dalam suatu sistem sosial yang ada. Metode ini menjadi salah satu alternatif pilihan di mana suatu individu atau institusi sebagai unit analisisnya karena akan menjadikan suatu hubungan atau jaringan antar individu sebagai unit analisis

## 13.9 Mengkomunikasikan Hasil Penelitian Kebijakan Pendidikan

Periset kebijakan yang baik adalah komunikator yang baik, yaitu para peneliti yang mampu mengkomunikasikan isi pesan yang direkomendasikan kepada perancang atau buat kebijakan. Hasil studi penelitian kebijakan pendidikan, berupa rekomendasi yang dapat menyelesaikan suatu masalah pendidikan, tanpa dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan pendidikan atau dikomunikasikan dalam keadaan tidak dapat diterima baik olehnya, merupakan pekerjaan yang sia-sia. Penelitian itu, tidak punya arti apa-apa, jika hasilnya berupa rekomendasi untuk pemecahan pendidikan tidak bisa

disampaikan secara baik kepada perancang kebijakan (Arwildayanto, Sukung and Suma, 2018)

Kemampuan mengkomunikasikan adalah proses penyampaian informasi dari seseorang peneliti kepada pengguna (user) untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rumusan ini, seseorang disebut sebagai peneliti dan orang lain disebut sebagai pembuat kebijakan, sedangkan informasi adalah isi rekomendasi yang disusun oleh peneliti kebijakan, serta manfaat tersebut diasumsikan sebagai pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan pendidikan ada di dalam laporan penelitian itu.

Mengkomunikasikan secara efektif hasil penelitian kebijakan pendidikan bukanlah pekerjaan sederhana. Diperlukan strategi yang dapat dilakukan oleh peneliti kebijakan pendidikan dalam usaha mengefektifkan proses komunikasinya dengan pembuat kebijakan. Perlu ditingkatkan efektivitas komunikasi antara peneliti dengan pembuat kebijakan yang akan menjelma dalam realitas. Proses komunikasi pembuat kebijakan dengan para peneliti dengan segala persoalannya, banyak diwarnai oleh peristiwa interaktif mengkomunikasikan hasil penelitian (study results) kepada pembuat kebijakan. Oleh karena itu, hasil penelitian kebijakan pendidikan sering kali diperuntukkan bagi konsumsi' kalangan terbatas, yaitu pembuat kebijakan itu sendiri (Majchrzak, 1984).

Hubungan komunikatif yang efektif antara pembuat kebijakan dengan peneliti study user, stakeholder lain akan menghasilkan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Menghindari keraguan dari pembuat kebijakan terhadap hasil riset dan kemampuan peneliti.
2. Memberi kesempatan luas bagi peneliti untuk memahami masalah dan fakta-fakta kerja perancang kebijakan.
3. Menyatupadukan perbedaan kepentingan peneliti dengan kepentingan pembuat kebijakan, bahwa tujuan akhir kerja mereka adalah untuk memecahkan masalah sosial.
4. Memberi kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk dapat mengetahui secara lebih jauh tentang. Informasi yang sesuai bagi penyusunan kebijakan di periode yang datang.
5. Memberi kesempatan kepada peneliti kebijakan untuk dapat menggambarkan berbagai perubahan di sekitar kebijakan yang

mungkin berdampak terhadap studi lebih lanjut (Arwildayanto, Sukung and Suma, 2018).

Setelah memahami terkait dengan penelitian kebijakan pendidikan maka kita akan memahami bahwa penelitian yang dilakukan apabila sedang atau pun sudah selesai diimplementasikannya kebijakan pendidikan dengan berbagai wujud hasil penelitian kebijakan pendidikan berupa policy paper di bidang pendidikan. Konteks penelitian kebijakan pendidikan sebagai sebuah riset lapangan mengacu pada apa yang dikerjakan oleh seorang peneliti dan apa yang diusulkan dalam rekomendasi kebijakan dalam temuan penelitian tersebut. Temuan tersebut tentunya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tepat oleh peneliti secara keilmuan dan prosedur riset yang dilakukannya.

Adapun manfaat yang bisa diharapkan dalam penelitian kebijakan pendidikan adalah dapat merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan terhadap kualitas hasil dari produk kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan. Selain itu juga dapat melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang telah ada melalui berbagai macam pendekatan dan metode yang dilakukan.

# Daftar Pustaka

- Abdulsyani, S.S. (2007). Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, S. Z. (2006). Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas.
- Ahmad, Intan. (2018). “Proses Pembelajaran Digital Dalam Era Revolusi Industri 4 .0 Era Disrupsi Teknologi.” in Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Medan.
- Ametembun, N.A. (1981b). Guru dalam Administrasi Sekolah. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.
- Amins, A. (2011). Manajemen Evaluasi Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Amtu, O. (2013), Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Alfabet.
- Anatan, L dan Lena E. (2009). Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia). Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Ancok, D. (2012). Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta: Erlangga.
- Andri, R. M. dan SP, M. P. (2017) “Peran dan Fungsi Teknologi Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran,” Jurnal Ilmiah Research Sains, 3(1).
- Anonim, (2014). Gender dan Pembangunan : Konsep-Konsep Dasar. <https://www.downtoearth-indonesia.org>
- Aqib, Z & Rohmanto, E. (2007). Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah. Cet. I. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Arifin, I. (2020). Manajemen Lembaga Pendidik di Era Digital. Webinar Prodi PGMI FTIK IAIN Ponorogo. 07 November 2020.

- Arifin, Z. (2013) 'Relasi ekonomi dan Pendidikan', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4(1), pp. 38–47.
- Arwildayanto, Arifin Sukung, and Warni Tune Sumar. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, Dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia press.
- Arwildayanto, Sukung, A. and Suma, W. T. (2018) *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Asmawi, A., Syafei, S. dan Yamin, M. (2019) "Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi," in *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Assyari (2018) *Status Sosial Masyarakat yang Berpendidikan (Studi Di Gampong Lhok Kruet Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Available at: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6133>.
- Aziizu, B. Y. A. (2015) 'Tujuan besar pendidikan adalah tindakan', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Depdiknas, (2007). *Instrumen Evaluasi Diri Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Jakarta: Depdiknas
- Bahtiar, I. Y. (2012). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Balitbang Depdiknas, (2007). *Pengkajian Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Dasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan.
- Banks, J. A. (1988) *Multiethnic education: Theory and practice*. ERIC.
- Barnadib, I. (1987) *Pendidikan Perbandingan, Andi Offset*. Yogyakarta.
- Becker, G. S. (1993) 'Nobel lecture: The economic way of looking at behavior', *Journal of political economy*, 101(3), pp. 385–409.
- Becker, G. S. (2002) 'Human capital', *The concise encyclopedia of economics*, 2.
- Becker, G. S. (2009) *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago press.

- Becker, S. O. and Woessmann, L. (2009) 'Was Weber wrong? A human capital theory of Protestant economic history', *The quarterly journal of economics*, 124(2), pp. 531–596.
- Blanchard, E.J. (2001). *Contextual of Teaching and Learning*. New Jersey: Englewood Cliff. Inc.
- Bowen, HR. (1981). *The Cost of Higher Education*. London: Jossey-Bass Publishers.
- Briggs, A. R. J., Clark, J. and Hall, I. (2012) 'Building bridges: Understanding student transition to university', *Quality in Higher Education*, 18(1), pp. 3–21. doi: 10.1080/13538322.2011.614468.
- Budiman, H. (2017) "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), hal. 31. doi: 10.24042/atjpi.v8i1.2095.
- Connell, (1996). *Teaching the boys: New research on masculinity, and gender strategies for schools*. *Teachers College Record*. Volume 98, Nomor 2, pages 206–235.
- D. Cameron and Valentine, F. (2001) *Disability and Federalism: Comparing Different Approaches to Full Participation*. McGill-Queens University Press: Montreal.
- Dakar (2000) 'The Dakar Framework for Action', *Unesco*, (April), pp. 26–28. Available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf>.
- Dalyono, C.T. (2009). *Kontribusi Konsumsi Media Massa Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Tingkat Modernitas Generasi Muda Kota*. Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Demartoto, (2007). *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta. UNS Press.
- Dewey, J. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2018). *Gender Itu Asi Sih?* <https://dinsos.kulonprogokab.go.id>

- Dirjendikti Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Duke, D. L. and Canady, R. L. (1991) *School policy*. New York: McGraw-Hill.
- Dunn, W. N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Durianto, D. (2004). *Brand Equity Ten Strategi Memimpin Pasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dyson, A. (2004) 'Inclusive Education: A Global Agenda?', *The Japanese Association of Special Education*, 41(6), pp. 613–625. Available at: [https://www.researchgate.net/publication/288876503\\_Inclusive\\_Education\\_A\\_Global\\_Agenda](https://www.researchgate.net/publication/288876503_Inclusive_Education_A_Global_Agenda).
- Ediyanto, E. et al. (2017) 'Inclusive Education in Indonesia From the Perspective of Widyaistara in Centre for Development and Empowerment of Teachers and Education Personnel of Kindergartens and Special Education', *IJDS : Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(2), pp. 04–116. doi: 10.21776/ub.ijds.2017.004.02.3.
- Emzir & Chan, S.M. (2010). *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Eskay, B.N., E. and J., A. (2013) 'The American No Child Left Behind Act: Implications for the Nigerian School System', *Journal of Education and Practice*, 4(13), pp. 176–181. Available at: <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/6786/6899>.
- Faiz Zaki, (2020). *Enam Bentuk Kesetaraan Gender Bagi Perempuan, Apa Saja?* <https://www.idntimes.com>.
- Fajrillah, F. et al. (2020) *MOOC: Platform Pembelajaran Daring di Abad 21*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Farnworth, Badstue, Williams, Tegbaru and Gaya, (2020.) *Unequal partners: associations between power, agency and benefits among women and*

- men maize farmers in Nigeria. *Jurnal Gender, Technology and Development*. Volume 24, Nomor 3, pages 271 – 296.
- Fattah, N. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ferinia, R. et al. (2020) *Komunikasi Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Fibrianto A. S., (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Volume 5, Nomor 1. Hal. 10 – 27.
- Fontana, A. (2011). *Innovate We Can: Manajemen Inovasi Dan Penciptaan Nilai Individu, Organisasi, Masyarakat*. Jakarta: Cipta Inovasi Sejahtera.
- Gaya, H. I., Tegbaru, A., Bamire, A. S., Abdoulaye, T., & Kehinde, A. D. (2017). Gender differentials and adoption of drought tolerant maize varieties among farmers in northern Nigeria. *European Journal of Business and Management*. Volume 9, Nomor 5, pages 81 – 87.
- Ghulam, G. (2019) 'Landasan Ekonomi Dalam Pendidikan', *TARBAWI*, 7(2), pp. 87–100.
- Gillies, D. (2017) 'Human capital theory in education', *Encyclopedia of educational philosophy and theory*, pp. 1–5.
- Gollnick, D. M. et al. (2009) *Multicultural education in a pluralistic society*. Merrill Columbus, OH.
- Gonzales M.A., Liminana A.R. and Gonzales D. G., (2020). Coeducation and gender equality in education systems: A scoping review. *Children and Youth Services Review*. Volume 111, pages 1 – 12.
- Good, C. V. (1959). *Dictionary of Education*. New York: McGraw-HillBook Company.
- Gunawan, A. H. (2000) *Sosiologi pendidikan: suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan*. Rineka Cipta.
- H. Corps, G. Ceralli, and S. B. (2012) 'Inclusive Education'.
- H.A.R, T. and Nugroho, R. (2008) *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hadis, F. A. (2005) 'Toward Inclusive, Inclusive Education in Indonesia: A Country Report', (1994), pp. 1–4. Available at: <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/62>.
- Hamalik, O. (2004). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamalik, O. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handitya, B. (2018) 'Peran Pendidikan Dalam Membangun Moral Bangsa Di Era Disrupsi', in *Seminar Nasional PKn UNNES*, pp. 41–52.
- Hasan, M. (2018) 'Pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi', *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), pp. 81–86.
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Hasbullah. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heidjrachman dan Suad H. (2011). *Manajemen Personalialia*. Edisi ke empat. Yogyakarta: BPFPE.
- Hills, G. (2008). *Marketing and Entrepreneurship, Research Idea and Opportunities*. *Journal of Small and Medium Entrepreneurship*. P. 27-39.
- Horton, P. B. and Hunt, C. L. (2004) *Sociology*. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=RODOe6wjC5cC>.
- Hough, J.R. (1984). *Educational Policy: An International Survey*. London-Sydney-New York: Croom Helm, Ltd and St. Martin's Press.
- Husaini, M. (2017) "Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan (e-education)," *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, 2(1).
- Ibrahim. (1998). *Inovasi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud Dikti Proyek.
- Idi, A. (2011) *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Ihsan, F. (2005). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Imaniah, I. and Fitria, N. (2018) 'Inclusive Education for Students with Disability', SHS Web of Conferences, 42, p. 00039. doi: 10.1051/shsconf/20184200039.
- Imron, Ali. (2008). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- International Labour Organization, (2012). Perempuan dalam Kepemimpinan : Penelitian mengenai Hambatan terhadap Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Yang Layak bagi Perempuan. Jakarta. Kantor Perburuahan Internasional.
- Ira, M. (2015) 'Sistem Pendidikan di Indonesia: antara keinginan dan realita', Jurnal Auladuna, 2(2), pp. 233–245.
- Jacob, U. S. and Olisaemeka, A. N. (2016) 'Inclusive Education in the 21st Century: Parameters and Opportunities for Learners with Special Needs', European Scientific Journal, ESJ, 12(10), p. 188. doi: 10.19044/esj.2016.v12n10p188.
- Jaenudin, R. (2014) 'KONSEP "MANUSIA EKONOMI" DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN', Jurnal PROFIT Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 1(1), pp. 78–83.
- Julyanthry, J. et al. (2020) Manajemen Produksi dan Operasi. Yayasan Kita Menulis.
- Junaidi, Aris. (2020). Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Saat Ini : Kampus Merdeka. Indonesia.
- Kaluge, L. (2020). Peran Analisis Bidang Manajemen Pendidikan dalam Konteks Link & Match. Surabaya: Program Studi Manajemen Pendidikan FIP Unesa.
- Karimi, S.S., Mulwa, A.S. and Kyalo, D.N., (2020). Stakeholder engagement in monitoring and evaluation and performance of literacy and numeracy educational programme in public primary schools in nairobi county, kenya. Journal of Educational and Developmental Psychology, 10(2), p.10. URL: <http://doi.org/10.5539/jedp.v10n2p10>
- Karsidi, R. (2005) Sosiologi Pendidikan. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Kementerian Keuangan, (2019). Ini Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Sebuah Negara. <https://www.kemenkeu.go.id>

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2019). Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan. <https://www.kemenkopmk.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2017). Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. <https://kemenpppa.go.id>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- Kementerian PPN, (2007). Analisis Gender Dalam Perencanaan Pembangunan. <https://www.bappenas.go.id>.
- Koesoema, D. (2020). Memberdayakan Pelaku dalam Ekosistem Pendidikan untuk Memperkuat Kebhinnekaan. Jakarta: Yayasan Cahaya Guru.
- Koontz, H., O'Donnel, C. and Wehrich, H. (1992). Management. Eight Edition. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Kotler, P. and Mantrala, M. K. (1985) 'Flawed products: Consumer responses and marketer strategies', *Journal of consumer marketing*.
- Kotter, JP and Schlesinger, Leonard A. (2008). Choosing Strategies for Change. *Harvard Business Review*. 1-11.
- Kurniawan, Riza Yonisa. (2016). "Identifikasi Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Untuk." in *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun*.
- Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). (2013). *Monitoring dan Evaluasi*. Karanganyar: LPPKS
- Leuwol, N. V. et al. (2020) *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Lindqvist, B. (1999) 'Education as a Fundamental Right', *Education Update*, 2(4), p. 7.
- Lubis, P. D. H. M. R. (2017) *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam*. Kencana. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=vw63DwAAQBAJ>.

- Lucas Jr, R. E. (1990) 'Supply-side economics: An analytical review', *Oxford economic papers*, 42(2), pp. 293–316.
- Mag, A. G., Sinfield, S. and Burns, T. (2017) 'The Benefits of Inclusive Education: New Challenges for University Teachers', *MATEC Web of Conferences*, 121(12011), pp. 1–7. doi: 10.1051/mateconf/201712112011.
- Mahdiannur, M. A. (2018) 'Peranan Standar Mutu dan Akreditasi Institusi Pendidikan dalam Realita Masyarakat Indonesia', (August). doi: 10.31227/osf.io/tnr9d.
- Majchrzak, A. (1984) *Methods for Policy Reseach*. United Kingdom: Sage Publication. Available at: <https://msbfile03.usc.edu/digitalmeasures/majchrza/pci/Majchrzak-AnnCV.pdf>.
- Maksum, A. (2011) *Pluralisme dan multikulturalisme: paradigma baru pendidikan agama Islam di Indonesia*. Aditya Media Pub.
- Mankiw, N. G., Romer, D. and Weil, D. N. (1992) 'A contribution to the empirics of economic growth', *The quarterly journal of economics*, 107(2), pp. 407–437.
- Mardeli, M. (2017) 'Problematika Antara Politik Pendidikan Dengan Perubahan Sosial Dan Upaya Solusinya', *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), pp. 239–255.
- Martiana, A. (2015) 'Pendidikan Sebagai Alat Perubahan'.
- Marto Silalahi, dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mastuhu. (2004). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Mawati, A. T. et al. (2020) *Inovasi Pendidikan: Konsep, Proses dan Strategi*. Yayasan Kita Menulis.
- McKinsey. (2019). "Otomasi Dan Masa Depan Pekerjaan Di Indonesia." (September):1–5.

- Mel, A., Booth, T. and Dyson, A. (2006) *Improving Schools, Developing Inclusion*, Taylor and Francis. Routledge. doi: 10.4324/9781315163109-8.
- Melissa Hines, (2020). *Human Gender Development. Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. Volume 118, pages 89 – 96.
- Miles, S. and Singal, N. (2010) ‘The Education for All and Inclusive Education Debate: Conflict, Contradiction or Opportunity?’, *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), pp. 1–15. doi: 10.1080/13603110802265125.
- Moeliono, A.M. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mosse, (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, N. (2004) *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research, Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan*. 1st edn. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhadjir, N. H. (2003). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Muhammedi (2016) ‘Perubahan Kurikulum di Indonesia : Studi Kritis tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal’, *Raudhah*, IV(1), pp. 49–70.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi dan implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Yang Disempurnakan: Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M. (2009). *Melaksanakan PTK itu Mudah (classroom action research)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mutrofin, O. S. (2017) ‘Leadership on Teachers’ Job Satisfaction’, *Leadership*, 8(29).
- Naim, N. (2009). *Menjadi Guru Inspiratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naim, N. and Sauqi, A. (2008) ‘Pendidikan Multikultural’, *Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Narwoko, J. D. and Suyanto, B. (2004) *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media. Jakarta.

- Nasution, S. (1999) *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2006). *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Neale, Robbie, & Martin, (2016). Gender identity and brand incongruence: when in doubt, pursue masculinity. *Journal of Strategic Marketing*. Volume 24, Nomor 5, page 347 – 359.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Proses Kebijakan*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Nurdyansyah and Mutala'iah, N. (2015) 'Pengembangan Bahan Ajar Modul Ilmu Pengetahuan Alambagi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar', Program Studi Pendidikan Guru Madrasa Ibtida'iyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 41(20), pp. 1–15.
- Nurhaeni, I.D.A. (2008). *Reformasi Kebijakan Pendidikan: Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Solo: UNS Press.
- Nusa, P. and Hendarmawan (2012) *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oktarina, N. (2007) 'Peranan Pendidikan Global dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia', *Dinamika Pendidikan Unnes*, 2(3), p. 61996.
- Oreg, S. (2003). Resistance to Change: Developing an Individual Differences Measure. *Journal of Applied Psychology*. 88 (4). 680-693.
- Orinton Purba, (2010). *Konsep dan Teori Gender*. <https://gendernews88.wordpress.com>.
- Pakpahan, A. F. et al. (2020) *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Pan, Lu, & Gursay, (2020). Traveling to a Gendered Destination: A Goal-Framed Advertising Perspective. *Journal of Hospitality & Tourism Research*. Volume 44, Nomor 3, pages 499 - 522
- Parinduri, L. et al. (2020) *Manajemen Operasional: Teori dan Strategi*. Yayasan Kita Menulis.
- Parray, ILO. (2017). *Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017 Memanfaatkan Teknologi Untuk Pertumbuhan Dan Penciptaan Lapangan Kerja*. Vol. 5. Jakarta.

- Pemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
- Pemendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Pemendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peters, S. J. (2004) 'Inclusive Education: An EFA Strategy For All Children', World Bank. doi: 10.1.1.506.4948.
- Poernomo, B. (2016) 'The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Current Problems and Challenges', *American International Journal of Social Science*, 5(3), pp. 144–150. Available at: [http://www.aijssnet.com/journals/Vol\\_5\\_No\\_3\\_June\\_2016/17.pdf](http://www.aijssnet.com/journals/Vol_5_No_3_June_2016/17.pdf).
- Prihatin, E. (2011). *Teori administrasi pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Purba, B. (2019) 'Analysis of Human Development Index in the Highlands Region of North Sumatera Province Indonesia', in *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan*.
- Purba, B. (2020a) 'Analisis Tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia', *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(1), pp. 196–204.

- Purba, B. (2020b) 'Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009–2018', *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(2), pp. 244–255.
- Purba, B. and Situmorang, B. (2019) 'Development of Digital Learning Media on Entrepreneurship Subject Using Creative Productive Learning Strategies', in *ACEIVE 2019: Proceedings of the the 3rd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education*, ACEIVE 2019, 16 November 2019, Universitas Negeri Medan, North Sumatra, Indonesia. European Alliance for Innovation, p. 87.
- Purba, B. et al. (2019) 'The Effect of Capital Expenditure and Gross Fixed Capital Formation on Income Disparity in West Coast Region of North Sumatera', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. doi: 10.1088/1755-1315/260/1/012022.
- Purba, B., Gaspersz, S., et al. (2020) *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar. Yayasan Kita Menulis*.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., et al. (2020) *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan. Medan: Yayasan Kita Menulis*.
- Purba, B., Sudarmanto, E., et al. (2020) *Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran. Yayasan Kita Menulis*.
- Purba, Bonaraja et al. (2019) 'Regional Disparity in Economic Development: The Case of Agropolitan Cities in North Sumatera, Indonesia', in. doi: 10.2991/agc-18.2019.53.
- Purba, S., Revida, E., et al. (2020) *Perilaku Organisasi. Yayasan Kita Menulis*.
- Purnama, S. (2010) *Penelitian Kebijakan Pendidikan (Education Policy Research)*. Malang.
- Purwanto, E. A. and Sulistyastuti, D. R. (2007) *Metode penelitian kuantitatif: untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial*. Penerbit Gava Media. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=EsAqMwEACAAJ>.
- Puspita, Y. (2018) 'Pentingnya Pendidikan Multikultural', in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*.

- Puspita, Yenny, Yessi Fitriani, Sri Astuti, and Sri Novianti. (2020). "Selamat Tinggal Revolusi Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0." Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang 122–30.
- Rahardjo, M. (2010). *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Ratih Probosiwi, (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. Volume 3, Nomor 1, Hal. 41 - 56
- Revida, E. et al. (2020) *Teori Administrasi Publik*. Medan: Kita Menulis.
- Rinawati, A. (2015). Transformasi Pendidikan untuk Menghadapi Globalisasi. *Ekuitas-Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol.3 (1). p. 93-103.
- Ripley, R. B. (1985) *Policy Analysis in Political Science*. Nelson-Hall (Nelson-Hall series in political science). Available at: <https://books.google.co.id/books?id=8XmCAAAMAAJ>.
- Riyana, C. (2008) "Peranan teknologi dalam pembelajaran," Universitas Indonesia, Jakarta.
- Robbins, S.P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. Jilid 1. Alih Bahasa: Mulyana, L. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Rochaety, E., dkk. (2005). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Mediatama.
- Rosyada, D. (2020) *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*. Edited by Murodi. Jakarta: Kencana.
- Sada, C. (2004) 'Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview', dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I.
- Sagala, S. (2014). *Administrasi Pendidikan Kontemporer: Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Sahertian, P.A. (1985). *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Salim, A. (2002). *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

- Sanjaya, W. (2010). Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana.
- Sari, A. P. et al. (2020) Ekonomi Kreatif. Yayasan Kita Menulis.
- Sari, I. K., Mudana, I. W. and Wirawan, I. G. M. A. S. (2020) 'MOBILITAS SOSIAL VERTIKAL KE ATAS (SOCIAL CLIMBING) WARGA PENDATANG DI KAMPUNG KAJANAN, KOTA SINGARAJA, KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI', Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, 1(3), pp. 279–287.
- Saryono, D. (2020). Pembelajaran Berjarak (Jauh) Pada Masa dan Sesudah Pandemi Covid-19: Siapa Takut?. Bersuka Citalah Menyambut. Paparan dalam Acara Webinar Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Ruang Virtual Zoom Dinas Pendidikan Jawa Timur.
- Schultz, T. (1992) The role of education and human capital in economic development: An empirical assessment.
- Sedarmayanti & Gunawan, S. (2020). Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, V. et al. (2020) Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Yayasan Kita Menulis.
- Simanihuruk, L. et al. (2019) E-Learning: Implementasi, Strategi dan Inovasinya. Yayasan Kita Menulis.
- Simarmata, H. M. P. et al. (2020) Pengantar Pendidikan Anti Korupsi. Yayasan Kita Menulis.
- Simarmata, J. et al. (2019) Inovasi Pendidikan Lewat Transformasi Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sinaga, O. S. et al. (2020) Manajemen Kinerja dalam Organisasi. 1st edn, Manajemen Kinerja dalam Organisasi. 1st edn. Edited by J. Simarmata. Medan: Kita Menulis.
- Slamet, P. H. (2011) 'Peran pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi', Jurnal Cakrawala Pendidikan, (2).
- Slavin, RE. (2005). Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik. Bandung: Nusa Media.

- Soekanto, S. (2003) *Sosiologi Suatu Pengantar*, EDISI Cet. 35. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soenarto, N. and Sudarsono, F. (2013) 'Model Evaluasi Diri Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(1), pp. 80–89.
- Stata, R. (1989). *Organizational Learning-the Key to Management Innovation*. MIT Sloan Management Review. 30(3). p.63.
- Stubbs, S. (2008) 'Inclusive Education: Where There are Few Resources', *The Atlas Alliance*, (September), pp. 1–156. Available at: [https://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE\\_few\\_resources\\_2008.pdf](https://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE_few_resources_2008.pdf).
- Subandijah. (1992). *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subrahmanian, (2005). Gender equality in education: Definitions and measurements. *International Journal of Educational Development*. Volume 25, pages 395 – 407.
- Sudarmanto, E. et al. (2020) *Etika Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarsana, I. K. et al. (2018) "Teknologi Dan Aplikasinya Dalam Dunia Pendidikan," *Jayapangus Press Books*, hal. i–55.
- Sudarso, A. et al. (2020) *Konsep E-Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Suhelayanti, S., Aziz, M. R., Sari, D. C., Safitri, M., Saputra, S., Purba, S., ... & Simarmata, J. (2020). *Manajemen Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis...
- Sunarto, K. (2004) 'Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation', dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I.
- Supriyadi, D. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyono. (2007). *Evaluasi Program untuk Pendidikan dan Pelatihan*. Surabaya: Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Regional IV.

- Suryadi. (2020). "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0 (Sebuah Telaah Perspektif Manajemen Pendidikan)." Pp. 16–29 in Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
- Syafaruddin, S. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakanmenuju Organisasi Sekolah Efektif Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafaruddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Konsep, Strategi, dan Aplikasi kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Syamsidar (2015) 'Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Pendidikan', Al-Irsyad Al-Nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2(1), pp. 83–92.
- Syaodih, N. (1997). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Kosdakarya.
- Syaripudin, T. (2010) Landasan Pendidikan. Bandung: Percikan Ilmu.
- Tilaar, H. (1998) Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21. Indonesia Tera.
- Tilaar, H. A. R. (2009). Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A.. R, dan Nugroho, R. (2012). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. and Nugroho (2009) Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tilaar, H.A.R. (2002). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo.
- Tilaar. H. A. R, & Nugroho, R. (2009). Kebijakan Pendidikan. Cetakan ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjiptono, F. (2008). Strategi Pemasaran. Edisi III. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Truna, D. S. (2010) Pendidikan agama Islam berwawasan multikulturalisme: telaah kritis atas muatan pendidikan multikulturalisme dalam buku ajar pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum di Indonesia.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO (1994) 'The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education', World Conference on Special Needs Education: Access and Quality. Available at: <https://www.european-agency.org/sites/default/files/salamanca-statement-and-framework.pdf>.
- UNICEF (2017) 'Inclusive Education', (September). Available at: [https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE\\_summary\\_accessible\\_220917\\_brief.pdf](https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf).
- Ustama, D. D. (2009) 'Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan', *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), pp. 1–12.
- Wahab, A.A. (2008). *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan: Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan*. Bandung: Kerjasama Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan CV. Alfabeta.
- Wahab, S.A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Wahid, F. (2005) "Peran Teknologi Informasi dalam Modernisasi Pendidikan Bangsa," *Media Informatika*, 3(1).
- Wardiana, W. (2002) "Perkembangan teknologi informasi di Indonesia."
- Wibowo, DA (2014). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Economia*. Vol. 10 (2). p.135.
- Widiansyah, A. (2017) 'Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi', *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), pp. 207–215.

- Widodo, Heri. (2016). "Potret Pendidikan Di Indonesia Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (Mea)." *Cendekia: Journal of Education and Society* 13(2):293.
- Wulandari, R. T. (2019) 'PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL', *KATA PENGANTAR*, p. 153.
- Yamin, M. (2006). *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Yongqing Dong, Yunli Bai et al, (2020). Does gender matter for the intergenerational transmission of education? Evidence from rural China. *International Journal of Educational Development*. Volume 77, pages 1 – 12.
- Yuliani, M. et al. (2020) *Pembelajaran Daring untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan*. Yayasan Kita Menulis.
- Yuristia, A. (2017) 'Keterkaitan Pendidikan, Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi Dan Pembangunan', *Ijtimaiyah*, 1(1), pp. 1–17. Available at: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/view/1161>.
- Zaimudin (2017) 'PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SALURAN MOBILITAS SOSIAL', *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 4(2). doi: <https://doi.org/10.15408/sd.v4i2.7994>.
- Zambelli, F. and Bonni, R. (2004) 'Beliefs of Teachers in Italian Schools Concerning The Inclusion of Disabled Students: A Q-Sort Analysis', *European Journal of Special Needs Education*, 19(3), pp. 351–366. doi: 10.1080/0885625042000262505.



# Biodata Penulis



**Dr. Sukarman Purba, ST, M.Pd**, dilahirkan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Mei 1962. Lulus dari pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Teknik Elektro IKIP Medan Tahun 1986, S1 Teknik Elektro UISU Medan Tahun 2000, pendidikan S2 dari IKIP Jakarta Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Tahun 1992, dan pendidikan S3 dari Universitas Negeri Jakarta Jurusan Manajemen Pendidikan Tahun 2008. Saat ini aktif sebagai Tenaga Pengajar di Universitas Negeri Medan. Aktif menulis Buku

Referensi dan telah menghasilkan sebanyak 33 buku yang ditulis secara kolaboratif. Selain itu, melakukan penelitian dalam jurnal bidang manajemen pendidikan, sosial dan pariwisata. Aktif dalam kepengurusan Asosiasi Profesi Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI) Pusat dan Daerah Sumatera Utara, Pengurus Organisasi kemasyarakatan HMSI Sumatera Utara, PMS Kota Medan dan Pengurus IKA S3 MP UNJ Wilayah Sumatera Utara.



**Prof. Dr. Erika Revida, MS** lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi

Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan sejak tanggal 1 April 2007 menjadi

Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional terutama bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, manajemen perubahan, e-government, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pelayanan pariwisata dan sebagainya. Email : erikarevida@yahoo.com.



**Andi Febriana Tamrin lahir** di Sengkang 12 Februari 1990. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Universitas Hasanuddin ditahun 2012 dengan meraih gelar Sarjana Sastra (S.S.). Pada tahun 2014 berhasil menyelesaikan pendidikannya pada Universitas Hasanuddin dengan meraih gelar Magister Humaniora (M.Hum) pada bidang ilmu

ELS (English Language Studies) konsentrasi Kesusastraan. Aktif sebagai dosen di Program Studi Sastra Inggris Universitas Fajar sejak tahun 2015 sampai saat ini.



**Dr. Ir. Erniati Bachtiar, ST., MT.** adalah anak ke dua dari pasangan Alm. Drs. H. Bachtiar Rasyid dan Hj. Hatijah Nur. Penulis lahir di Watampone, 06 Oktober 1977. Penulis menikah dengan Nur Zaman, SP., M.Si tahun 2006 dan Penulis telah memiliki 1 putra 2 putri yaitu Fitrah Alif Firmasnyah, Fadhilah Dwi Fatimah dan Faiqah Fauziah. Penulis menyelesaikan studinya S1–Sarjana Teknik (S.T) pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) tahun 2000, S2

– Magister Teknik (M.T) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Univeristas Gadjah Mada (UGM) tahun 2003, S3–Program Doktor (Dr) Program studi ilmu Teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 2015. Mengikuti Program Profesi Insinyur (PPI) di UNHAS tahun 2019 dan telah peroleh gelar Insinyur (Ir) Tahun 2020. Bergabung jadi Dosen Tetap Universitas Fajar sejak tahun 2008 - sekarang. Penulis mengampuh mata kuliah Teknologi Bahan, Statika, Topik Khusus Struktur, Teknologi Bahan lanjut. Penulis sangat tertarik tentang penelitian tentang Self Compacting Concrete (SCC), Beton Geopolimer dengan Bahan Dasar Limbah Fly Ash, Beton Ringan dengan Agregat Buatan dari Limbah Plastik. Penulis telah menulis beberapa

jurnal nasional dan internasional dan buku. Penulis sebagai Dekan FT (2019-sekarang), asesor BKD dan Verifikator Sinta serta Ketua Tim PAK pada Universitas Fajar. SINTA ID: 5975589; Scopus ID : 56568222900, [https://www.researchgate.net/profile/Erniati\\_Bachtiar](https://www.researchgate.net/profile/Erniati_Bachtiar), email: [erni@unifa.ac.id](mailto:erni@unifa.ac.id). HP/wa: 081354937610.



**Dr. Bonaraja Purba, M.Si**, Lulus Sarjana Pendidikan (S1) dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Sains Ilmu Ekonomi (S2) dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Doktor Ilmu Ekonomi (S3) juga dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini selalu aktif menulis pada Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional, Buku Ajar dan Buku Referensi, dan berkarir sebagai Dosen Tetap dan Peneliti di Fakultas

Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Sumatera Utara. Telah menulis lebih dari 50 judul Buku Ekonomi dan Pendidikan, yang telah diterbitkan oleh berbagai penerbit. Beberapa judul Buku Ekonomi karya kolaborasinya dalam dua tahun terakhir antara lain: Ekonomi Pembangunan; Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan; Ekonomi Sumber Daya Alam; Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran; Ekonomi Kreatif; Ekonomi dan Bisnis Indonesia; Pemasaran Internasional; Ekonomi Publik; Ekonomi Internasional; Ekonomi Pariwisata; Sistem Perekonomian Indonesia; Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Kewirausahaan; Kewirausahaan: Peluang dan Tantangan; Kewirausahaan dan Bisnis; Pengantar Otonomi Daerah dan Desa; Pengantar Hukum Bisnis; Dasar-Dasar Agribisnis; Pengantar Ilmu Pertanian; Ilmu Usahatani; Matematika Ekonomi dan Bisnis Untuk Perguruan Tinggi; Problematika dan Solusi: Matematika Ekonomi dan Bisnis; Konsep E-Bisnis; Sistem Informasi Bisnis; Komunikasi Bisnis; Etika Bisnis; Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis; Sistem Informasi Manajemen Bisnis; Sosiologi Ekonomi; Organisasi dan Manajemen; Manajemen Usaha Kecil dan Menengah; Manajemen Merek; Perilaku Organisasional; Manajemen Pemasaran Jasa; Manajemen Pemasaran Perusahaan; Manajemen Inovasi; Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar; Manajemen Produksi dan Operasi; Manajemen Operasional; Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Teori Administrasi Publik; Dasar-Dasar Pemasaran; Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen; Konsep Dasar E-Commerce; Studi Kelayakan Bisnis; Dasar-Dasar Periklanan;

Manajemen Perkantoran; Pengantar Media Pembelajaran; Pengembangan Media Pembelajaran; Manajemen Konflik Berbasis Sekolah; Inovasi Pendidikan: Konsep, Proses, dan Strategi; Pengantar Pendidikan Anti Korupsi; Dasar-Dasar Kependidikan; Analisis Kebijakan Pendidikan; Metodologi Penelitian Bidang Pendidikan; Teori Belajar dan Pembelajaran; Pengetahuan Lingkungan; Pengantar Ilmu Sosial; Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Antropologi Budaya; Administrasi dan Supervisi Pendidikan; Pendidikan Karakter; Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan; dan Landasan Pedagogik: Teori dan Kajian.



**Yulia Rizki Ramadhani, M.Pd.** lahir pada tanggal 4 April 1989 di Padangsidimpuan, merupakan anak pertama dari Bapak Drs. Yuswin Harputra, M.Pd dan Ibu Lisdawaty. Menyelesaikan program sarjana jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan tahun 2012. Selanjutnya menyelesaikan program magister jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 2017 dan bergabung menjadi dosen tetap di Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan. Aktif sebagai tutor online Pendidikan Bahasa Inggris

di Universitas Terbuka sejak tahun 2018. Juga aktif dalam kepenulisan buku dan jurnal nasional. Serta terlibat sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional. Beberapa penelitiannya pernah didanai oleh Kemeristekdikti dengan Skema Penelitian Dosen Pemula sebagai ketua pada tahun 2019 dan di tahun yang sama dengan judul yang berbeda berperan sebagai anggota peneliti.



**Pratiwi Bernadetta Purba, M.M, M.Pd** Lahir di Medan pada tanggal 24 Maret 1990. Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Manajemen dari Universitas HBKP Nommensen dan Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan. Sejak tahun 2012 hingga saat ini aktif berkarir sebagai pendidik. Penulis telah menghasilkan beberapa buku kolaborasi antara lain: Pengantar Komunikasi Organisasi (2020), Ekonomi dan Bisnis Indonesia (2020), Manajemen Sektor Publik (2020), Industri

Pariwisata dan Kuliner (2020), Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan & Implementasi (2020), Konsep E-Bisnis (2020), Teori dan Strategi Manajemen Operasional (2020), Dasar-dasar Manajemen dan Bisnis (2020), Dasar-dasar Manajemen Pendidikan (2020), Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (2020), Perilaku Organisasi (2020), Manajemen Merek (2020), Pengantar Media Pembelajaran, dan Pengantar Pendidikan Anti Korupsi (2020), Dasar-Dasar Kependidikan (2021), Kewirausahaan dan Bisnis (2021).



**Dina Chamidah, S.Pd., SH., M.Si., M.Kn., C. STMI.** Dosen di Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Bahasa dan Sains, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi dari FPMIPA Universitas Negeri Surabaya, juga Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kartini, Surabaya. Magister Sains dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, juga Magister Kenotariatan dari Universitas Surabaya, Pendidikan Khusus Advokat PERADI dari

Universitas Surabaya, Pendidikan Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia di Yogyakarta dan sekarang masih belajar di Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga sebagai Awardee LPDP pada Program Doktorat Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Malang. Anggota Organisasi: PBI, IDRI, PDRI, FDI, Kodepena, KPII, ADI, FKDI, Divisi Pelatihan TAPLAI 2 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), Jakarta, Indonesia, pernah menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai PERINDO, pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti di Kota Mojokerto dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, juga sebagai anggota EURASIA (TERA, STRA, SSHRA, HBSRA), dan dari tahun 2019 menjadi International Referee Board dari TAFFD's. Mulai tahun 2020 sebagai Team Peer Reviewer Jurnal Teknosains Kodepena, Member dari IAN (International Association of Neuroscience), ISDR (International Society for Dermatology Research), Ikatan Ilmuwan Indonesia International (i4), Ambassador of Sustainability, Wakil Ketua Divisi Akademik dan Publikasi Ilmiah Mata Garuda 2.0, Pengurus Divisi Temu Ilmiah Neurosaintis Muda Indonesia dan juga sebagai Founder, Owner dan Advokat di DC Law Firm. Minat utama saya adalah Biologi, Pendidikan Biologi, Ilmu Biologi Reproduksi, Zoologi,

Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Manajemen, Teknologi Pendidikan, Hukum dan Kenotariatan.



**Dr. Janner Simarmata, S.T., M.Kom.** Sarjana Teknik Informatika dari STMIK Bandung, Magister Ilmu Komputer dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Doktor Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) diperoleh dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung bidang kajian Blended Learning.

Menulis buku sejak tahun 2005. Dosen di Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer (PTIK) Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan.

Informasi lengkap dapat dilihat di web pribadi [www.jannersimarmata.com](http://www.jannersimarmata.com) | surel: [jannersimarmata\[at\]unimed.ac.id](mailto:jannersimarmata[at]unimed.ac.id).



**Ika Yuniwati, S.Pd, M.Si,** lahir di Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 1987. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Pendidikan pada 10 Oktober 2009. Ia merupakan alumnus Program Studi Matematika Jurusan MIPA Fakultas KIP Universitas Jember. Pada tahun 2013 mengikuti Program Magister Statistika dan lulus pada tahun 2015 dari Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun 2016 diangkat menjadi Dosen Politeknik Negeri Banyuwangi dan ditempatkan di Jurusan Teknik Mesin pada Program Studi Teknik Mesin.



**Dr. Drs. Marto Silalahi, M.Si**, dilahirkan di Pematangsiantar, 23 Maret 1970, anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Drs.PC Silalahi (almarhum) dan Ibu Donnaria Manurung. Pendidikan dasar ditempuh SD RK No. 4 Pematangsiantar, lulus tahun 1983, SMP Negeri 1 Pematangsiantar, lulus tahun 1986, SMA Negeri 2 Pematangsiantar, lulus tahun 1989, melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi.pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan (STPDN), di Jatingor Bandung Jawa Barat, tamat tahun 1992, melanjutkan

pendidikan strata satu (S1) di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), jurusan manajemen pemerintahan di Jakarta, tamat tahun 1998, melanjutkan strata dua (S2) di Universitas Padjadjaran (UNPAD), jurusan Ilmu-ilmu Sosial, di Bandung Jawa Barat, tamat pada tahun 2001, dan melanjutkan strata tiga (S3) di Universitas Padjadjaran (UNPAD) jurusan Ilmu ilmu sosial, di Bandung Jawa Barat, tamat tahun 2007.

Pada tahun 1-2-1991, diterima CPNS pada Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan pendidikan tugas belajar pada STPDN jatinangor Jawa Barat dan pada tanggal 1-1-2012 pindah alih jenis kepegawaian menjadi dosen dpk Kopertis wilayah I Sumatera Utara. Saat ini dosen dpk STIE Sultan Agung Pematangsiantar.



**Dr. Karwanto, M.Pd** Lahir pada tanggal 16 Mei 1977 di Indramayu Jawa Barat. Anak ketiga dari sembilan bersaudara ini menamatkan Program Doktor (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM) pada Tahun 2009. Saat ini tercatat sebagai Dosen Tetap Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) (2010-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui Email. [karwanto@unesa.ac.id](mailto:karwanto@unesa.ac.id). Pengalaman penulisan publikasi ilmiah dapat dilihat pada Scopus

ID: 57211533290. Sinta ID: 6010248. Orchid ID: 0000-0002-9062-7602 dan Google Scholar: uaxbD1wAAAAJ.



**A. Nururrochman Hidayatulloh** Lahir pada 17 Oktober 1984 di Brebes Jawa Tengah merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Drs. H Ainul Yaqien HAF, MP.d dan Almh Hj Alfiah Ma'shum. Merupakan Ahli Peneliti Muda Bidang Kesejahteraan Sosial pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial RI. Menyelesaikan Studi S1 jurusan Ilmu Sosiatri (Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) FISIPOL UGM. Menyelesaikan S2 (M.A) pada Kampus yang sama pada Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan kekhususan perencanaan dan kebijakan sosial. Saat ini sedang menempuh pada S2 (M.Sc) Pada Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dapat dihubungi melalui email : [anhidayatullah@kemosos.go.id](mailto:anhidayatullah@kemosos.go.id) atau [anhidayatullah79@gmail.com](mailto:anhidayatullah79@gmail.com)

Buku ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan pendidikan bagi pimpinan, pengambil kebijakan, dosen, kepala sekolah, pengawas, pemerhati dalam bidang manajemen, ekonomi, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Buku ini disajikan dengan struktur yang dibangun atas tiga belas jenis tulisan, sehingga pembahasannya lebih komprehensif, yaitu:

1. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan.
2. Inovasi dan perubahan dalam pendidikan.
3. Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya.
4. Pendidikan dan Gender.
5. Pendidikan dan Ekonomi.
6. Pendidikan dan Mobilitas Sosial.
7. Pendidikan Multikultural.
8. Pendidikan Inklusi.
9. Pendidikan dan Teknologi Informasi.
10. Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi.
11. Implementasi Kebijakan.
12. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.
13. Penelitian Kebijakan Pendidikan

# Analisis KEBIJAKAN PENDIDIKAN



YAYASAN KITA MENULIS  
press@kitamenulis.id  
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6840-47-4



9 786236 840474